

LAPORAN AKHIR

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (OMS) DALAM MENDORONG KESETARAAN GENDER DALAM DEMOKRASI INDONESIA DI ERA DIGITAL



Penerbitan ini bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pendanaan RISPRO.

Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Penulis, dan tidak mencerminkan pendapat dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Penulis:

Sugeng Bahagijo
Yanu Endar Prasetyo
Denisa Amelia Kawuryan
A.D. Eridani
Bona Tua Parlinggomon Parhusip

Diterbitkan oleh:

International NGO Forum on Indonesian Development

Alamat:

Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No.105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 - Indonesia
Phone (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497
Email: office@infid.org
Laman: www.infid.org

ISBN 978-979-8811-20-3



Cetakan Pertama, September 2021
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Ilustrasi cover : www.freepik.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan riset ini dapat selesai dilakukan dengan dukungan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pendanaan Riset Prioritas Nasional pada bidang fokus sosial humaniora, penguatan demokrasi Indonesia melalui konsolidasi dan penguatan civil society.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pakar, jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS), dan anggota INFID di seluruh Indonesia, termasuk Migrant Care, Koalisi Perempuan Indonesia, Rahima, Gita Pertiwi, Yayasan Lingkaran Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) di Maluku, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, TIKI Jaringan HAM Perempuan Papua, Perempuan AMAN, dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas keterlibatannya dalam pengumpulan dan validasi data.

Selain itu ucapan terima kasih juga kami berikan kepada Prof. Dr. Firman Noor, M.A selaku Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) yang telah memberikan arahan jalannya riset ini. Termasuk kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada penulisan riset yaitu Tatat Sukarsa, Intan Kusumaning Tiyas, Abby Gina Boang Manalu dari Jurnal Perempuan, serta tim enumerator Megawati dan Bella Sandiata.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan, kami berharap riset ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan peran OMS dalam mendorong kesetaraan gender dalam demokrasi Indonesia di era digital.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	iii
Daftar Singkatan	vi
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian	7
3. Kerangka Konseptual	10
4. Metodologi	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	17
1. Ketimpangan Gender dan Digital di Indonesia	17
2. Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Demokrasi di Era Digital	21
3. Ketimpangan Gender dan Digital dalam Perspektif Feminisme	24
4. Ringkasan Riset-Riset Terdahulu	26
BAB 3 Ketimpangan Gender dalam TIK	35
1. Pemanfaatan TIK oleh Perempuan	35
2. Hambatan dan Tantangan Pemanfaatan TIK bagi Perempuan	39
3. Dampak Positif TIK bagi Perempuan	55
4. Dampak Negatif TIK bagi Perempuan	56
5. TIK dan Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja	59
6. TIK dan Kesetaraan Gender dalam Dunia Politik dan Demokrasi Kekinian	62
BAB 4. PERAN OMS MENDORONG KESETARAAN GENDER DALAM DEMOKRASI DI ERA DIGITAL	71
1. Advokasi Hak-Hak Perempuan	72
2. Pendampingan Komunitas	74
3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	76
4. Partisipasi Publik Perempuan dalam E-Demokrasi	77
5. Mendorong Pengakuan Identitas terhadap Kelompok Terpinggirkan	79
6. Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	80
7. Pengawasan Kebijakan Publik	82
8. Pemenuhan HKSR Perempuan	83
9. Kampanye Pelestarian Lingkungan	85
BAB 5 PENUTUP	89
1. Kesimpulan	89
2. Saran dan Rekomendasi	93
Lampiran: Instrumen Penelitian	98
Daftar Pustaka	103

Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Peserta Diskusi Kelompok Terfokus dari Kalangan OMS	13
Table 2. Ringkasan Teknik dan Sumber Pengumpulan Data	14
Tabel 3. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet di Wilayah Perkotaan (2016-2019)	19
Tabel 4. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet di Wilayah Pedesaan (2016-2019)	19
Tabel 5. Perbandingan Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan (2016-2019)	19
Tabel 6. Ringkasan Riset Terdahulu tentang Peran OMS dalam Mendorong Kesetaraan Gender dalam Era Demokrasi Digital di Indonesia	26
Table 7. Hambatan Keterlibatan Penuh Perempuan dalam TIK berdasarkan Riset Terdahulu	37
Tabel 8. Tabel Hambatan Pemanfaatan TIK Kelompok Perempuan Rentan Berdasarkan Pengalaman Pendampingan OMS	53

Daftar Gambar

Gambar 1. Populasi pengguna internet di 10 negara Asia (2019).	3
Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2015-2019.	4
Gambar 3. Kerangka Konseptual Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Era Digital (Van Dick, 2005 & DDI-ESCAP 2019)	10
Gambar 4. Perbandingan rata-rata upah pekerja perempuan dan laki-laki di Indonesia (2016-2018).	20
Gambar 5. Pengguna Instagram di Indonesia mayoritas perempuan (Mei 2021).	31
Gambar 6. Pohon TIK yang diidentifikasi dari pernyataan informan-informan kunci. Diolah menggunakan NVivo 12.	36
Gambar 7. Alasan masyarakat tak berlangganan <i>internet fixed broadband</i> (2021).	44
Gambar 8. Jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan provinsi (November 2020).	45
Gambar 9. Tingkat penetrasi internet di Asia Tenggara (Mei 2020).	47
Gambar 10. Kecepatan koneksi internet di ASEAN (Mei 2019).	48
Gambar 11. Penggunaan internet di Indonesia (2017).	54
Gambar 12. Dampak positif TIK bagi OMS dan perempuan.	55
Gambar 13. Perempuan perlahan semakin dipercaya menduduki posisi manajer (2016-2018).	60
Gambar 14. Indeks Demokrasi Indonesia (2006-2019).	63
Gambar 15. Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia (2015-2019).	63
Gambar 16. Jumlah pernikahan usia dini berdasarkan wilayah (2019).	64
Gambar 17. Pemanfaatan internet oleh pelaku UMKM (Juni, 2020).	76
Gambar 18. Ragam dan sebaran bahasa menunjukkan identitas bangsa yang multikultur.	79
Gambar 19. Angka kematian ibu di Asia Tenggara (2017).	84
Gambar 20. Dampak langsung perubahan iklim menurut perempuan (2021).	86
Gambar 21. Peran OMS dalam mendorong kesetaraan gender di era demokrasi digital.	91

DAFTAR SINGKATAN

ALB	: Aliansi Laki-laki Baru
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DDI	: Digital Divide Index
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
EIU	: The Economist Intelligence Unit
ESCAP	: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
FB	: Facebook
Female-Dev	: <i>Female Developer</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
GDPR	: <i>General Data Protection Regulation</i>
GIT	: <i>Girls in Tech</i>
GSMA	: Global System for Mobile Communications Association
HKSR	: Hak-Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
ICT	: Information and Communications Technology
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
IKG	: Indeks Ketimpangan Gender
INFID	: International NGO Forum on Indonesian Development
IP-TIK	: Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender Online
KOMPAK	: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesehatan
KPI	: Koalisi Perempuan Indonesia
LGBT	: <i>Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender</i>
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
RUMPUN	: Ruang Mitra Perempuan
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SDGs	: Sustainable Development Goals
SPEK-HAM	: Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
HWDI	: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

IWITA	: Indonesia Women Information Technology Awareness
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PRM	: PT Primer Rectoverso Media
PPNI	: Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia
SAFE-net	: Southeast Asia Freedom of Expression Network
RPJMdes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
SSI	: Srikandi Sungai Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WEF	: World Economic Forum

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perlu dipahami sebagai alat potensial untuk mencapai pemberdayaan dan kesetaraan secara global. Perkembangan TIK—khususnya internet—diharapkan mampu mendorong transformasi dan pemberdayaan bagi kelompok rentan dan marginal, salah satunya adalah kelompok perempuan. PBB bahkan menggarisbawahi bahwa kurangnya akses yang memadai terhadap internet berpotensi memperlambat pencapaian target-target SDGs, khususnya target ke-5, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Meskipun demikian, pemenuhan akses terhadap TIK saja juga tidak serta-merta menjamin pemberdayaan, tak pula menjamin kesetaraan. Maka dari itu, untuk memastikan perempuan memiliki akses TIK yang bermakna dan memberdayakan, faktor-faktor determinan lain seperti sosiokultural, ekonomi, dan politik harus dipahami serta dianalisis terlebih dahulu.

Berdasarkan data yang dirilis Internetworldstats (2019), pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau sekitar 53% dari total populasi. Jumlah pengguna internet di Indonesia berada di urutan ketiga di Asia, di bawah Tiongkok dan India yang masing-masing mencapai 829 juta jiwa dan 560 juta jiwa. Dengan jumlah pengguna sebesar itu, mestinya Indonesia dapat bersaing dalam ekonomi digital dunia; dan yang tak kalah penting, membuat akses terhadap internet menjadi mudah dan murah bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Namun di sisi lain, data dan laporan dari United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender atau Gender Inequality Index (GII) Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN.

GII Indonesia tercatat di angka 0,453 poin, berada di atas rata-rata negara ASEAN yang sebesar 0,356 poin. Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki ketimpangan gender di tengah makin berkembang dan meluasnya penetrasi internet atau dunia digital itu sendiri. Dengan masih tingginya ketimpangan gender ini, sulit diharapkan ada perbaikan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebab, pilar kemajuan demokrasi di era digital ini adalah adanya kesetaraan akses, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi setiap warga negara tanpa kecuali, termasuk kaum perempuan.

Untuk menganalisis ketimpangan gender dalam dunia digital (*gender digital gap*) tersebut, penelitian ini telah mengembangkan kerangka konseptual yang diadopsi dari empat level akses terhadap TIK (Van Dick, 2005) dan Digital Divide Index (DDI)-ESCAP (2019). Kerangka konseptual ini menjelaskan kaitan erat antara proses dan kendala dalam akses terhadap TIK pada perempuan yang meliputi empat aspek utama. *Pertama*, aspek motivasi atau *motivational access*, yaitu sejauh mana dorongan dan keinginan perempuan itu sendiri dalam mengakses dan memanfaatkan TIK. *Kedua*, akses material atau *physical access*, yaitu

kemampuan perempuan dalam memiliki atau menguasai perangkat TIK, dalam hal ini adalah internet. *Ketiga*, keterampilan atau *skills*, yaitu seperangkat pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan teknologi tersebut, termasuk bagaimana mereka mengatasi hambatan-hambatan teknis dan nonteknis yang ada. *Keempat*, pemanfaatan atau *usage access*, yakni keberhasilan perempuan dalam memanfaatkan TIK untuk memberdayakan dirinya. Keberhasilan pemanfaatan internet oleh perempuan hanya akan berhasil apabila ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), literasi (*literacy*), serta keamanan (*security*) dapat diperoleh dengan mudah dan setara.

Untuk mengikis ketimpangan dan mendorong kesetaraan tersebut, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tentu memainkan peran yang sangat penting, yaitu memastikan agar perempuan dari kelompok rentan dapat mengakses TIK untuk mewujudkan misi perbaikan status sosial, ekonomi, kesetaraan gender, dan peningkatan partisipasi dalam kehidupan publik lainnya. TIK dapat mendorong demokrasi yang inklusif jika kelompok yang terpinggirkan mendapat manfaat dan akses yang dibutuhkan. Perempuan tidak hanya didorong untuk terkoneksi dengan TIK, tetapi juga perlu dipastikan agar mereka dapat memanfaatkannya secara lebih bermakna (terjangkau dan berkualitas).

Penelitian ini adalah laporan awal tentang situasi ketimpangan gender dalam akses TIK di Indonesia. Mengingat kesetaraan gender dalam TIK adalah bagian dari cita-cita global yang tertuang dalam SDGs, penting untuk melihat bagaimana keterkaitan antara tata kelola kebijakan TIK pada tingkat global, regional, nasional, dan domestik dalam rangka memastikan partisipasi penuh perempuan. Hal-hal seperti hambatan kultural, struktural, dan individual penting untuk diidentifikasi agar dapat direspons secara tepat. Representasi hak-hak perempuan dalam pembuatan kebijakan adalah hal yang harus terakomodasi agar perempuan dapat terlibat dan menikmati kemajuan masyarakat TIK secara maksimal dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik yang demokratis.

Secara khusus, penelitian ini berfokus pada peran OMS di Indonesia yang telah terlibat dalam mendorong demokrasi yang inklusif melalui pengurangan kesenjangan gender dalam TIK. OMS di Indonesia selama ini telah memainkan peran kunci dalam mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi serta mengawal berbagai proses pembangunan. OMS juga menjadi mitra pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas layanan dan taraf hidup masyarakat. Kemitraan multipihak antara pemerintah, OMS, dan pemangku kepentingan lainnya telah terbentuk di berbagai sektor serta menjadi model baru implementasi kebijakan yang inklusif dan partisipatif di Indonesia.

Kekuatan utama penelitian ini adalah pada variasi dan kedalaman data kualitatif yang bersumber dari wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan tinjauan literatur. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, wawancara tatap muka sebagai teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif masih dapat dilakukan

secara virtual melalui aplikasi seperti Zoom. Demikian pula dengan diskusi kelompok terfokus yang seharusnya dilakukan secara tatap muka dan interaktif. Oleh karena masih dalam masa pandemi, diskusi dilakukan dengan menggunakan platform Zoom dan fitur *breakout room* yang ada di dalamnya.

Narasumber dalam FGD adalah 11 perwakilan OMS yang melakukan pendampingan pada berbagai kelompok identitas. Wawancara mendalam juga dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait hambatan, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh OMS dalam menjalankan perannya mendorong kesetaraan gender di era digital saat ini. Jumlah total informan dalam wawancara mendalam ini sebanyak 26 informan kunci yang dipilih secara *purposive*. Selain kepada pimpinan OMS, wawancara mendalam juga dilakukan terhadap perempuan praktisi teknologi dan perempuan aktivis atau politisi untuk melihat lebih jauh bagaimana ketimpangan gender di dunia kerja dan dunia politik.

Tinjauan sistematis juga telah dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu melalui Google Scholar Advanced Search. Berdasarkan kesesuaian tema, pembatasan tahun, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian; terpilih delapan jurnal sebagai sumber penelitian terdahulu yang terkait erat dengan riset ini. Seluruh data yang terkumpul baik dalam bentuk audio, audio visual, dokumen, transkrip wawancara, transkrip diskusi kelompok terfokus, maupun catatan pertemuan lainnya disimpan serta diunggah ke dalam program komputer (*software*) NVivo 12. Program NVivo 12 ini merupakan alat bantu bagi peneliti untuk melakukan analisis data, baik dalam melakukan *coding*, pencarian kata kunci, penentuan tematik, maupun pengembangan matriks temuan hasil penelitian. Hasil *coding*, *mind-mapping*, dan klasifikasi kasus kemudian menjadi bahan utama dalam proses penulisan hasil penelitian (narasi tematik).

Beberapa temuan penting dan utama dalam penelitian ini dapat diuraikan ke dalam dua temuan pokok. *Pertama*, bukti-bukti empiris ketimpangan gender dan *gender digital gap* di Indonesia. *Kedua*, tantangan dan peran OMS dalam mendorong kesetaraan gender dan e-demokrasi di Indonesia.

A. Bukti-Bukti Ketimpangan Gender dan Ketimpangan Gender Digital di Indonesia

1. Indonesia masih berada di peringkat 85 dari 153 negara dalam hal ketimpangan gender

Berdasarkan laporan The Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia masih berada di peringkat ke-85 dari 153 negara dengan skor 0,70. Angka tersebut tidak mengalami perubahan sejak 2018. Artinya, negara perlu melakukan sejumlah upaya serius agar indeks ketimpangan gender Indonesia dapat diperbaiki. Selama 12 tahun terakhir, ketimpangan gender di Indonesia sebenarnya telah membaik, terutama

karena ada perbaikan dari sektor pendidikan dan kesehatan. Meski demikian, partisipasi perempuan masih rendah dalam bidang ekonomi dan politik.

2. Ketimpangan gender dalam dunia kerja masih ada, meski perlahan mulai membaik

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jabatan manajer di perusahaan-perusahaan Indonesia masih didominasi laki-laki. Dalam rentang 2016-2018, angka tertinggi ada di 2016 sebesar 75,83%. Sebaliknya, hanya 24,17% jabatan manajer yang diisi oleh perempuan. Meskipun laki-laki masih mendominasi jabatan manajer, jumlahnya mulai berkurang perlahan pada 2017 dan 2018. Masing-masing sebesar 73,37% dan 71,03%. Kepercayaan terhadap perempuan untuk mengemban tugas sebagai manajer pun bertambah. Pada 2017, sebanyak 26,63% perempuan menjabat sebagai manajer. Tahun berikutnya, angkanya naik menjadi 28,97%.

3. Ketimpangan gender dalam politik masih ada, meski perlahan mulai membaik

Indonesia hingga saat ini masih memiliki pekerjaan rumah mengenai kesetaraan gender. Meskipun masih tinggi, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia sebenarnya mengalami tren membaik. Pada 2019, IKG Indonesia sebesar 0,421, membaik apabila dibandingkan dengan IKG pada tahun 2015 sebesar 0,466 poin. Salah satu indikator yang mengalami perbaikan adalah persentase keterwakilan di parlemen. Pada 2015, keterwakilan perempuan hanya 17,3%, sedangkan laki-laki 82,7%. Pada 2019, keterwakilan perempuan meningkat menjadi 20,5%. Ketimpangan gender dalam politik ini berakar sangat dalam pada budaya patriarki dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

4. Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi

Dari hasil survei INFID terhadap 2.210 responden di seluruh Indonesia pada Mei-Juli 2020, tercatat sekitar 71,8% masyarakat di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual, baik pada diri sendiri, keluarga, maupun orang lain yang dikenalnya. Dari jumlah tersebut, 65,1% responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual. Sebanyak 27,4% responden pernah mendapat pemaksaan perkawinan. Sebanyak 12,3% responden pernah dipaksa memakai kontrasepsi. Pengalaman OMS Lappan Maluku menunjukkan bahwa karena ketimpangan digital, perempuan korban mengalami kerentanan yang semakin berlapis.

5. Pemenuhan HKSR untuk perempuan di Indonesia masih rendah

Berdasarkan data Bank Dunia, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi. AKI di Indonesia tercatat sebesar 177 kematian per 100 ribu kelahiran hidup pada 2017. Meskipun rasio itu sudah lebih baik dari belasan tahun sebelumnya, AKI Indonesia masih ketiga tertinggi

di Asia Tenggara. Negara yang punya AKI lebih besar dari Indonesia adalah Myanmar (250 kematian per 100 ribu kelahiran hidup) dan Laos (185 kematian per 100 ribu kelahiran hidup). AKI di Kamboja, Timor Leste, dan Filipina juga masih di atas 100 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara itu, lima negara lainnya di Asia Tenggara memiliki AKI yang lebih baik karena sudah di bawah 100 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Kelima negara tersebut adalah Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura.

6. Indonesia masih berada pada peringkat ke-7 dari 11 negara Asia Tenggara lainnya dalam hal penetrasi internet

Statista mencatat, hingga Mei 2020, tingkat penetrasi internet tertinggi di kawasan Asia Tenggara ada di Brunei Darussalam (95,3%), disusul oleh Singapura dengan tingkat penetrasi 88,4%. Kemudian Thailand, Malaysia, dan Filipina masing-masing sebesar 81,7%, 81,4%, dan 72,1%. Indonesia berada di posisi ketujuh di kawasan ini dengan tingkat penetrasi 62,6%. Sedangkan tingkat penetrasi terendah di kawasan ini adalah Timor Leste, yakni 31,1%.

7. Kecepatan internet di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain

Koneksi internet di Indonesia juga masih terbelakang dibanding negara-negara lain di dunia. Menurut data Speedtest Global Index, Indonesia berada di posisi ke-112 dunia dengan rata-rata kecepatan mengunduh (*download*) *file* sebesar 17,02 Mbps per Mei 2019. Sedangkan untuk rata-rata kecepatan mengunggah (*upload*) *file*, Indonesia berada di peringkat ke-123 dunia dengan kecepatan sebesar 10,44 Mbps. Di antara negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia hanya unggul dari Kamboja dan Myanmar. Kamboja berada di peringkat ke-117 dunia untuk kecepatan unduh, sedangkan Myanmar di peringkat ke-127. Untuk kecepatan internet ketika mengunggah *file*, Indonesia berada di posisi terbawah di ASEAN. Singapura merupakan negara yang memiliki koneksi internet terbaik di ASEAN ataupun di dunia, yaitu mencapai 197,5 Mbps untuk mengunduh *file* dan 53,12 Mbps untuk mengunggah *file*.

8. Pengguna internet laki-laki dan perempuan masih timpang

Berdasarkan data Susenas (2019) yang menghimpun data pengguna internet sejak tahun 2016 hingga 2019, tampak bahwa masih ada ketimpangan gender digital yang konsisten. Data BPS menunjukkan bahwa di tahun 2019 perempuan pengguna internet 6,06% lebih rendah daripada laki-laki. Tingkat ketimpangan gender digital di daerah pedesaan di tahun yang sama bahkan menunjukkan disparitas yang lebih besar. Data BPS menunjukkan bahwa di tahun 2019 perempuan pengguna internet 6,72% lebih rendah dari laki-laki. Selisih pengguna internet antara laki-laki dan perempuan adalah sebesar 7,6% (2016), 7,04% (2017), 6,34% (2018), dan 6,26% (2019). Dari data tersebut, ketimpangan pengguna internet berdasarkan gender memang terindikasi menurun, tetapi ketimpangan tersebut masih perlu terus-menerus diturunkan.

9. Pengguna komputer laki-laki dan perempuan masih timpang

Ketimpangan dalam akses digital, menurut data Susenas, tidak hanya pada akses terhadap internet, tetapi ditunjukkan juga dalam ketimpangan penggunaan komputer. Pada tahun 2019, laki-laki pengguna komputer adalah sebanyak 15,17%, sementara perempuan 13,77% (Susenas, 2019). Data Statistik Telekomunikasi Indonesia ini juga menunjukkan adanya ketimpangan digital berdasarkan akses material.

10. Ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan kemungkinan turut menghambat perempuan memiliki akses material TIK

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Perekonomian 2019 mencatat, kesenjangan upah laki-laki dan perempuan semakin lebar. Upah untuk pekerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Selama periode 2015-Februari 2019, selisihnya mencapai Rp 492,2 ribu. Adapun secara terperinci, selisih pada 2015 sebesar Rp 269 ribu, Rp 458,4 ribu (2016), Rp 554 ribu (2017), dan Rp 560,6 ribu (2018). Sementara hingga Februari 2019, kesenjangan semakin lebar hingga Rp 618,8 ribu. BPS juga menyebutkan kesenjangan upah ini merupakan isu yang lama karena adanya anggapan perempuan kurang berkontribusi dalam pekerjaan. Selain itu, perempuan juga cenderung ditempatkan pada posisi yang bernilai rendah. Masalah ini menjadi tantangan bagi perempuan dalam dunia ketenagakerjaan untuk memperoleh pekerjaan, pendapatan, dan posisi kepemimpinan yang setara. Konsekuensi dari ketimpangan upah antargender ini adalah perempuan memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan akses material TIK.

11. Riset dan kajian ketimpangan gender di Indonesia masih minim

Penelitian dengan perspektif keadilan gender dan inklusi sosial penting sebagai landasan rancangan kebijakan dan rencana aksi terkait pemberdayaan kelompok-kelompok marginal. Penelitian dengan perspektif gender dan minoritas memiliki dampak besar bagi pemberdayaan masyarakat. Namun sayangnya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Universitas Airlangga, sejak tahun 2013-2017 hanya 7% dari total riset yang memasukkan perspektif gender dan minoritas. Hal ini disebabkan masih kuatnya pengaruh norma patriarki di kalangan komunitas peneliti (Rauf, 2020).

12. Meski bagi sebagian perempuan akses telah terpenuhi, partisipasi aktif perempuan masih relatif rendah

ICT Watch menemukan bahwa, walaupun sebagian kelompok perempuan miskin kota dan perempuan pedesaan telah memiliki akses terhadap TIK, partisipasi publik mereka masih dinilai rendah. Alasannya, pemanfaatan media masih berkisar pada komunikasi melalui sosial media. Kelompok tersebut belum memanfaatkan media sebagai arena untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi politiknya atau untuk keperluan pemberdayaan lain seperti misalnya

pada aspek ekonomi. Pernyataan ini sejalan dengan temuan hasil riset dari Suwana (2017) yang menunjukkan bahwa penggunaan internet pada perempuan sebagian besar untuk kepentingan komunikasi di sosial media. Selain itu, Habsari *et al.* (2021) menunjukkan bahwa aktivis perempuan SSI hanya menggunakan media sosial untuk menunjukkan kegiatan komunitas daripada untuk memobilisasi gerakan atau memberikan pendidikan publik dalam bentuk tulisan/ Pernyataan.

13. Peran ganda perempuan ikut membatasi kesempatan perempuan dalam menggunakan internet

Selain rasa rendah diri untuk dapat menguasai TIK, perempuan juga terkendala oleh sejumlah nilai budaya patriarki yang melekatkan kerja domestik pada perempuan. Dalam konteks perempuan nelayan, mereka melakukan berbagai kerja reproduksi dan kerja produksi mencapai 15 jam per hari (Arivia & Gina, 2017; Pratiwi & Gina, 2017). Oleh sebab itu, waktu untuk belajar atau mencari informasi dari internet tidak banyak mereka lakukan. Di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, perempuan menggunakan waktu 4,1 kali lebih banyak untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki, dan 80% total jam kerja untuk pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan. Menurut ILO (2018), di seluruh dunia, perempuan lebih banyak melakukan kerja-kerja perawatan yang tidak berbayar dibandingkan dengan laki-laki. Dalam kerangka interseksionalitas, pembagian kerja berdasarkan gender ternyata memiliki dampak yang serius. Dalam penikmatan TIK, beban perawatan rumah tangga menjadi salah satu penyebab rendahnya motivasi untuk menggunakan internet. Menurut temuan ICT Watch di lapangan, banyak perempuan di Palembang, Yogyakarta, dan Jakarta yang merasa tidak perlu untuk memiliki gadget selama laki-laki/suami mereka mempunyai perangkat tersebut. Riset ICT Watch juga menunjukkan bahwa beberapa responden hanya menggunakan gadgetnya ketika suami atau anaknya tidak di rumah (FGD 20 November 2020, ICT Watch).

14. Berlangganan internet (fixed broadband) masih mahal bagi sebagian besar rumah tangga di Indonesia

Masih banyak masyarakat yang tak berlangganan jaringan tetap pita lebar telekomunikasi (*fixed broadband*) di Indonesia (Bank Dunia, 2021). Fasilitas internet tersebut masih dianggap mahal karena pelanggan harus menyiapkan biaya untuk sewa modem, pemasangan, dan langganan bulanan yang berkisar Rp 250 ribu hingga Rp 800 ribu per bulan. Data menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai adopsi *fixed broadband* tergolong mahal adalah mereka yang tinggal di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Selain mahal biaya, masyarakat lebih senang untuk mengandalkan internet seluler dibanding *fixed broadband*. Operator seluler ini relatif lebih terjangkau dan mampu menjangkau penduduk di wilayah pelosok. Dari hasil FGD yang dilakukan dengan sejumlah OMS, 9 dari 11 representatif OMS menyatakan adanya hambatan akses material pada kelompok yang mereka dampingi. Persoalan dalam hal akses

material terkait kesanggupan perempuan untuk membeli perangkat, membayar kuota untuk internetnya, dan kemampuan mempertahankan alat tersebut. Persoalan lain adalah tidak tersedianya jaringan internet yang stabil dengan harga yang dapat mereka jangkau.

15. Penduduk—termasuk perempuan—di luar Pulau Jawa masih belum menikmati akses internet yang setara dengan penduduk di Pulau Jawa (ketimpangan infrastruktur)

Berdasarkan laporan penetrasi internet yang dirilis oleh APJII (2020), kontribusi penetrasi internet per wilayah tertinggi disumbang oleh Jawa (56,4%), Sumatera (22,6%), Sulawesi (7%), Kalimantan (6,3%), Bali dan Nusa Tenggara (5,2%), serta Maluku dan Papua (3%). Mengacu pada data tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas komunikasi di Pulau Jawa telah baik dan maju. Dalam perspektif interseksionalitas, menjadi penduduk Pulau Jawa adalah sebuah privilese jika disertai dengan kapasitas ekonomi dan pendidikan yang baik. Ketimpangan jaringan internet ini masuk dalam faktor ketersediaan (*availability*). Akses hanya akan diperoleh kalau terdapat ketersediaan jaringan. Meskipun seseorang mampu secara ekonomi untuk memiliki perangkat atau membeli pulsa, jika jaringan internet tersebut tidak ada, ia tak akan mampu mengakses dan memanfaatkan internet. Kominfo menyebut masih ada 12.548 desa di Indonesia yang belum tersentuh oleh internet. Mayoritas desa yang belum terjangkau tersebut berada di daerah pelosok yang memiliki kondisi geografis atau bentang alam yang relatif sulit dijangkau. Perempuan yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) tentu saja akan mengalami hambatan berlipat dibanding perempuan di tempat lain.

16. Kesenjangan pendidikan dan literasi digital memengaruhi keterampilan perempuan dalam menggunakan serta memanfaatkan internet

Di Indonesia sendiri, kesenjangan dalam pendidikan masih dialami, khususnya bagi perempuan dengan ekonomi lemah dan dari kelompok pedesaan. Berdasarkan Susenas dalam Kemenpppa (2019), dari tahun 2015-2019 tingkat melek aksara perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pada rentang usia 15-59 tahun, ketimpangan gender melek huruf berkisar 1,15% atau setara 1.281.208 perempuan tidak melek aksara. Rendahnya tingkat dan mutu pendidikan berdampak pada akses dan penguasaan TIK seseorang. Sebab, kemampuan untuk mempelajari dan menguasai TIK menuntut penguasaan pada pendidikan dasar, seperti baca tulis dan bahasa. GIZ dan Rahima juga menyatakan bahwa ada keterkaitan antara rendahnya pendidikan dan kesempatan akses TIK pada kelompok rentan. Kegagapan dalam teknologi ini menjadi persoalan serius karena saat ini kehidupan publik banyak terjadi di dunia *online*.

17. Meski UMKM di Indonesia banyak digerakkan oleh perempuan, masih sedikit yang bermigrasi ke pasar online

Hanya 13% dari 65 juta pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital. Data menunjukkan bahwa 64,5% dari total UMKM Indonesia dikelola oleh perempuan. Namun, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari separuh pelaku UMKM perempuan belum berjualan *online*. Padahal, melakukan usaha dengan basis digital menjadi hal yang penting bagi pemberdayaan ekonomi perempuan. Sebab, 80% dari UMKM yang menerapkan teknologi digital mengalami kenaikan omzet. Menurut Google, alasan mengapa masih banyak perempuan pelaku UMKM belum melakukan bisnis *online* karena urusan kerja rumah tangga. Banyak di antara mereka yang merasa khawatir tidak fokus pada urusan keluarga jika mengembangkan bisnis (Burhan, 2020). Artinya, norma gender terkait pembagian kerja dalam keluarga merupakan tantangan pemberdayaan perempuan. Potensi ekonomi perempuan menjadi terhambat karena perempuan menanggung beban kerja ganda. Fakta ini tidak mengherankan ketika kita melihat dominasi penggunaan internet di Indonesia adalah untuk aktivitas sosial (media sosial dan hiburan) dibanding aktivitas ekonomi lainnya.

B. Tantangan dan Peran OMS dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender Digital dan Mendorong E-Demokrasi di Indonesia

Demokrasi dan TIK memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik yang sangat kuat. Aktivitas ketatanegaraan, pemerintahan, pelayanan publik, sosialisasi politik, partisipasi politik, pemenuhan hak dasar warga negara, hingga berbagi pendapat secara *online* dapat berkembang dengan cepat ketika memanfaatkan TIK dan internet. Dengan kata lain, kita telah hidup di era e-demokrasi. Sebuah era ketika ruang demokrasi semakin terbuka dan keterbukaan ini membawa dampak bagi proses kontrol, akuntabilitas, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam mendukung prinsip-prinsip *good governance* (pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, serta akuntabel).

Jika diuraikan, setidaknya ada tiga manfaat utama dari kemajuan TIK dan internet yang ditemukan dalam studi ini. *Pertama*, TIK membantu OMS dan perempuan untuk memperluas jejaring kolaborasi. *Kedua*, kehadiran TIK juga diakui membantu OMS dan perempuan untuk beradaptasi di era pandemi Covid-19. *Ketiga*, bagi OMS yang aktif mendampingi perempuan, kehadiran dan perkembangan TIK telah membantu mereka menjadi lebih dekat kepada kelompok-kelompok perempuan atau komunitas yang didampingi. Kepemilikan dan penguasaan perangkat TIK tertentu, seperti telepon pintar, juga dapat meningkatkan keterampilan pemiliknya, sehingga mereka dapat memanfaatkan perangkat tersebut untuk kepentingan sosial (berjejaring) ataupun ekonomi (berbisnis). Beragam aktivitas yang membawa manfaat itu secara tak langsung juga akan mengangkat derajat dan status sosial perempuan jika usaha yang ditekuninya itu dianggap berhasil.

TIK tentu tidak hanya membawa manfaat positif bagi OMS dan perempuan, tetapi juga

mengandung berbagai risiko dan eksekusi negatif yang mungkin menyertai. Dampak negatif yang paling sering disorot adalah terkait penyebaran informasi bohong/palsu atau dikenal sebagai hoaks. Selain penyebaran hoaks, masalah lain yang menjadi dampak negatif TIK, khususnya internet, adalah adanya akses pada situs-situs pornografi yang dianggap membahayakan anak-anak dan generasi penerus. Tingginya akses pornografi di internet ini juga menyimpan beragam bentuk kejahatan perdagangan manusia dan kekerasan seksual lain yang menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Dampak negatif lain adalah terkait keamanan data pribadi dan data kependudukan lainnya. Masalah keamanan data pribadi ini dianggap masih sangat jarang dibicarakan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Banyak sekali fenomena di lapangan terkait dengan keamanan data pribadi yang belum mendapat perhatian. Sebagai contoh, berkembangnya pinjaman *online* (pinjol) yang tak sedikit memakan korban kaum perempuan. Secara terang-terangan, mereka mengoleksi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan data pribadi lain untuk kemudian diperjualbelikan atau digunakan untuk melakukan intimidasi dan ancaman kekerasan.

Data dan informasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki antusiasme yang tinggi untuk mempelajari dan menggunakan internet. Meskipun para perempuan sangat antusias mempelajari TIK, dalam proses pembelajaran, terkadang mereka masih ragu dan merasa cemas akan melakukan kesalahan. Faktor karakter demografi, seperti umur, memengaruhi bagaimana antusiasme atau sikap seseorang terhadap TIK.

Kelompok perempuan rentan tak hanya mengalami tantangan mental (motivasi), tetapi juga hambatan kultural. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi dasar, stereotip, kecemasan terhadap teknologi, dan ketiadaan waktu karena beban kerja ganda menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam TIK. Budaya patriarki yang termanifestasi dalam stereotip gender, pembagian kerja berdasarkan gender, dan subordinasi perempuan dalam keluarga memengaruhi aspek mental perempuan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam TIK. Oleh karena itu, banyak OMS di Indonesia mengambil peran inisiatif untuk menjangkau kelompok-kelompok yang paling tidak memiliki privilese ini dalam berbagai program pendampingan. Contohnya seperti akses internet dapat memberdayakan ekonomi perempuan, advokasi hak-hak perempuan, pemenuhan HKSR, pendampingan korban kekerasan, dan mobilisasi/kampanye lingkungan hidup.

Dalam pendidikan, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh OMS secara langsung ataupun tidak langsung telah meliputi proses penguatan kapasitas kepemimpinan dan kapasitas organisasi, baik bagi anggota OMS maupun kelompok yang didampingi. Pendidikan dan pendampingan yang dilakukan oleh sejumlah OMS memastikan agar pengaruh dari budaya patriarki yang seksis dapat diputus atau diminimalkan dampaknya terhadap perempuan. OMS berupaya memastikan agar perempuan menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, khususnya dalam penguasaan dan pemanfaatan TIK/internet.

Setidaknya terdapat lima tingkat pemerataan yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun OMS dalam rangka mengurangi *gender digital gap*. *Pertama*, pemerataan tingkat kesejahteraan. Tanpa pendapatan yang cukup dan kepemilikan aset ekonomi, akan sangat sulit bagi perempuan untuk mendapatkan akses material TIK. *Kedua*, pemerataan akses, yaitu peningkatan kemampuan perempuan untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kesempatan kerja, serta akses pendidikan dan pelatihan yang baik serta setara dengan kaum laki-laki. *Ketiga*, melalui kesadaran ini, perempuan diharapkan dapat menentukan prioritas untuk berkembang dengan dorongan dari dalam diri sendiri. *Keempat*, pemerataan partisipasi. Perempuan tidak boleh lagi dianggap sebagai kelas dua atau objek kemajuan TIK semata, tetapi harus ikut serta dalam mendapatkan manfaat dari TIK. *Kelima*, pemerataan penguasaan. Melalui pemerataan penguasaan dan partisipasi aktif dalam demokrasi digital ini, perempuan diharapkan memiliki kontrol atau penguasaan yang lebih baik dalam setiap proses pengambilan keputusan di semua level atau tingkatan.

Jika dirangkum, peran OMS dalam mendorong kesetaraan gender di era demokrasi dan digital saat ini dapat dibagi ke dalam tiga peran. *Pertama*, peran OMS dalam peningkatan kapasitas individu dan kelompok yang dijalankan melalui berbagai pelatihan, pendidikan, dan pendampingan. *Kedua*, OMS berperan dalam memperluas advokasi dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan melalui pemanfaatan TIK dan internet. *Ketiga*, OMS juga menjalankan peran secara langsung ataupun tidak langsung dalam implementasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas melalui pemanfaatan TIK. Ketiga peran ini membutuhkan dukungan dari sesama gerakan masyarakat sipil lainnya ataupun dukungan pemerintah dan publik yang lebih luas agar OMS dapat terus memastikan ketiga peran tersebut bisa berkelanjutan di era e-demokrasi saat ini dan di masa yang akan datang.



WWW.FREEPIK.COM

BAB 1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia terus mengalami kemunduran. Berdasarkan The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia pada 2019 menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3. Walaupun dalam segi peringkat Indonesia masih sama dengan tahun sebelumnya, skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6,48. Skor ini mengategorikan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi cacat dan merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun.

Berdasarkan Indeks Demokrasi Negara Global (GSoD Indices), demokrasi Indonesia juga menunjukkan kemunduran. Indonesia dikategorikan sebagai “Lemah Demokrasi” per akhir 2020. Indeks Negara Demokrasi Global (GSoD Indices) mengukur tren demokrasi di tingkat negara, regional, dan global di berbagai atribut demokrasi yang berbeda dalam periode 1975–2020. Demokrasi dikonseptualisasikan sebagai kontrol rakyat atas pengambilan keputusan publik dan pembuat keputusan, dan kesetaraan rasa hormat serta suara antarwarga negara dalam pelaksanaan kontrol tersebut. Prinsip-prinsip ini telah diterjemahkan ke dalam lima atribut utama demokrasi (pemerintah perwakilan, hak dasar, pemeriksaan pada pemerintah, administrasi yang tidak berpihak, dan keterlibatan partisipatif).

Dalam mendorong kualitas demokrasi Indonesia, penelitian bertolak dari tesis bahwa demokrasi di Indonesia akan kuat dan bermakna jika dan hanya jika CSO dan perempuan aktif ikut serta dalam mengambil bagian, baik melalui jalur keterwakilan maupun dalam jalur partisipasi. Upaya tersebut dapat tercapai salah satunya dengan akses teknologi yang setara bagi semua pihak. Mengutip indikator demokrasi dari GSoD, penelitian ini akan mendorong peningkatan demokrasi yang secara spesifik memengaruhi indikator partisipasi masyarakat sipil dalam keterlibatan partisipatif dan kesetaraan gender terhadap indikator pemenuhan hak-hak dasar.

Dalam dua dekade terakhir, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah berkembang sangat pesat di dunia. Kemajuan TIK tersebut telah mengubah wajah dunia, struktur masyarakat, dan tata kehidupan manusia. Saat ini, pemanfaatan TIK berkembang hampir di semua sektor; mulai dari media, produksi, pemasaran, jasa, hingga distribusi. Pada tahun 2011, istilah Industri 4.0 diperkenalkan pertama kali oleh Aliansi Riset Ilmu Industri Jerman (Forschungsunion). Industri 4.0 adalah visi untuk meningkatkan digitalisasi produksi yang menggambarkan bagaimana internet of things, data, dan pelayanan akan mengubah lanskap produksi, logistik, serta proses kerja masa depan (Buhr, 2017). Industri 4.0 tidak hanya dimaknai sebagai inovasi teknologi, tetapi juga harus dipandang sebagai inovasi sosial.

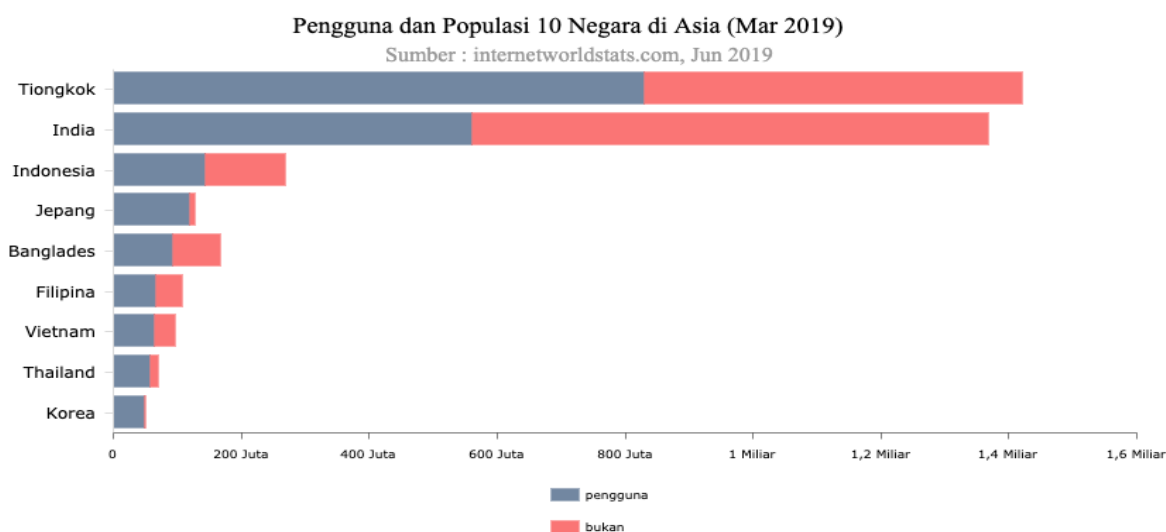
Inovasi sosial memiliki dampak besar bagi seluruh sistem. Selaras dengan itu, inovasi teknologi juga dapat berpengaruh sangat positif terhadap penyebaran inovasi sosial. Salah satu bentuk inovasi sosial adalah demokrasi, yang juga telah bertransformasi dengan bantuan inovasi teknologi. Bersamaan dengan perkembangan teknologi tersebut, muncul harapan untuk demokrasi yang semakin terbuka, langsung, dan inklusif terhadap warga negara, termasuk bagi kelompok-kelompok yang paling terpinggirkan. Ada optimisme besar bahwa kemajuan TIK dapat mendorong kesetaraan dengan cara menjembatani kesenjangan antarkelompok sosial, termasuk dalam hal kesetaraan gender.

Perkembangan TIK, khususnya perkembangan internet, diharapkan mampu memfasilitasi hadirnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan kemajuan TIK, diharapkan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajibannya. Di era digital ini, komunikasi menjadi mudah serta penyebaran dan akses informasi menjadi amat cepat. Situasi ini mendukung pula praktik kewargaan secara lebih terbuka. Kemajuan TIK memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mempertanyakan pemenuhan hak mereka, menuntut agar negara mendengar kebutuhan mereka, dan bersama-sama mengawasi akuntabilitas pemerintah. Meski demikian, mimpi tersebut hanya dapat terjadi jika masyarakat telah diberdayakan bukan hanya dalam aspek TIK, tetapi juga pada aspek politik dan demokrasi.

Di Indonesia, misalnya, telah ada sejumlah aplikasi serta layanan internet yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi publik, bahkan dapat digunakan untuk melaporkan persoalan pelanggaran demokrasi dalam pemilu. Potensi lain yang ditunjukkan oleh TIK adalah melalui partisipasi masyarakat, baik individu maupun komunitas, dalam mendorong ruang bebas kekerasan seksual bagi semua. Bentuk lain keterlibatan masyarakat sipil dalam mendorong demokrasi yang inklusif dapat dilihat pula dari tren petisi yang diinisiasi oleh berbagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mengorganisasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Artinya, kerja-kerja advokasi OMS untuk mendorong transformasi sosial dipermudah dan diakselerasi melalui kemajuan TIK.

Lebih jauh, kemajuan TIK dapat membawa agenda untuk masyarakat yang berkeadilan gender dari aspek sosial, politik, dan ekonomi karena memberi ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi kelompok minoritas dalam masyarakat, termasuk perempuan. Interseksi antara TIK dan pemberdayaan perempuan adalah isu yang perlu diperhatikan dalam mendorong demokrasi yang inklusif. TIK sendiri berpotensi menghubungkan, menyatukan, dan mengatur serta memastikan bahwa kekuatan rakyat bisa lebih kuat daripada orang-orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan (Gigler & Bailur, 2016). Banyak anggapan bahwa internet serta-merta menjamin masyarakat yang inklusif. Namun ada pula yang melihat bahwa TIK memiliki potensi emansipatoris hanya jika aspek-aspek ketimpangan di sekitarnya telah diperiksa dan diintervensi.

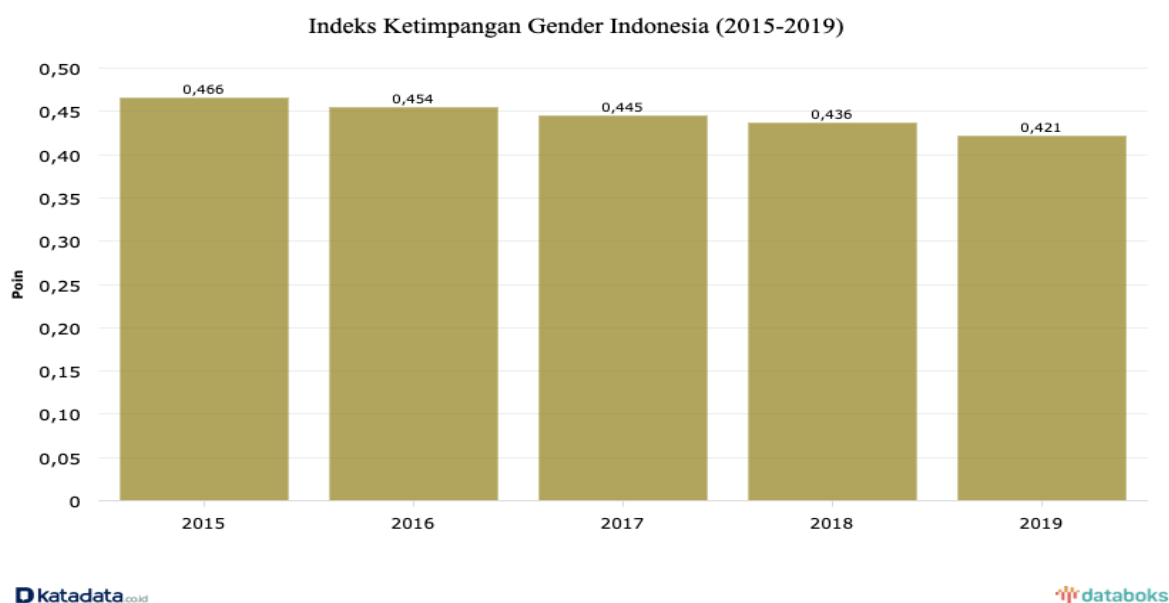
Berdasarkan data yang dirilis Internetworldstats (2019), penetrasi internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau sekitar 53% dari total populasi. Jumlah pengguna internet di Indonesia berada di urutan ketiga di Asia, di bawah Tiongkok dan India yang masing-masing mencapai 829 juta jiwa dan 560 juta jiwa. Dengan jumlah pengguna sebesar itu, mestinya Indonesia dapat bersaing dalam ekonomi digital dunia; dan yang tak kalah penting, membuat akses terhadap internet menjadi mudah dan murah bagi setiap warga negara tanpa kecuali.



Gambar 1. Populasi pengguna internet di 10 negara Asia (2019).

Data dan laporan dari United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN. Dalam Human Development Report 2018 tersebut, terungkap Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index/GII) Indonesia tercatat di angka 0,453 poin, berada di atas rata-rata negara ASEAN yang sebesar 0,356 poin. Indonesia berada di peringkat keempat tertinggi setelah Kamboja (0,473 poin), Laos (0,461 poin), dan Myanmar (0,456 poin). Meskipun masih berada di papan atas ketimpangan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, IKG Indonesia terus membaik sejak 2015 hingga 2019.

Pada 2015, angkanya tercatat sebesar 0,466 poin. Pada tahun 2019, skornya membaik menjadi 0,421. Membaiknya IKG Indonesia terdorong perbaikan lima indikator. *Pertama*, perbaikan proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan dari 22,4% pada 2015 menjadi 14,1% pada 2019. *Kedua*, naiknya persentase keterwakilan di parlemen dari 17,3% tahun 2015 menjadi 20,5% pada 2019. *Ketiga*, partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 48,9% pada 2015 menjadi 51,9% tahun 2019. Indikator selanjutnya mengalami peningkatan tipis, yaitu proporsi penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA pada 2019 sebesar 31,9%, naik 0,2% dari 2015 yang sebesar 31,7%. Terakhir, proporsi perempuan di bawah 20 tahun saat melahirkan hidup pertamanya berfluktuatif. Jika dibanding tahun 2015, persentasenya mengalami kenaikan dari 27% menjadi 27,1% pada 2019.



Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2015-2019.

Perkembangan TIK diharapkan mampu mendorong transformasi bagi kelompok marginal, salah satunya adalah kelompok perempuan. Berbagai aliran pemikiran dalam teori feminisme meyakini bahwa kemajuan TIK adalah salah satu potensi besar untuk memberdayakan perempuan (Gajjala, 1998). Meskipun demikian, akses terhadap TIK tak serta-merta menjamin pemberdayaan, tidak pula menjamin kesetaraan (Gigler & Savita, 2014). Teknologi perlu dipahami hanya sebagai alat potensial untuk mencapai pemberdayaan dan kesetaraan. Maka dari itu, untuk memastikan perempuan dapat memiliki akses TIK yang bermakna dan memberdayakan, faktor-faktor determinan lain seperti sosiokultural, ekonomi, dan politik harus dipahami serta dianalisis terlebih dahulu.

Para sarjana feminisme melihat peluang pemberdayaan perempuan melalui TIK. Artinya, TIK adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengakomodasi agenda feminisme

dalam mendorong masyarakat yang lebih setara. Kepentingan politik perempuan dengan kemajuan teknologi mestinya berjalan secara paralel. Sebab, keduanya mencita-citakan penghapusan hierarki dan kesetaraan. Perkembangan TIK bersamaan dengan inisiatif-inisiatif masyarakat sipil untuk mentransformasikan masyarakat akan sangat berpotensi menghasilkan pemberdayaan dan mendorong kesetaraan gender di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan dalam akses dan penggunaan TIK kemudian menjadi penting. Larry Diamond menciptakan istilah “teknologi pembebasan” yang dimaknai sebagai segala bentuk TIK yang dapat memperluas politik, sosial, ekonomi, dan kebebasan (Diamond, 2010: 79).

Peningkatan partisipasi perempuan dalam TIK telah menjadi agenda politik umum dunia. Baik di tingkat global maupun nasional, sejumlah studi dilakukan demi menunjukkan bahwa ada korelasi erat antara pemberdayaan perempuan dalam TIK dan peningkatan kesejahteraan umum bagi negara. Melihat urgensi TIK dalam kehidupan global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah menetapkan bahwa TIK sebagai pusat tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs). Mengapa? Karena hampir seluruh target SDGs terkait dengan TIK. PBB juga menggarisbawahi bahwa kurangnya akses dan penggunaan yang memadai dari internet akan memperlambat pencapaian target-target SDGs (Kerras *et al.*, 2020).

Dari seluruh target SDGs yang ada akses, akses penguasaan dan keterlibatan dalam TIK secara khusus telah membantu akselerasi pemenuhan target SDGs tujuan ke-4, ke-5, dan ke-9. Pada target ke-4 (pendidikan yang setara dan inklusif), akses terhadap TIK telah menunjukkan bahwa perempuan telah dapat melakukan pendidikan dan pelatihan *online*. Keterlibatan perempuan dalam pendidikan berbasis *online* juga akan sangat baik sebagai modal pemberdayaan perempuan agar dapat beradaptasi pada pasar tenaga kerja nantinya. Akses internet dalam pendidikan telah memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok yang berbeda untuk terlibat dalam proses pendidikan. Artinya, internet telah menjadi arena yang inklusif.

Target ke-5 dalam SDGs, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, juga terkait erat dengan akses dan keterlibatan dalam TIK. Menurut World Wide Web Foundation (2020), APEC (2019), dan PBB (2019), penggunaan internet telah jelas berkontribusi dalam memerangi ketimpangan gender. Sebab, internet telah memungkinkan perempuan mengakses berbagai informasi yang dapat memberdayakan dirinya. Internet membuka peluang perempuan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, pekerjaan, informasi bisnis, politik, kesehatan, dan lain sebagainya. Internet telah menjadi sarana bagi perempuan untuk terlibat secara lebih luas dalam kehidupan publik.

Akses dan penguasaan TIK juga terkait dengan target SDGs ke-9 tentang membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi. Dalam upaya memperkuat industri dan pembangunan

yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur TIK dan pelatihan TIK menjadi penting. APEC (2019) telah menunjukkan bahwa investasi pada TIK telah meningkatkan pertumbuhan produktivitas dan pendapatan di beberapa negara. Maka, PBB melihat bahwa pemberdayaan melalui TIK ini seharusnya ditargetkan pada seluruh elemen masyarakat; dan tiap negara perlu memastikan konektivitas internet menyentuh wilayah yang paling terisolasi sekalipun (Kerras *et al.*, 2020).

Cita-cita pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan memastikan keterlibatan inklusif dari kelompok masyarakat. Cita-cita tersebut tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibiarkan dalam posisi tertinggal dan tak terlibat secara penuh dalam kehidupan publik, baik secara *offline* maupun *online*. Sebab, kedua aspek ini saling terkait dan tidak terpisahkan. Jika ketimpangan dan diskriminasi gender pada praktik kehidupan *offline* tetap dibiarkan, implikasinya keterlibatan perempuan di dalam *offline* juga akan terhambat. Malahan, kemajuan perkembangan TIK yang membawa optimisme akan keadilan gender dan inklusi menunjukkan sejumlah persoalan baru, antara lain ketimpangan gender basis digital dan berbagai praktik kekerasan basis gender *online*.

Dalam konteks tersebut, OMS memainkan peran yang sangat penting, yaitu memastikan agar perempuan dari kelompok rentan dapat mengakses TIK untuk mewujudkan misi perbaikan status sosial, ekonomi, kesetaraan gender, dan peningkatan partisipasi dalam kehidupan publik lainnya. TIK dapat mendorong demokrasi yang inklusif jika kelompok yang terpinggirkan mendapat manfaat dan akses yang dibutuhkan. Perempuan tidak hanya didorong untuk terkoneksi dengan TIK, tetapi juga perlu dipastikan agar mereka dapat memanfaatkannya secara berarti. Akses TIK yang bermakna diartikan sebagai koneksi yang terjangkau dengan kualitas yang memadai.

Menurut World Bank (2014), sejumlah riset yang telah dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa penyebaran internet telah memungkinkan kelompok-kelompok miskin dunia mendapat pemberdayaan. TIK adalah sarana agar masyarakat dapat menyuarakan aspirasi mereka serta terlibat dalam pengambilan keputusan politik ataupun tata kelola di desa, kota, provinsi, bahkan di tingkat negara. Koneksi dengan internet, misalnya, harus dimaknai sebagai hubungan yang memungkinkan pengguna mendapat keuntungan dari keberadaan internet, termasuk untuk berpartisipasi dalam ruang publik, menjalankan hak asasi manusia, mengakses serta membuat konten yang relevan, dan terlibat dengan orang-orang serta mendapat informasi untuk pengembangan diri dan kesejahteraannya (*Alliance for Affordable Internet*, 2021). Oleh karena itu, riset yang mengaitkan antara perempuan, TIK, dan OMS menjadi penting serta relevan sebagai upaya mendorong demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia.

2. Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian

Beragam survei dan riset di tingkat global, regional, dan domestik masih menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan gender dalam akses terhadap TIK. Perempuan masih berada pada posisi yang subordinat dalam mendapatkan manfaat dari kemajuan TIK. Riset World Web Foundation (2020) menyatakan bahwa di satu sisi kemajuan internet telah membuka peluang kemajuan ekonomi, pemberdayaan sosial, serta meretas sejumlah batas demografi yang selama ini menjadi penghalang konektivitas dan akses informasi bagi miliaran orang. Namun di sisi lain, kemajuan internet ternyata masih belum mampu menyentuh kelompok-kelompok yang paling terpinggirkan. Riset World Wide Web juga menunjukkan masih terjadi disparitas gender dalam akses internet, keterampilan digital, dan hak-hak daring terhadap perempuan. Di banyak komunitas, perempuan 50% lebih sedikit kemungkinannya untuk melakukan kegiatan daring dibanding laki-laki. Perempuan 30-50% lebih rendah kemungkinannya untuk menggunakan internet bagi pemberdayaan ekonomi dan politik.

Di Indonesia, data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. IP-TIK Indonesia tahun 2018 sebesar 5,07, meningkat dibanding IP-TIK tahun 2017 sebesar 4,96 (perhitungan dalam skala 0- 10). Akan tetapi, data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas gender dalam TIK. Ketimpangan gender dalam TIK sebetulnya adalah hal yang terprediksi. Sebab, ketimpangan ini adalah perpanjangan atau implikasi dari ketimpangan gender yang lebih luas, yaitu ketimpangan di dunia luring. Kelompok marginal di dalam masyarakat biasanya akan mengalami tantangan yang berlipat untuk dapat sekadar mengakses dan menggunakan internet. Dalam mendorong akses dan keterlibatan terhadap TIK yang inklusif di masyarakat, perlu ada data dan riset terkait tantangan dan upaya-upaya yang telah dilakukan guna memajukan kualitas dan tingkat partisipasi publik perempuan di dunia digital.

Dari segi sosiokultural, perlu dipahami apa yang memotivasi dan menghambat partisipasi perempuan dalam pemberdayaan melalui TIK. Analisis feminisme menjadi penting untuk mendedah aspek ini. Sebab, ketimpangan keterlibatan TIK pada perempuan tidak terlepas dari persoalan gender yang telah mengakar dalam sistem, budaya, dan masyarakat. Maka, matra feminisme dan gender perlu dipakai untuk melihat persoalan ini secara komprehensif. Oleh sebab itu, perbincangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, secara khusus terkait TIK, tidak dapat dianggap sebagai perbincangan yang netral atau bebas gender (Wajcman, 2004).

Persoalan ini tentunya terkait dengan bagaimana hambatan personal, kultural, dan struktural yang menimpa perempuan. Para sarjana feminis melihat ada sejumlah persoalan yang perlu diperiksa terkait relasi perempuan dan teknologi, antara lain stereotip dalam ilmu serta pembagian kerja berdasarkan gender dan profesi. Hambatan-hambatan dari teknologi ini perlu ditemu-kenali agar dapat menghasilkan intervensi sosial yang tepat sasaran. Hal-hal yang perlu diperiksa antara lain: kesenjangan gender dalam akses TIK; norma sosial-budaya

sebagai penghambat keterlibatan perempuan di era revolusi digital; bias dan limitasi yang inheren di dalam masyarakat pada sistem pendidikan membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh manfaat dari transformasi digital; serta representasi perempuan dalam kebijakan terkait TIK (Wajcman, 2004).

Intervensi terhadap ketimpangan gender dalam TIK bertujuan memberdayakan perempuan sebagai salah satu kelompok rentan yang mendapat dampak tidak proporsional pada masa perkembangan teknologi. Intervensi diharapkan mampu menghasilkan perubahan sistemik dan mendobrak sejumlah hambatan kesetaraan gender yang telah berakar lama di masyarakat. Sejumlah intervensi telah dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), apakah terkait kegiatan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam TIK dan/atau mendorong demokrasi yang inklusif. Secara umum, penelitian ini ingin melihat lebih jauh peran OMS dalam mendorong kesetaraan gender terhadap demokrasi Indonesia di era digital.

Kerja-kerja advokasi yang dilakukan OMS dalam memberdayakan perempuan di era TIK ini menjadi kerja yang penting karena dapat memberi dampak pada lahirnya agen-agen perubahan yang lebih masif, terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat, dan pencegahan segala bentuk kekerasan berbasis gender yang ada di masyarakat. Kerja advokasi OMS tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori. *Pertama*, OMS yang mengadvokasi peningkatan partisipasi kelompok perempuan dalam TIK. *Kedua*, organisasi yang mendorong kesetaraan gender di era Demokrasi 4.0 dengan menggunakan TIK sebagai media advokasi. Berbagai pengalaman advokasi yang dilakukan oleh berbagai OMS di Indonesia menunjukkan bahwa TIK memiliki potensi besar untuk mendorong hadirnya kehidupan kewarganegaraan yang inklusif dan setara.

Menurut Kang (2014), OMS memiliki peran penting dalam kehidupan kewarganegaraan karena mereka mengadvokasi representasi kepentingan perempuan. Sebagai agen perubahan sosial, OMS memiliki semangat emansipatoris untuk mentransformasikan masyarakat. Untuk itu, penting agar diketahui siapa, apa, dan bagaimana kerja OMS dalam mendorong demokrasi dan kesetaraan di Indonesia. OMS juga memiliki peran dalam mendorong perubahan sosial. Selain sebagai mitra pembangunan, OMS juga berperan menjadi perantara antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat lainnya serta memberikan ruang dialog antar-pemangku kepentingan tentang berbagai isu. Dalam hal tata kelola, OMS memainkan peran penting dalam mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain peran tersebut, OMS juga menjalankan fungsi peningkatan kapasitas bagi kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dan menjadi mitra pembangunan bagi pemerintah.

Secara khusus, penelitian ini berfokus pada peran-peran OMS di Indonesia yang telah terlibat dalam mendorong transformasi sosial dan mengurangi kesenjangan gender dalam

TIK. OMS di Indonesia memainkan peran penting dalam mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi serta kemasyarakatan dan berbagai proses pembangunan. OMS juga menjadi mitra pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas layanan dan taraf hidup masyarakat. Kemitraan multipihak antara pemerintah, OMS, dan pemangku kepentingan lainnya telah terbentuk di berbagai sektor serta menjadi model baru implementasi kebijakan yang inklusif dan partisipatif.

Penelitian ini adalah laporan awal tentang situasi ketimpangan gender dalam akses TIK di Indonesia. Mengingat kesetaraan gender dalam TIK adalah bagian dari cita-cita global yang tertuang dalam SDGs, penting untuk melihat bagaimana keterkaitan antara tata kelola kebijakan TIK pada tingkat global, regional, nasional, dan domestik dalam rangka memastikan partisipasi penuh perempuan. Hal-hal seperti hambatan kultural, struktural, dan individual penting untuk diidentifikasi agar dapat direspons secara tepat. Representasi hak-hak perempuan dalam pembuatan kebijakan adalah hal yang harus terakomodasi agar perempuan dapat terlibat dan menikmati kemajuan masyarakat teknologi secara maksimal serta berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik-politik.

Dengan berbagai argumentasi tersebut, pertanyaan utama yang hendak dijawab penelitian ini adalah: bagaimana peran OMS dalam mendorong kesetaraan gender dalam demokrasi Indonesia di era digital? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dibutuhkan sejumlah pertanyaan turunan sebagai berikut.

1. Apa saja bukti dan bentuk ketimpangan gender dalam dunia TIK di Indonesia?
2. Bagaimana adaptasi, strategi, dan peran OMS untuk mendorong kesetaraan gender dalam demokrasi di era digital di Indonesia?

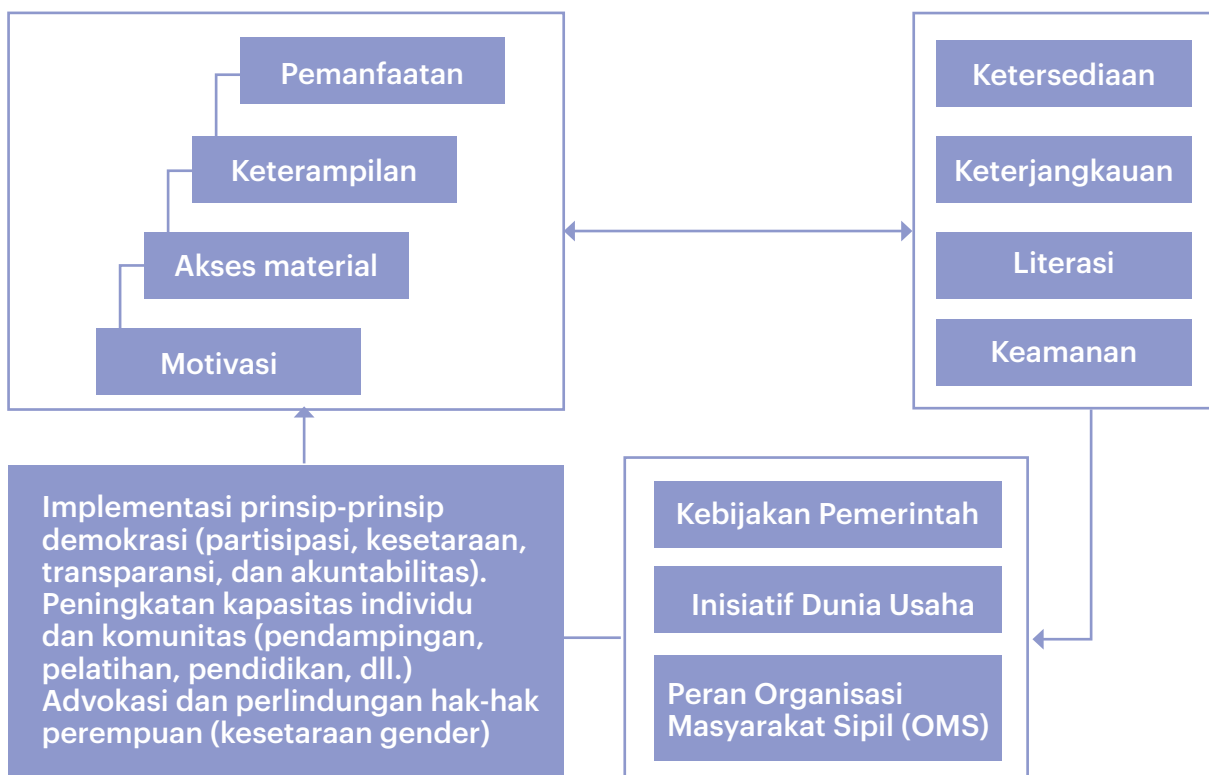
Dengan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menunjukkan “peran OMS dalam mendorong kesetaraan gender dalam demokrasi Indonesia di era digital”.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memetakan hambatan dan tantangan yang dialami kelompok perempuan dalam mengakses TIK dan memanfaatkan internet di Indonesia.
2. Memetakan pengalaman dan inisiatif baik yang telah dilakukan OMS dalam mendorong kesetaraan gender dan demokrasi di era digital di Indonesia.
3. Menyusun rekomendasi untuk penguatan peran OMS sebagai aktor demokrasi dalam mempersempit *digital gender gap* di Indonesia.

3. Kerangka Konseptual

Untuk menggambarkan pendekatan teoretis ataupun konseptual terkait dengan ketimpangan gender dalam dunia digital (*gender digital gap*) dan peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mendorong kesetaraan gender dalam demokrasi, penelitian ini telah mengembangkan kerangka konseptual yang diadopsi dari empat level akses terhadap TIK (Van Dick, 2005) dan sebagian Digital Divide Index (DDI)-ESCAP (2019). Kerangka konseptual ini menjelaskan kaitan erat antara proses dan kendala dalam akses terhadap TIK pada level individu—dalam riset ini adalah perempuan—yang berputar pada empat aspek utama. *Pertama*, aspek motivasi atau *motivational access*. Pengertian dari aspek motivasi ini adalah sejauh mana keinginan perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan TIK. Dorongan ekonomi, tekanan sosial, status sosial, hingga keinginan menambah pengetahuan dan keterampilan adalah sedikit contoh dari *motivational access* ini. Motivasi inilah yang akan memengaruhi aspek *kedua*, yaitu akses langsung terhadap material perangkat TIK atau disebut sebagai *physical access*.



Gambar 3. Kerangka Konseptual Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Era Digital (Van Dick, 2005 & DDI-ESCAP 2019)

Aspek kepemilikan material ini tentu akan membutuhkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan untuk mengoperasikannya atau membuat perangkat TIK menjadi bermanfaat. Inilah yang disebut aspek *ketiga* sebagai *skills access*. Ada proses yang panjang dan dinamis hingga seorang perempuan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan perangkat TIK, termasuk bagaimana mereka mengatasi hambatan-

hambatan teknis, struktural, dan kultural di dalamnya. Ketika perempuan mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut, ia akan bisa memanfaatkan TIK secara optimal dan membawa manfaat bagi dirinya ataupun keluarga dan komunitas tempat ia berada. Inilah yang disebut aspek *keempat* sebagai *usage access* dan dapat disebut sebagai kesuksesan individu dalam memanfaatkan TIK (Soomro et al., 2020).

Keempat aspek tersebut hanya akan berhasil jika ada peluang yang setara bagi setiap perempuan untuk mendapatkan akses terhadap TIK. Masalahnya, ketimpangan digital atau *digital divide* masih terjadi. Ketimpangan digital ini memiliki banyak rupa, mulai dari persoalan rendahnya literasi digital, ketimpangan pendapatan yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang membeli perangkat digital (*affordability*), ketersediaan perangkat TIK di lapangan (*availability*), hingga masalah keamanan digital (*digital security*) yang mengancam individu ataupun masyarakat secara luas. Berbagai masalah ini tentu memerlukan banyak peran dan inisiatif, baik dari pemerintah (*government*), dunia usaha (*business*), maupun komunitas masyarakat sipil (*civil society*). Berbagai inisiatif baik yang mendorong pada kesetaraan gender, peningkatan akses perempuan terhadap TIK, serta perlindungan dari bahaya atau risiko TIK ini sangat diperlukan. Dalam studi ini, fokus penelitian adalah melihat peran OMS dalam mendorong kesetaraan gender dan demokrasi melalui berbagai pendampingan terhadap empat level akses perempuan terhadap TIK di Indonesia. Peran utama OMS ini dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama. *Pertama*, peran OMS dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. *Kedua*, peran OMS dalam meningkatkan kapasitas individu ataupun komunitas. *Ketiga*, peran OMS dalam advokasi dan perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia.

4. Metodologi

Kekuatan utama penelitian ini adalah pada kekayaan dan kedalaman data kualitatif yang bersumber dari wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan tinjauan literatur. Melakukan penelitian kualitatif di era pandemi Covid-19 memang menantang sekaligus memiliki beberapa keterbatasan. Meski demikian, dengan perkembangan teknologi yang ada, wawancara tatap muka sebagai teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif masih dapat dilakukan secara virtual, seperti menggunakan aplikasi Zoom. Demikian pula dengan diskusi kelompok terfokus yang seharusnya dilakukan secara tatap muka dan interaktif. Namun, di era pandemi saat ini, tatap muka dapat digantikan dengan penggunaan platform Zoom dan fitur *breakout room* yang ada di dalamnya. Meskipun kualitas tatap muka menjadi berkurang, jangkauan penelitian dan kemampuan riset ini dalam mengumpulkan berbagai kasus dari sejumlah tempat di Indonesia relatif meningkat, efisien, dan semakin mudah. Desain riset kualitatif yang disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 ini telah menuntun peneliti untuk menghasilkan beragam protokol pengumpulan data yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk riset-riset terkait ketimpangan gender serta TIK di masa mendatang.

4.1. Wawancara Mendalam

Untuk menggali dan mengumpulkan data terkait pengalaman Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam memanfaatkan TIK, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada para praktisi dan pimpinan OMS yang ada di Indonesia. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait hambatan, tantangan, dan peluang yang dihadapi OMS dalam menjalankan perannya mendorong kesetaraan gender di era digital saat ini. Sebagai penyesuaian terhadap situasi pandemi yang masih berlangsung, semua proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom untuk menghindari potensi penyebaran Covid-19.

Wawancara mendalam dilakukan oleh dua orang pewawancara yang berpengalaman dan memiliki keterampilan khusus dalam penggalan data secara virtual. Pemilihan platform Zoom sebagai media wawancara juga memiliki kelebihan di mana pewawancara dapat merekam setiap percakapan secara audio visual sekaligus mampu menangkap ekspresi langsung dari narasumber atau informan. Setiap rekaman dari wawancara selanjutnya ditranskrip secara verbatim untuk kemudian disimpan, diorganisasikan, dan diolah lebih lanjut ke dalam program NVivo 12 sebagai alat bantu analisis.

Jumlah total informan dalam wawancara mendalam ini sebanyak 26 informan kunci yang dipilih secara *purposive*. Selain kepada pimpinan OMS, wawancara mendalam juga dilakukan kepada perempuan praktisi teknologi, aktivis perempuan, dan politisi perempuan untuk melihat lebih jauh bagaimana ketimpangan gender di dunia kerja serta dunia politik (lihat tabel 1.3). Pemilihan cakupan wawancara kepada ketiga kelompok perempuan ini dilakukan atas pertimbangan bahwa ketiganya secara rutin bersinggungan langsung dengan rumusan dan tujuan penelitian. Dengan melihat ketiga dimensi TIK dalam dunia OMS, dunia kerja, dan demokrasi/dunia politik tersebut; penelitian ini mampu menjawab serta menguraikan beragam hambatan, dampak, pemanfaatan, hingga rekomendasi penting dan menarik terkait dengan TIK serta ketimpangan gender digital di Indonesia saat ini.

4.2. Diskusi Kelompok Terfokus

Selain berdasarkan wawancara, penelitian ini diperdalam dengan Diskusi Kelompok Terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu berbagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bergerak untuk memberdayakan keterlibatan perempuan dalam TIK dan organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi kesetaraan gender melalui TIK. Narasumber dalam FGD adalah 11 perwakilan OMS yang melakukan pendampingan pada berbagai kelompok identitas. FGD dilakukan pada tanggal 12 April 2021 pada pukul 13.00-16.00 WIB. Pemilihan OMS dilakukan secara *purposive* yang diharapkan merepresentasikan pengalaman kelompok perempuan dari berbagai identitas pekerjaan, situasi demografis serta ekonomi, dan lain sebagainya. Tentunya kelompok OMS ini tidak merepresentasikan seluruh kelompok rentan. Namun tujuan utama dari pemilihan keragaman identitas ini adalah menunjukkan beragam tantangan yang mungkin belum mendapat perhatian secara mendalam.

Tabel 1. Daftar Peserta Diskusi Kelompok Terfokus dari Kalangan OMS

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Kelompok yang Diadvokasi
Rahima	Perempuan Ulama
GIZ-Gender Vocal Point Indonesia & Timor Leste	Perempuan dalam Digitalisasi (Khususnya Sektor Pariwisata)
Migrant Care	Perempuan Pekerja Migran
Gita Pertiwi	Perempuan Petani, Perempuan Miskin Kota, Perempuan Perajin, Perempuan Kepala Keluarga
Kiara	Nelayan
HWDI	Kelompok Difabel
TIKI Papua	Perempuan Korban Pelanggaran HAM Papua
Perempuan Aman	Perempuan Adat
Lappan Maluku	Perempuan dan Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Maluku
PPNI	Perempuan Nelayan
KPI	Perempuan Miskin dan Marginal

Pemilihan OMS yang terlibat dengan mempertimbangkan keragaman identitas sosial perempuan dengan kerentanan berbeda, yakni kerentanan karena identitas profesi, kelas ekonomi, dan kondisi geografis (wilayah timur Indonesia). Mengingat situasi pandemi, FGD secara langsung sulit diselenggarakan, sehingga proses diskusi dilakukan secara *online* melalui aplikasi Zoom. Peserta FGD dari OMS sebanyak 15 orang, mewakili 11 OMS yang diundang. Kemudian, proses FGD dilakukan dalam tiga ruang berbeda. Setiap ruangan berisi lima perwakilan OMS dan dimoderatori oleh satu orang dari INFID. Pertanyaan FGD berfokus untuk menjawab tantangan yang dialami perempuan di akar rumput (hambatan pada akses mental, material, keterampilan TIK, dan akses internet yang bermakna); mengetahui kerja-kerja pemberdayaan yang dilakukan oleh OMS dengan memanfaatkan perkembangan TIK; dan capaian dari kerja OMS terhadap pemberdayaan kelompok perempuan dampingan).

4.3 Tinjauan Sistematis

Tinjauan sistematis telah dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Adapun eksplorasi penelitian terdahulu dilakukan melalui Google Scholar Advanced Search. Pencarian literatur dibatasi pada jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam periode lima tahun terakhir (2015-2020) yang terbit dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pencarian jurnal dilakukan berdasarkan kesesuaian tema yang diteliti, yakni jurnal yang membahas “*peran OMS mendorong kesetaraan gender di Indonesia di era digital*”. Berdasarkan tema tersebut, didapat dua tema. Tema pertama, OMS mendorong kesetaraan gender dengan melibatkan perempuan dalam TIK, khususnya pada aspek penggunaan internet. Tema kedua terkait peran OMS mendorong kesetaraan gender melalui advokasi berbasis digital. Berdasarkan kesesuaian tema, pembatasan tahun, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian; terpilih delapan jurnal sebagai sumber penelitian terdahulu yang terkait erat dengan riset ini. Studi literatur ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada literatur berupa artikel jurnal, sehingga literatur lain dalam bentuk buku, bab buku, laporan, atau *policy brief* tidak masuk dalam analisis dokumen. Ringkasan teknik pengumpulan data dapat dilihat pada tabel 2.

Table 2. Ringkasan Teknik dan Sumber Pengumpulan Data

No.	Teknik Pengumpulan Data	Data dan Informasi yang Diperoleh	Sumber Data (Informan, Partisipan, dan Dokumen)
1	Wawancara Mendalam	Pengalaman personal perempuan yang bekerja di dunia digital, politisi/aktivis perempuan, dan pimpinan CSOs kaitannya dengan kesetaraan gender dalam pemanfaatan TIK beserta hambatan-hambatan yang menyertainya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan AMAN, Yayasan Kesehatan Perempuan, Yayasan Pulih, Lentera Anak, KOMPAK, KPI, RUMPUN, KAPAL Perempuan, Flower Aceh, Konde.co, WALHI, AJI. 2. Perempuan praktisi teknologi 3. Perempuan aktivis/politisi
2	Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)	<p>Advokasi digital yang telah dilakukan OMS untuk melibatkan perempuan dalam TIK sebagai upaya mendorong demokrasi yang inklusif.</p> <p>Kerja-kerja yang telah dilakukan, tren aktivisme digital, hambatan, dan capaian</p>	Rahima, GIZ, Migrant Care, Gita Pertiwi, Kiara, HWDI, PPNI, KPI, TIKI Papua, Perempuan AMAN, Lappan Maluku
3	Dokumen Analisis	Gambaran umum tentang ketimpangan digital di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Mobile Gender GAP Report 2020 (GSMA 2020), 2. Women's Right Online: Report Card Indonesia (Web Foundation 2020) 3. Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019 (PBS 2020), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2019
4	Tinjauan sistematis (penelitian terdahulu)	Informasi tentang upaya pemberdayaan digital terhadap perempuan dan aktivisme digital yang dilakukan oleh sejumlah OMS untuk mendorong demokrasi berkesetaraan gender di Indonesia	(8) Jurnal ilmiah berbahasa Inggris dan Indonesia dari Google Scholar Advanced Search periode 2016-(Maret 2021)

4.4 Analisis Data

Semua data yang terkumpul—baik dalam bentuk audio, audio visual, dokumen, transkrip wawancara, transkrip diskusi kelompok terfokus, maupun catatan pertemuan lainnya—disimpan serta diunggah ke dalam program komputer (*software*) NVivo 12. Program ini merupakan alat bantu bagi peneliti untuk melakukan analisis data, baik dalam melakukan *coding*, pencarian kata kunci, penentuan tematik, maupun pengembangan matriks temuan hasil penelitian. Pengintegrasian data lapangan ke dalam NVivo 12 ini sangat membantu peneliti dalam melakukan *cross-check* argumen dan fakta lapangan dari setiap informan kunci. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan *mind-mapping* dari setiap temuan tersebut hingga terwujud satu koneksi yang logis dan keheren. *Coding* dalam analisis data kualitatif ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah menggunakan konsep-konsep umum terkait ketimpangan gender dan TIK sebagai *nodes*. Setelah terkumpul cukup *nodes*, kemudian peneliti melakukan *coding* tahap kedua, yaitu dengan menggunakan konsep-konsep yang lebih spesifik terkait ketimpangan gender, TIK, serta peran OMS sebagai *nodes* dan *cases* sekaligus. Peneliti juga melakukan *autocoding* dan klasifikasi kasus (*cases classification*) dari setiap transkrip wawancara informan kunci untuk mempercepat proses analisis data. Hasil *coding*, *mind-mapping*, dan klasifikasi kasus kemudian dinarasikan ke dalam sebuah matriks yang menjadi bahan utama dalam proses penulisan hasil penelitian (narasi tematik).

4.5 Keterbatasan Penelitian

Secara metodologis, penelitian kualitatif idealnya mensyaratkan peneliti untuk dapat melakukan interaksi yang mendalam terhadap kasus yang sedang dihadapi, termasuk dalam menggunakan beragam teknik pengambilan data seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Penelitian ini tidak dapat melakukan observasi langsung kepada setiap OMS yang menjadi subjek studi karena situasi pandemi Covid-19. Konsekuensinya, penelitian ini kurang memiliki kedalaman dalam deskripsi *setting* alamiah setiap subjek studi. Selain kekurangan dalam observasi, dalam melakukan wawancara dan diskusi kelompok, semua dilakukan secara virtual atau *online*. Meskipun peneliti tetap mampu mendapatkan respons dan jawaban dari informan kunci, interaksi interpersonal tatap muka yang biasanya menghadirkan lebih banyak data dan informasi menjadi tidak tergal. Meski demikian, keterbatasan penelitian ini tidak disebabkan oleh kehendak peneliti, melainkan karena situasi *force major* yang dihadapi setiap peneliti yang melakukan penelitian lapangan di era pandemi Covid-19 ini. Selain sebagai keterbatasan studi, pengalaman pengumpulan data di era pandemi ini juga memberikan banyak pelajaran penting, terutama dalam upaya melahirkan strategi pengembangan instrumen kualitatif yang lebih adaptif dan aplikatif untuk penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Ketimpangan Gender dan Digital di Indonesia

Kemajuan TIK telah demikian dirayakan dan disambut positif oleh masyarakat global. Ada optimisme besar bahwa teknologi akan berdampak pada pemberdayaan. Larry Diamond (2010), misalnya, menawarkan gagasan tentang teknologi pembebasan. Bagi Diamond, setiap aspek TIK dapat meningkatkan kebebasan politik, ekonomi, dan sosial. Internet, sebagai bagian dari TIK, menjanjikan perbaikan pada peluang ekonomi dan mendorong perubahan sosial. Batas-batas geografi, ras, budaya, gender, usia, dan lain sebagainya telah diretas dengan kehadiran internet. Kemajuan TIK diharapkan dapat memberdayakan kelompok-kelompok marginal untuk mendorong inklusi sosial dalam masyarakat. Selain itu, kemudahan akses internet juga diyakini akan meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi yang lebih baik (Min, 2010).

Bagi sebagian orang, pemanfaatan dan penggunaan TIK telah mengubah bentuk dan pola-pola kehidupan. Bagi kelompok yang dapat mengakses dan memanfaatkan TIK dengan baik, berbagai aktivitas seperti aktivitas bisnis dan perbankan, pendidikan, pekerjaan, keterlibatan civic, serta menjaga relasi sosial diakselerasi melalui TIK. Namun, di sisi lain, terdapat juga gagasan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi alih-alih mendorong kesetaraan sosial, malahan memperlebar berbagai kesenjangan yang telah ada (Min, 2010).



Berdasarkan laporan yang berjudul *The Mobile Gender Gap Report (2020)* yang diterbitkan oleh GSMA, konektivitas internet menjadi semakin dibutuhkan. GSMA menyatakan telah terjadi pertumbuhan akses internet yang sangat signifikan pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sekitar 2,9 miliar orang telah mengakses internet dari ponsel mereka. Meski demikian, di balik pertumbuhan yang signifikan ini, GSMA menggarisbawahi bahwa tidak semua kelompok mendapat manfaat yang sama dari perkembangan TIK ini. Pada negara berpenghasilan rendah dan menengah, perempuan yang memiliki ponsel 8% lebih rendah daripada laki-laki, dan penggunaan internet perempuan lebih rendah 20% daripada laki-laki.

Data yang dilaporkan GSMA dan didukung oleh laporan World Wide Web Foundation (2020) menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok rentan terhadap ketimpangan gender digital. Perempuan yang dimaksud tidak dalam kategori tunggal. Berbagai identitas sosial yang berbeda memberikan implikasi yang tidak sama pada nikmat atas kemajuan TIK. Perempuan di daerah perkotaan dan pedesaan, perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan ekonomi rendah, perempuan dengan pendidikan rendah, dan perempuan di daerah terisolasi memiliki hambatan-hambatan yang tidak dapat diseragamkan satu sama lain hanya karena mereka perempuan. Pengalaman tersebut perlu dikenali agar dapat dikembangkan sebuah intervensi yang berbasis pada kebutuhan riil mereka. Kegagalan membaca pengalaman konkret para perempuan inilah yang menghasilkan sejumlah program dan kebijakan yang tidak sensitif serta kurang mengakomodasi kebutuhan mereka.

Senada dengan laporan GSMA, penetrasi internet per tahun 2020 mengalami peningkatan pesat. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terlihat bahwa pada kuartal II tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sebanyak 196.714.070 dengan jumlah populasi 266.911.900. Berdasarkan perbandingan tersebut, artinya penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 73,7%. Dalam laporan survei APJII diketahui terjadi peningkatan pengguna internet sebanyak 8,9% atau sekitar 25,5 juta pengguna dibanding tahun sebelumnya (APJII 2020). Kenaikan secara kuantitatif dipandang sebagai sebuah capaian yang baik. Ada optimisme besar bahwa pemanfaatan TIK akan membantu negara untuk mengakselerasi hampir semua target SDGs, khususnya pada target 4b tentang kesetaraan pendidikan, 5b tentang kesetaraan gender, 9c tentang industri, inovasi, dan infrastruktur (ITU, 2017). Kemajuan SDGs dipandang akan berkontribusi besar pada pemberdayaan ekonomi dan mendorong perubahan masyarakat ke arah inklusif.

Sebagai basis awal yang menyoal ketimpangan gender digital, keberadaan data tersegregasi gender sangat penting. Berdasarkan data Susenas (2019) yang menghimpun data pengguna internet sejak tahun 2016 hingga 2019, tampak bahwa secara kuantitatif ada ketimpangan gender digital.

Tabel 3. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet di Wilayah Perkotaan (2016-2019)

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2016	53,37%	46,63%
2017	52,87%	47,03%
2018	52,55%	47,45%
2019	53,03%	46,97%

Sumber: Diolah dari data BPS 2019 Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019

Data BPS menunjukkan bahwa di tahun 2016, jumlah perempuan pengguna internet di perkotaan 6,74% lebih rendah daripada laki-laki. Di tahun 2017, persentase perempuan pengguna internet 5,84% lebih sedikit daripada laki-laki. Tahun 2018, angka perempuan pengguna internet 5,1% lebih kecil daripada laki-laki. Sedangkan pada 2019, jumlah perempuan pengguna internet 6,06% di wilayah ini lebih rendah daripada laki-laki. Tingkat ketimpangan gender digital di daerah pedesaan di tahun yang sama bahkan menunjukkan disparitas yang lebih besar.

Tabel 4. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet di Wilayah Pedesaan (2016-2019)

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2016	54,97%	45,03%
2017	54,87%	45,13%
2018	54,62%	45,38%
2019	53,36%	46,64%

Sumber: Diolah dari data BPS 2019 Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019

Dari data BPS tahun 2016, terlihat persentase perempuan pengguna internet di pedesaan 9,94% lebih rendah dari laki-laki. Pada 2017, jumlah perempuan pengguna internet 9,74% lebih sedikit dibanding laki-laki. Tahun 2018, persentase perempuan pengguna internet 9,27% di bawah laki-laki. Untuk tahun 2019, jumlah perempuan pengguna internet di pedesaan 6,72% lebih rendah dari laki-laki. Adapun data ketimpangan penggunaan internet antara perempuan dan laki-laki di perkotaan serta pedesaan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Perbandingan Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan (2016-2019)

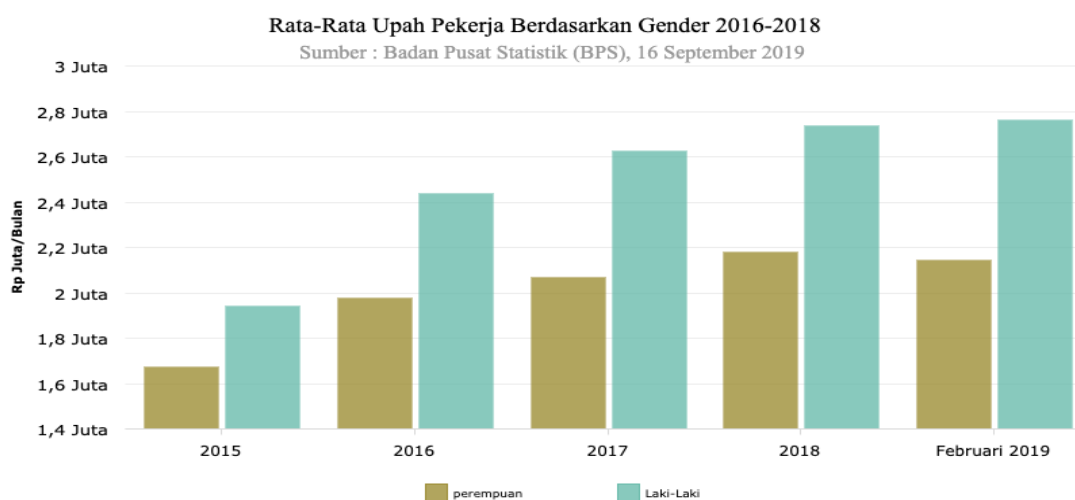
Tahun	Laki-laki	Perempuan
2016	53,80%	46,20%
2017	53,52%	46,48%
2018	53,17%	46,83%
2019	53,13%	46,87%

Sumber: Diolah dari data BPS 2019 Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019

Selisih persentase pengguna internet antara laki-laki dan perempuan sebesar 7,6% (2016), 7,04% (2017), 6,34% (2018), dan 6,26% (2019). Dari data tersebut, ketimpangan pengguna internet berdasarkan gender terindikasi menurun. Ketimpangan dalam akses digital, menurut data Susenas, tidak hanya pada akses terhadap internet, tetapi ditunjukkan juga dalam ketimpangan penggunaan komputer. Pada tahun 2019, jumlah laki-laki pengguna komputer sebanyak 15,17%, sedangkan perempuan 13,77% (Susenas, 2019). Data Statistik Telekomunikasi Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan digital berdasarkan akses material.

Secara umum, ketimpangan pada akses fisik atau material paling berkaitan erat dengan persoalan ekonomi seseorang. Dengan kata lain, hambatan pada akses material berhubungan erat dengan pendapatan seseorang. Akses material dimaknai bukan hanya pada kondisi kepemilikan dan penguasaan terhadap perangkat teknologi, tetapi lebih jauh terkait dengan kemampuan seseorang untuk mempertahankan keberlangsungan kepemilikan dan akses terhadap kedua aspek tersebut. Bahkan, akses material ini juga bermakna untuk meningkatkan hal-hal yang telah dimiliki, seperti misalnya mengganti perangkat ke model yang lebih baru/canggih atau mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan internet.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Perekonomian 2019 mencatat, kesenjangan antara upah laki-laki dan perempuan semakin lebar. Upah untuk pekerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Selama periode 2015-Februari 2019, selisihnya mencapai Rp 492,2 ribu. Adapun secara terperinci, selisih pada 2015 sebesar Rp 269 ribu, Rp 458,4 ribu (2016), Rp 554 ribu (2017), dan Rp 560,6 ribu (2018). Sementara hingga Februari 2019, kesenjangan semakin lebar hingga Rp 618,8 ribu. BPS juga menyebutkan kesenjangan upah ini merupakan isu yang lama karena adanya anggapan perempuan kurang berkontribusi dalam pekerjaan. Selain itu, perempuan juga cenderung ditempatkan pada posisi yang bernilai rendah. Masalah ini menjadi tantangan bagi perempuan dalam dunia ketenagakerjaan untuk mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan posisi kepemimpinan yang setara. Konsekuensi dari ketimpangan upah antargender ini adalah perempuan memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan akses material TIK.



Gambar 4. Perbandingan rata-rata upah pekerja perempuan dan laki-laki di Indonesia (2016-2018).

Hambatan pada akses material merupakan implikasi atau kelanjutan dari hambatan pada akses mental atau motivasi personal (Van Dijk, 2005). Sebelum tiba pada persoalan ketimpangan pada akses material, ketimpangan pada akses mental terkait bagaimana dampak nilai, norma, dan budaya dalam memotivasi atau mencegah keterlibatan penuh perempuan dalam kemajuan internet seharusnya dikenali. Untuk mengetahui hambatan-hambatan lain, penelitian ini telah mengumpulkan beragam penelitian terdahulu yang membahas isu terkait. Sejumlah hasil penelitian yang diperiksa merupakan riset dengan metode kualitatif mengenai sejumlah OMS yang telah melakukan pemberdayaan terhadap kelompok perempuan. Jenis pemberdayaan dilakukan melalui dua hal, yaitu memberdayakan agar perempuan terlibat dalam penggunaan internet dan melalui advokasi digital untuk mendorong isu-isu kesetaraan gender. Gambaran awal menunjukkan persoalan ketimpangan gender digital bukan hanya masalah kesenjangan ekonomi atau feminisasi kemiskinan, tetapi lebih jauh dari itu. Faktor sosial budaya, relasi dalam keluarga, dan komunitas juga memengaruhi bagaimana perempuan sejak awal telah memiliki titik pijak yang berbeda terhadap internet.

2. Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Demokrasi di Era Digital

Mengingat penggunaan TIK telah menyentuh dan mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, ketertinggalan perempuan dalam partisipasi TIK akan berdampak juga pada ketimpangan gender yang lebih luas seperti kesenjangan dalam pasar tenaga kerja, pendidikan, dan politik. Berdasarkan laporan The Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF), diketahui bahwa Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 153 negara dengan skor 0,70. Angka tersebut tidak mengalami perubahan sejak 2018. Artinya, negara perlu melakukan sejumlah upaya serius agar indeks ketimpangan gender Indonesia dapat diperbaiki. Selama 12 tahun terakhir, ketimpangan gender di Indonesia sebenarnya telah membaik, terutama karena ada perbaikan dari sektor pendidikan dan Kesehatan. Meski demikian, partisipasi perempuan masih rendah dalam bidang ekonomi dan politik.

Merespons ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah melakukan sejumlah inisiatif untuk mendorong keadilan sosial. Pemberdayaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh OMS memperjuangkan berbagai aspek dan aspirasi terkait pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejumlah OMS telah bekerja untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja, partisipasi politik, keadilan dalam lingkungan kerja, dan kebijakan publik.

Kerja-kerja yang dilakukan oleh OMS bertujuan memastikan bahwa setiap orang mendapat manfaat dari pembangunan. OMS memainkan peran penting dalam menawarkan sejumlah kesempatan bagi kelompok-kelompok marginal di dalam masyarakat. Keberadaan kelompok marginal sering kali luput dari perhatian kebijakan. Pada tataran implementasi, kelompok marginal sering tereksklusi dari penikmatan program-program pembangunan. OMS juga

memainkan peran pengawasan, yakni memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal (*no one left behind*).

Dalam kerangka kelembagaan, OMS berfungsi sebagai katalisator untuk pembangunan dan mendorong berbagai perbaikan. OMS sendiri merupakan organisasi non-pemerintah dan berorientasi bukan pada profit, melainkan pada perjuangan kepentingan publik. Secara umum, OMS bekerja untuk mendorong keadilan sosial, pembangunan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). OMS memiliki peran vital dalam pembangunan manusia dan dalam aspek pembangunan secara umum. Kerja OMS menyentuh seluruh isu pembangunan, termasuk di dalamnya mendorong pemerintahan yang demokratis. Peran OMS menjadi penting dalam upaya pengorganisasian kapital sosial, upaya pengentasan kemiskinan, dan memeriksa peran budaya dalam pembangunan. Secara umum, peran OMS termasuk dalam kerja sosial yang menawarkan sebuah kerangka praktis sebagai solusi alternatif dalam persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan politik.

OMS memiliki peran penting dalam mendorong demokrasi yang inklusif karena mereka mampu mengenali dan mengidentifikasi kondisi ketimpangan sosial di lapangan. OMS juga dapat berperan dalam melakukan intermediasi antarkelompok masyarakat dengan pemerintah. Fungsi ini dilakukan oleh OMS untuk memastikan bahwa demokrasi dijalankan secara inklusif. Sebab, demokrasi hanya dapat dihidupi dengan memastikan partisipasi anggotanya dilakukan secara sadar, bebas, dan berdaya. Melihat fungsi dan peran tersebut, OMS memiliki peran vital dalam menentukan keberhasilan pembangunan melalui pemantauan peradilan yang adil, pemerintahan yang responsif, kebebasan pers, mendorong dan memastikan tradisi transparansi, serta akuntabilitas dan aturan yang adil (UNDP, 1993). OMS memperkuat demokrasi dengan cara memastikan agar negara responsif terhadap kebutuhan dari rakyatnya. OMS mendorong demokrasi dengan memastikan bahwa praktik politik dan ekonomi telah melibatkan dan menguatkan kelompok di akar rumput atau partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendorong transformasi sosial agar kelompok marginal dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

OMS juga menjalankan fungsi mobilisasi atau pengorganisasian isu. OMS akan mendorong persoalan di lapangan menjadi terlihat dan dijadikan perbincangan publik. Mereka membuat persoalan-persoalan di tingkat komunitas menjadi prioritas pembahasan di ruang publik. OMS juga melakukan sejumlah inisiatif baik yang memberdayakan masyarakat terpinggirkan, seperti pelatihan dan pendidikan publik, mendorong pembuatan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan kelompok minoritas, melakukan sejumlah penelitian terkait persoalan yang dialami kelompok minoritas, dan menjadikannya landasan untuk bernegosiasi dengan pembuat kebijakan serta pemangku kepentingan lainnya.

OMS mempromosikan pola dan pendekatan pembangunan yang bersifat dari bawah ke atas (*bottom up*). Mereka mendorong resiliensi komunitas akar rumput untuk memecahkan

persoalan aktual yang dihadapi oleh masyarakat. Kontribusi OMS menjadi sangat penting karena untuk merespons persoalan sosial yang terjadi di sebuah komunitas/negara (MacPherson dan Wong, 1998). OMS adalah aktor kritis yang perlu terlibat dalam advokasi hak atas akses yang setara dalam TIK. OMS perlu memastikan bahwa TIK sungguh-sungguh dipakai dan dinikmati oleh seluruh kelompok, khususnya bagi kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, tercatat beberapa OMS yang melakukan literasi digital terhadap perempuan, seperti OMS IWITA, FemaleDev, dan SAFEnet. Sejumlah praktik baik yang bermanfaat bagi pemberdayaan perempuan juga ditemukan dari sejumlah kerja OMS yang antara lain sebagai berikut.

1. Literasi digital terhadap perempuan
 - a. IWITA
 - b. FemaleDev
 - c. SAFEnet
2. Berjejaring dan berkampanye melalui TIK
 - a. SAFEnet
 - b. Srikandi Sungai Indonesia (SSI)
 - c. Aliansi Laki-laki Baru (ALB)
 - d. Samsara
 - e. Rifka Anissa
 - f. Yasanti
 - g. Mitra Wacana
 - h. SPEK HAM

Riset terkait kerja dan kontribusi OMS dalam melakukan literasi digital terhadap perempuan sebenarnya masih terhitung minim. Dari beberapa artikel yang terkumpul, sebagian besar menjelaskan bagaimana OMS memanfaatkan kemajuan TIK untuk keperluan advokasi kesetaraan gender secara lebih luas. Kemajuan TIK seperti komputer berjejaringan, telepon seluler, internet, *e-mail*, dan sejumlah platform sosial media lainnya telah membuat OMS menyadari potensi dan mengambil manfaat dari kemajuan tersebut. Mayoritas riset menjelaskan bahwa OMS merasakan manfaat dari internet terhadap kerja advokasi mereka, seperti kemudahan untuk terkoneksi tanpa batas, biaya yang lebih murah, dan efisiensi waktu.

Organisasi Samsara, misalnya, merasa dengan adanya internet, cakupan layanan mereka untuk konseling terkait kehamilan tidak diinginkan dapat menjangkau perempuan dari berbagai daerah di Indonesia (Yulfianto & Jumainah, 2016). Rifka Anissa juga merasakan manfaat yang sama. OMS ini dapat menerima konseling terkait kekerasan seksual melalui *e-mail* saat ini. Samsara juga dapat melakukan kampanye global terkait #AbortionIsNotACrime. Kemajuan internet dengan demikian telah memungkinkan percepatan advokasi. Berbagai perjuangan di tingkat global dapat diketahui dan dilakukan juga di negara-negara lain untuk mencapai kepentingan yang sama. Artinya, internet telah membantu kerja advokasi OMS di bidang

mobilisasi gerakan. Kampanye yang serupa juga dilakukan oleh SAFEnet lewat #AwaskBGO. Penyebaran informasi dan pendidikan publik menjadi mudah diseminasi di kalangan masyarakat dengan adanya TIK.

Melalui berbagai platform media sosial, ALB, Rifka Anissa, SPEK-HAM, SSI, Samsara, dan lainnya mempromosikan kegiatan mereka dan menunjukkan kerja-kerja advokasi yang telah mereka lakukan. Melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, misalnya, ALB secara konsisten menunjukkan identitas komunitas mereka sebagai laki-laki yang mendukung kesetaraan gender. Melalui berbagai platform, mereka menunjukkan kegiatan yang mereka lakukan dengan tujuan menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerja-kerja ini dan ajakan agar lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat dalam gerakan tersebut. Meski demikian, belum semua OMS memahami betul dan dapat memanfaatkan secara baik kemajuan TIK tersebut. Beberapa di antaranya memang menyadari adanya hambatan pada SDM yang kurang memiliki kapasitas menggunakan TIK. Namun ada pula yang telah menyadari potensi TIK, tetapi belum dapat sepenuhnya menggunakannya untuk advokasi karena kelompok target yang diberdayakan belum memahami penggunaan TIK. Bagi OMS, secara umum, TIK memberikan manfaat untuk memperkenalkan profil OMS kepada masyarakat, mengikuti perkembangan advokasi di tingkat internasional, saling berjejaring dan saling mempromosikan kampanye atau kegiatan yang terkait dengan visi-misi organisasi masing-masing, serta memudahkan masyarakat untuk menjangkau mereka.

3. Ketimpangan Gender dan Digital dalam Perspektif Feminisme

Berdasarkan riset-riset terdahulu diketahui bahwa kelompok perempuan menghadapi sejumlah hambatan untuk kesetaraan gender di era digital. Ketimpangan dalam TIK dapat dilihat sebagai perpanjangan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sebenarnya telah terjadi sebelum era digital. Sudah sejak sangat lama perempuan dieksklusikan dari ruang publik. Logika domestikasi terhadap perempuan dan penyingkiran dari ruang publik telah direplikasi dalam sejumlah praktik kehidupan bersama.

Para pemikir feminis telah mendeteksi bahwa teknologi adalah hasil dari kebudayaan yang maskulin. Harding (1986) menyatakan bahwa logika biner pemikiran Barat mendikotomi antara budaya dan alam; nalar dan perasaan; publik dan privat; maskulin dan feminin, di mana logika tersebut selalu memberikan tempat istimewa kepada laki-laki. Hambatan pada aspek mental yang ditemui dalam sejumlah riset tersebut menunjukkan persoalan ini. Bagaimana di dalam diri perempuan sendiri telah terinternalisasi posisi yang subordinat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Stereotip gender telah menjadi dasar eksklusi perempuan dalam penikmatan penuh kemajuan TIK. Kultur yang patriarki berpotensi memengaruhi keengganan perempuan untuk terlibat secara serius dalam TIK. Padahal, saat ini, masyarakat berada pada era informasi ketika internet sudah menjadi tulang punggung dari sistem TIK global.

Aspek keterampilan juga terikat erat dengan norma gender, bagaimana perempuan mengakses pendidikan dan pelatihan dipengaruhi pula oleh norma-norma gender. Ketimpangan pada pendidikan dasar seperti baca, tulis, dan bahasa memengaruhi bagaimana seseorang mengakses literasi digital. Sementara itu, tantangan yang terakhir yaitu penggunaan internet secara bermakna berkaitan dengan dua faktor sebelumnya. Bagaimana motivasi perempuan menggunakan internet untuk kepentingan pemberdayaannya, seperti misalnya keterlibatan dalam ekonomi digital dan keterlibatan politik, perlu disokong oleh dua aspek sebelumnya.

Para pemikir feminis seperti Wajcman (2009) menyadari bahwa situasi masyarakat digital ini tidaklah netral. Gagasan ini merupakan perpanjangan gagasan Harding (1986) yang melihat bahwa teknologi sendiri sejak awal telah bias gender. Secara sistematis, budaya patriarki telah mengidentifikasi teknologi dengan maskulinitas dan dengan gender laki-laki. Hal ini menyebabkan rasa inferior perempuan terhadap teknologi. Wajcman menyatakan bahwa salah satu tantangan perempuan dalam era digital ini adalah ketakutan terhadap teknologi (*technophobia*).

Artinya, ketika melihat situasi masyarakat digital, penting untuk menyadari bahwa implikasi kemajuannya tidak dirasa sama bagi perempuan, laki-laki, anak laki-laki, dan anak perempuan. Kategori gender memengaruhi bagaimana seseorang mengakses dan/atau mengalami hambatan. Penting untuk melakukan refleksi kritis terkait bagaimana keberadaan TIK dipengaruhi oleh norma gender. Penting juga untuk memeriksa sejauh apa keberadaan TIK mengubah situasi ketimpangan yang ada, baik pada aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Selain itu, perlu juga diketahui potensi pemberdayaan apa saja yang dapat dihadirkan melalui keterlibatan perempuan dalam TIK.

Memang telah banyak optimisme bahwa TIK dapat membawa pemberdayaan terhadap perempuan dan mendorong masyarakat yang inklusif dan setara. Namun TIK hanyalah sarana yang perlu didesain dan diarahkan untuk mencapai tujuan besar yang ada. Keberadaan TIK tidak serta-merta menghasilkan kebebasan dan kesetaraan. Keberadaan internet juga tidak serta-merta memberdayakan kelompok miskin yang terpinggirkan. Memberikan perangkat beserta internetnya pun tidak langsung menjawab persoalan ketimpangan gender ataupun ketimpangan gender digital. Tanpa mempertimbangkan dan mendesain sebuah proyek transformasi gender dalam masyarakat digital, perubahan yang diharapkan tidak dapat terjadi.

Data penelitian yang dipaparkan pada bab ini menjadi pijakan tentang situasi kerentanan apa saja yang dihadapi oleh perempuan. Berdasarkan penelitian yang ada, tampak bahwa tidak semua perempuan mengalami tantangan yang sama dalam akses dan pemanfaatan TIK. Ketimpangan gender digital akan terlihat jelas pada perempuan dari kelompok yang paling rentan seperti kelompok miskin, berpendidikan rendah, tinggal di pedesaan, dan dengan berbagai kategori sosial lainnya yang tidak memiliki privilese. Perlu ada kesadaran bahwa kemajuan TIK tidak bisa langsung menjawab semua tantangan ketimpangan gender. Artinya, aspek tekno-sosial, norma gender, dan kelompok mana yang mendapat privilese dalam kemajuan TIK perlu dikenali lebih jauh.

4. Ringkasan Riset-Riset Terdahulu

Eksplorasi penelitian terkait pemberdayaan perempuan di era digital oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dilakukan dengan pencarian melalui internet. Pencarian literatur dibatasi pada jurnal ilmiah dalam periode lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016-2021, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk memperluas penelitian. Pencarian jurnal dilakukan secara purposif pada tema “Aktivisme Digital Perempuan Indonesia”, “Aktivisme Digital Kesetaraan Gender Indonesia”, “Pemberdayaan Perempuan Indonesia melalui Digital”, dan “Sosial Media Advokasi Feminisme Indonesia”. Dengan mengacu pada tema tersebut, peneliti mendapatkan 20 artikel yang terkait dengan tema. Berdasarkan hasil pembacaan keseluruhan, terpilih delapan artikel yang relevan terkait tema peran OMS dalam mendorong kesetaraan gender dalam era demokrasi digital di Indonesia.

Dalam proses pencarian data terkait isu ini, tidak begitu banyak penelitian yang relevan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya desakan dan kesadaran para peneliti untuk melakukan penelitian dengan perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial. Padahal, penelitian dengan perspektif keadilan gender dan inklusi sosial penting sebagai landasan rancangan kebijakan dan rencana aksi terkait pemberdayaan kelompok-kelompok marginal. Penelitian dengan perspektif gender dan minoritas memiliki dampak besar bagi pemberdayaan masyarakat. Namun sayangnya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Universitas Airlangga, sejak tahun 2013-2017, hanya 7% dari total riset yang memasukkan perspektif gender dan minoritas. Hal ini disebabkan masih kuatnya pengaruh norma patriarki di kalangan komunitas peneliti (Rauf 2020). Kedelapan artikel tersebut mengangkat tema pemberdayaan perempuan, advokasi berbasis digital yang dilakukan oleh OMS di Indonesia (lihat tabel 6).

Tabel 6. Ringkasan Riset Terdahulu tentang Peran OMS dalam Mendorong Kesetaraan Gender dalam Era Demokrasi Digital di Indonesia

Tahun	Judul	Peneliti	Temuan
2021	<i>“Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence in Indonesia”</i>	Eny Ratnasari, Suwandi Sumartias, Rosnandar Romli	Kampanye yang dilakukan SAFEnet untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat khususnya perempuan terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). SAFEnet memberikan pendampingan terhadap kasus KBGO, membangun kesadaran tentang keamanan data dan lainnya sebagai sarana bagi perempuan untuk beraktivitas secara daring dengan aman.
2021	<i>“Digital Ethnography of Social Media: Srikandi Sungai Indonesia (SSI) Activists in Water and River Conservation”</i>	Sri Kusumo Habsari, Fatkhu Rohmatin & Istadiyantha	Penelitian ini menunjukkan bagaimana anggota SSI menggunakan sosial media untuk mengomunikasikan nilai-nilai lingkungan mereka kepada publik tetapi penggunaan sosial media belum efektif karena masih sebatas menunjukkan kegiatan yang dilakukan SSI.
2019	<i>“The Rise of Indonesian Feminist Activism on Social Media”</i>	Gilang Desti Parahita	Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivisme digital feminisme di Indonesia mendorong lahirnya ruang aman digital, forum diskusi <i>online</i> , mobilisasi gerakan untuk menuntut hak perempuan, publikasi riset, dan lain sebagainya.

Tahun	Judul	Peneliti	Temuan
2018	"Aliansi Laki-laki Baru: <i>The Role of Social Media in Promoting Gender Equality in Indonesia</i> "	Enny Maryani, Preciosa Alnashava dan Detta Rahmawan	Riset ini menunjukkan pentingnya media sosial sebagai alat ALB untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender di Indonesia. ALB melalui media sosial mengampanyekan relasi setara antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan studi kasus tersebut didapat kesimpulan bahwa media memberikan ruang kebebasan berpikir dan berpartisipasi untuk mendorong perubahan sosial.
2017	" <i>Empowering Indonesian Women Through Building Digital Media Literacy</i> "	Fiona Suwana	Penelitian menemukan bahwa perempuan Indonesia menggunakan internet untuk kepentingan interaksi sosial daripada kepentingan bisnis dan politik. IWITA dan FemaleDev meyakini bahwa literasi digital penting untuk memberdayakan perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan perlu berdaya secara digital karena mereka punya peran penting dalam keluarga. IWITA memberdayakan ibu rumah tangga untuk menggunakan internet secara produktif (ekonomi) dan untuk terlibat dalam kehidupan publik. Sedangkan FemaleDev menasar anak perempuan muda untuk belajar <i>coding</i> agar mereka dapat membuat aplikasi. Inisiatif ini tidak sekadar mendorong keterlibatan dalam penggunaan, tetapi juga sebagai produsen dari TIK.
2016	"Melawan Kredo Aborsi: "Gerakan <i>Abortion Is Not A Crime</i> Sebagai Sebuah Wacana Tandingan"	Ade Yulfianto dan Fullah Jumaynah	Penelitian ini berfokus pada bagaimana OMS Samsara melakukan kampanye <i>#AbortionIsNotACrime</i> . Melalui media sosial, Samsara melakukan pendidikan publik tentang hak perempuan Indonesia atas layanan aborsi aman. Melalui media sosial juga, Samsara memberikan konseling terhadap perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Advokasi dilakukan Samsara secara <i>offline</i> dan <i>online</i> . Namun penelitian ini menunjukkan potensi penggunaan internet oleh OMS untuk memperjuangkan HKSR perempuan.
2016	" <i>Yes, We Can!</i> Perempuan sebagai Pengambil Alih dan Pengguna ICT"	Meike Lusye Karolus & Isyfi Afiani	Penelitian ini berfokus pada aktivisme digital yang dilakukan oleh <i>Magdalene.co</i> dan <i>Girls in Tech</i> (GIT). Fokus utamanya adalah mengangkat suara kelompok marginal yang selama ini didiamkan, misalnya LBGT. <i>Magdalene.co</i> juga aktif melakukan mobilisasi melalui petisi 75.000 tanda tangan untuk mendorong negara meloloskan UU Anti-Kekerasan Seksual. Sementara GIT Indonesia mengampanyekan <i>#WhyNot</i> yang tujuannya memotivasi perempuan untuk tidak takut dalam berkiprah di dunia teknologi. Isu-isu perempuan dan teknologi. Perempuan muda yang baru saja bekerja berumur mulai dari 21 hingga 35 tahun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa internet telah memberdayakan perempuan di dunia siber.
2016	"Transformasi Komunikasi Gerakan Perempuan dalam Media Baru: Upaya Pencarian Keadilan Gender di Surakarta dan Yogyakarta"	Sih Natalia Sukmi	Penelitian ini adalah studi kasus pada aktivisme digital sejumlah gerakan masyarakat di Yogyakarta (Rifka Annisa, Aliansi Laki-laki Baru, Yasanti, Mitra Wacana, Spek-Ham, dan Jejer Wadon). Riset ini menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan media baru hanya untuk menginformasikan hasil kegiatan yang telah mereka lakukan. Mereka belum mempelajari benar bahwa media ini mampu menjadi ruang diskursus yang digunakan untuk mendialogkan isu-isu yang tengah berkembang.

Sumber: Diolah dari delapan jurnal terpilih tahun 2015-2021

Seluruh penelitian yang dipaparkan pada tabel 6 merupakan studi kualitatif. Semuanya berfokus pada advokasi-advokasi yang dilakukan oleh sejumlah OMS di Indonesia. Berdasarkan paparan singkat pada tabel tersebut, advokasi digital yang dilakukan oleh OMS antara lain terkait pemberdayaan perempuan pada aspek keterlibatan digital, hak atas kebebasan dari kekerasan seksual di ranah *offline* dan *online*, hak kelompok minoritas seksual, serta kampanye tentang lingkungan yang sehat. Dari delapan artikel dengan tema besar mendorong kesetaraan gender di era digital, tiga di antaranya membahas organisasi masyarakat sipil yang mendorong keterlibatan langsung perempuan di dalam dunia digital.

Ketiga artikel tersebut adalah “Yes, We Can! Perempuan sebagai Pengambil Alih dan Pengguna ICT” oleh Meike Lusye Karolus & Isyfi Afiani (2016), “Empowering Indonesian Women Through Building Digital Media Literacy” oleh Fiona Suwana (2017), dan “Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence in Indonesia” oleh Eny Ratnasari, Suwandi Sumartias, & Rosnandar Romli (2020). Berdasarkan ketiga artikel tersebut, diketahui bahwa OMS telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan melalui literasi digital. Karolus dan Afiani (2016) menunjukkan bahwa *Girls in Tech* Indonesia gencar mengampanyekan #WhyNot. *Girls in Tech* Indonesia serta memberikan seminar dan pelatihan guna menambah kemampuan digital perempuan Indonesia. Gagasan awal mendirikan *Girls in Tech* adalah kegelisahan karena minimnya partisipasi perempuan di dunia digital, khususnya sebagai pembuat konten. *Girls in Tech* adalah upaya mendorong peningkatan peran dan aktivitas perempuan di ruang siber.

Suana (2017) dalam risetnya membahas bahwa OMS IWITA dan FemaleDev berperan penting untuk melakukan literasi digital terhadap perempuan. Berdasarkan studi kasus terhadap advokasi kesetaraan gender yang dilakukan IWITA dan FemaleDev, Suana menunjukkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam dunia digital karena dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan diri, status sosial, kemandirian, memiliki saluran untuk mengekspresikan diri, dan membuka kesempatan baru di ruang publik. Lebih jauh, bagi kelompok perempuan pedesaan, pelatihan media digital dapat meningkatkan status sosial perempuan pedesaan, meningkatkan daya tawar mereka, dan membuat mereka dapat terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Meski demikian, penelitian ini menyatakan bahwa mayoritas perempuan Indonesia menggunakan internet untuk kepentingan interaksi di media sosial, dan hanya sedikit yang menggunakan internet untuk kepentingan bisnis (Suwana, 2017: 216).

Berdasarkan wawancara terhadap representatif dari IWITA dan FemaleDev, penelitian ini menunjukkan bahwa selain hambatan pada akses material, perempuan mengalami hambatan seperti rendahnya kepercayaan diri, rendahnya literasi digital, dan kurangnya motivasi untuk terlibat di dunia digital. Merespons persoalan ketimpangan gender digital tersebut, FemaleDev memberikan pelatihan literasi digital dan pelatihan kepemimpinan kepada perempuan. Tujuannya agar perempuan merasa percaya diri dan termotivasi untuk terlibat dalam dunia TIK.

Artikel jurnal lain yang membicarakan peran OMS dalam melakukan literasi digital berjudul “*Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence in Indonesia*” oleh Eny Ratnasari, Suwandi Sumartias, & Rosnandar Romli (2020). Riset tersebut melakukan studi kasus pada aktivisme digital dari SAFEnet dalam hal membangun kesadaran publik akan ancaman Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Istilah KBGO sendiri diciptakan oleh SAFEnet pada tahun 2019 di dalam buku panduan mengenali KBGO. Melalui kampanye media sosial, SAFEnet membangun komunikasi dua arah terhadap publik terkait isu KBGO. Dalam advokasi yang dilakukan, SAFEnet menggunakan media sosial sebagai sarana mendorong partisipasi publik untuk menghapuskan KBGO. Kampanye Awasi KBGO adalah advokasi anti-kekerasan gender yang mereka lakukan dengan berpegang pada prinsip keberpihakan terhadap korban. SAFEnet memberikan pendampingan untuk advokasi litigasi dan non-litigasi terhadap korban.

Tantangan yang dihadapi SAFEnet adalah membawa advokasi digital ke ranah advokasi *offline* (memadukan advokasi digital dengan konvensional). Riset tersebut menunjukkan bagaimana adanya kekosongan hukum yang mengatur soal kekerasan terhadap gender berbasis *online*. Persoalan lain yang ditunjukkan oleh riset ini adalah masalah infrastruktur yang tidak merata menjadi tantangan aktivisme digital. Kampanye di kawasan timur Indonesia (Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara), misalnya, sangat terhambat oleh infrastruktur. Artinya, aktivisme sosial melalui kampanye media belum bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Persoalan infrastruktur dan literasi menjadi hambatan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kampanye Awasi KBGO adalah aktivisme digital yang dilakukan melalui konten media sosial di Instagram. Tiga tema besar yang dilakukan dalam aktivisme digital adalah memberikan informasi yang kredibel lewat konten media sosial, melakukan mobilisasi sosial, dan yang terakhir adalah advokasi KBGO. Tantangan dari aktivisme digital adalah fenomena *slackvisme*, yaitu kampanye tampak efektif dan berfungsi di dunia maya tetapi tidak di dunia nyata.

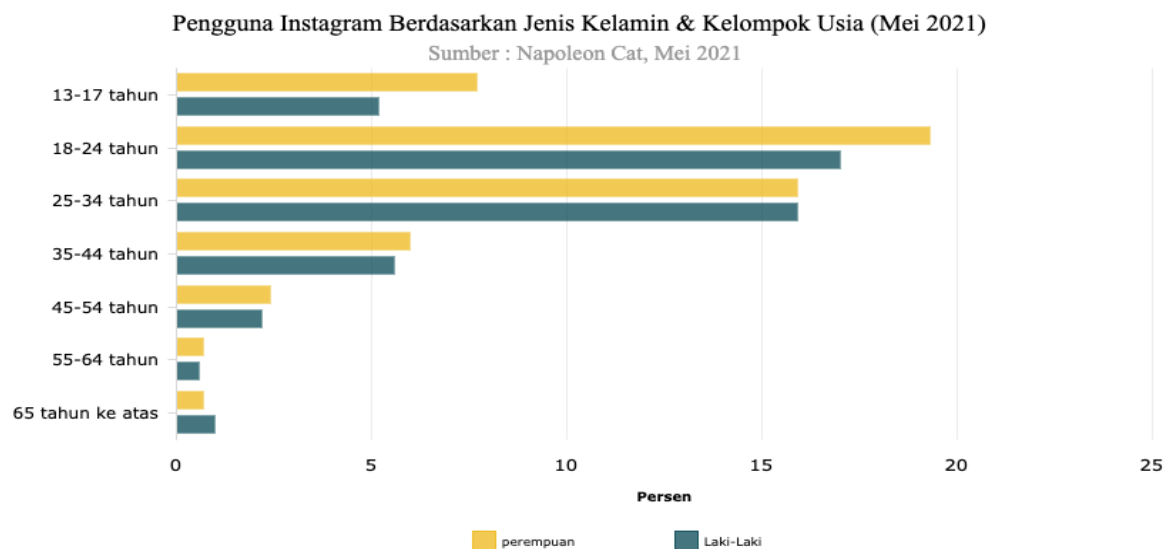
Lima artikel jurnal lainnya membahas tentang aktivisme digital yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan komunitas untuk memperjuangkan berbagai aspek terkait diskriminasi dan ketimpangan gender di Indonesia. Lima artikel jurnal tersebut adalah “*Digital Ethnography of Social Media: Srikandi Sungai Indonesia (SSI) Activists in Water and River Conservation*” oleh Sri Kusumo Habsari, Fatkhu Rohmatin & Istadiyantha Istadiyantha (2021); “*The Rise of Indonesian Feminist Activism on Social Media*” oleh Gilang Desti Parahita (2019); “*Aliansi Laki-laki Baru: The Role of Social Media in Promoting Gender Equality In Indonesia*” oleh Enny Maryani, Preciosa Alnashava, dan Detta Rahmawan (2018); “*Melawan Kredo Aborsi: Gerakan Abortion Is Not A Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan*” oleh Ade Yulfianto dan Fullah Jumaynah (2016); dan “*Transformasi Komunikasi Gerakan Perempuan dalam Media Baru: Upaya Pencarian Keadilan Gender di Surakarta dan Yogyakarta*” (2016) yang mengangkat advokasi kesetaraan gender dengan basis advokasi digital. Kelima artikel ini mengangkat tema seperti konservasi lingkungan dan aktivisme feminisme digital.

Artikel jurnal “*Digital Ethnography of Social Media: Srikandi Sungai Indonesia (SSI) Activists in Water and River Conservation*” karya Habsari, Rohmatin & Istadiyantha (2021) menunjukkan bagaimana OMS Srikandi Sungai Indonesia memperjuangkan konservasi sungai dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi perempuan. Anggota SSI adalah perempuan akar rumput dari berbagai profesi dan latar belakang berbeda yang peduli terhadap lingkungan, khususnya sungai. Mereka bekerja sama membersihkan sungai, mendorong orang untuk tidak membuang sampah ke sungai, serta melakukan *roadshow* ke berbagai instansi untuk berkampanye pentingnya air bersih dan lingkungan (Sahana, 2017).

Penelitian ini mengamati bagaimana anggota SSI menggunakan media sosial untuk mengomunikasikan nilai-nilai lingkungan mereka kepada publik dan memengaruhinya dengan menggunakan metode etnografi. Penelitian ini juga mengamati unggahan konten verbal dan visual mereka selama 30 hari, yaitu tanggal 1-30 April 2019. Riset ini menyimpulkan bahwa foto-foto yang dibagikan SSI melalui media sosial bukan sekadar perpanjangan kerja domestik perempuan terkait kerja-kerja perawatan, tetapi juga bentuk partisipasi publik perempuan untuk berkontribusi pada politik ekologi lingkungan. Menurut penelitian ini, tujuan unggahan yang dilakukan SSI adalah mengirimkan pesan tentang partisipasi aktif perempuan pada ranah domestik dan publik. Selain itu, unggahan gambar juga berfungsi menarik perhatian masyarakat dengan mengkampanyekan pentingnya menjaga kebersihan sungai dan tepian sungai.

Meski demikian, penelitian ini mengkritisi bahwa anggota-anggota SSI yang merupakan perempuan belum menggunakan media sosial untuk keterlibatan sipil secara lebih luas. Artinya, penggunaan media sosial sebatas membagikan dokumentasi kegiatan yang menunjukkan sungai bersih. Realitas dari kerja mereka membersihkan sungai adalah kerja yang sangat berat dan tidak mudah, tetapi hal tersebut tidak dimunculkan. Padahal, menurut penelitian ini, realitas itu perlu disampaikan sebagai bagian untuk memberikan pesan dan mengkampanyekan tentang penting dan tidak mudahnya melakukan konservasi sungai.

“*The Rise of Indonesian Feminist Activism on Social Media*” oleh Gilang Desti Parahita (2019) merupakan studi kasus yang mengamati sejumlah aktivisme digital yang dilakukan sejumlah organisasi, perkumpulan, dan jurnalisme independen yang menyuarakan isu feminisme. Penelitian ini mengamati 17 akun Instagram gerakan feminisme Indonesia. Parahita (2019) menyatakan bahwa literasi dasar dan literasi digital memfasilitasi para aktivis tersebut dengan kemampuan untuk mengartikulasikan dan berbagi ide-ide mereka. Pada akhirnya, para aktivis menginisiasi gerakan pada media sosial yang berfungsi menjadi ruang aman digital, berbagi kisah-kisah pribadi, menyediakan forum diskusi *online*, sarana mobilisasi gerakan dan acara-acara diskusi *offline*, merespons pandangan kritis dan berlawanan terhadap gerakan mereka, serta menyelenggarakan dan memublikasikan riset.



katadata.co.id

databoks

Gambar 5. Pengguna Instagram di Indonesia mayoritas perempuan (Mei 2021).

Penelitian ini menunjukkan bahwa 17 akun tersebut memberikan edukasi publik tentang seksualitas, kesetaraan gender dan feminisme, serta membangun solidaritas di antara masyarakat. Tiga tema utama yang diperjuangkan, pertama, memerangi pelecehan seksual di ruang *offline* dan *online*. Kedua, memastikan bahwa feminisme dan Islam tidak bertentangan. Ketiga, mengangkat isu interseksionalitas seperti perjuangan hak buruh, ekofeminisme, mendorong penerimaan terhadap LGBT, dan keragaman identitas lain.

Artikel jurnal “Aliansi Laki-laki Baru: *The Role of Social Media in Promoting Gender Equality In Indonesia*” oleh Enny Maryani, Preciosa Alnashava, dan Detta Rahmawan (2018) menggunakan studi kasus untuk mengeksplorasi dan menganalisis Aliansi Laki-laki Baru (ALB) dalam mengampanyekan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam mendorong kesetaraan gender. ALB menggunakan berbagai platform media sosial untuk melakukan kampanye. Media sosial tersebut antara lain Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Melalui platform FB, ALB mengampanyekan cara berinteraksi dengan orang asing di ruang publik. Informasi ini diberikan sebagai alat kampanye untuk membangun kesadaran para laki-laki tentang mana tindakan yang termasuk pelecehan dan mana yang tidak.

Melalui Twitter, ALB *re-tweet* berbagai informasi dari akun-akun yang membawa visi-misi kesetaraan gender. Pada platform Instagram, ALB lebih banyak mengunggah informasi kegiatan yang dilakukan atau terkait dengan ALB. Pada platform ini, mereka juga menyajikan sejumlah kutipan terkait kesetaraan gender. Sementara itu, pada platform YouTube, ALB memperkenalkan apa itu ALB, seminar tentang kesetaraan gender, film pendek tentang gender, pendidikan seksual, dan video kampanye tentang anti-pemeriksaan. Penelitian ini

menunjukkan bahwa aktivisme digital yang dilakukan oleh ALB konsisten mengangkat tema: identitas ALB sebagai gerakan gender; kampanye melawan kekerasan terhadap perempuan; pelibatan laki-laki dalam mendorong kesetaraan gender; dan mempromosikan kegiatan-kegiatan terkait isu gender. Riset ini menunjukkan adanya peluang bagi laki-laki untuk terlibat dalam mendorong kesetaraan gender melalui media sosial.

“Melawan Kredo Aborsi: Gerakan *Abortion is Not A Crime* Sebagai Sebuah Wacana Tandingan” oleh Ade Yulfianto dan Fullah Jumaynah (2016) adalah jurnal yang membahas mengenai aktivisme digital yang dilakukan oleh OMS Samsara untuk mendorong akses aborsi aman dan legal di Indonesia. Samsara adalah salah satu LSM yang bergerak mempromosikan kesehatan reproduksi, seksualitas, gender, agama, budaya, dan spiritualitas dalam isu aborsi. Fokus advokasinya melalui edukasi dan konseling. Melalui situs *samsara.or.id*, para aktivis menghadirkan pendidikan HKSR serta menyediakan layanan advokasi untuk aborsi dengan menyediakan *hotline* layanan.

Melalui *hotline* ini, Samsara hendak memberdayakan para perempuan yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan, sehingga dapat memilih solusi terbaik. Melalui *hotline* dan *e-mail*, Samsara menjangkau perempuan di berbagai daerah Indonesia, baik di kota maupun di pedesaan, tanpa memandang status pernikahannya. Layanan ini inklusif bagi perempuan tanpa melihat batasan usia, lokasi, status perkawinan, ekonomi, dan lain sebagainya. Samsara memprakarsai gerakan *AbortionIsNotaCrime* dan memanfaatkan semua akses digitalnya untuk mengampanyekan gerakan ini. Mereka sering kali mengunggah poster-poster gerakan ini di Instagram ataupun melalui artikel di situs *www.askinna.com*. Aktivisme digital melalui kampanye *#AbortionIsNotACrime* yang dilakukan Samsara bertujuan menata kembali relasi negara dan masyarakat untuk menciptakan ruang publik yang di dalamnya terdapat gagasan demokrasi, otonomi, serta kebebasan individu dalam mempersoalkan aborsi. Tujuan aktivisme digital yang dilakukan Samsara adalah mendorong negara untuk memberikan layanan aborsi yang aman dan legal.

Artikel terakhir mengenai aktivisme digital yang mendorong kesetaraan gender di Indonesia adalah “Transformasi Komunikasi Gerakan Perempuan dalam Media Baru: Upaya Pencarian Keadilan Gender di Surakarta dan Yogyakarta” oleh Sih Natalia Sukmi (2016). Artikel ini menyoroti peran media baru (media sosial) dalam gerakan perempuan yang disadari oleh para aktivis dapat membantu proses gerakan sosial, tetapi pemanfaatannya belum maksimal. Penelitian ini mengamati OMS dan komunitas yang berfokus pada isu pemberdayaan perempuan. OMS dan komunitas tersebut adalah Rifka Annisa, Aliansi Laki-laki Baru, Yasanti, Mitra Wacana, SPEK-HAM, dan Jejer Wadon. Melalui metode wawancara pada setiap representatif kelompok dan OMS, penelitian ini menjelaskan bahwa SPEK-HAM menggunakan internet untuk membuat web ataupun mengunggah produk audio visual ke media sosial seperti YouTube, *fanpage*, dan beragam bentuk lain. Sementara itu, Rifka Annisa memanfaatkan internet setidaknya untuk memublikasikan kegiatan yang telah mereka lakukan. Bagi Rifka Annisa, media baru

(internet) menjadi penting. Selain untuk kegiatan promosi, internet juga membantu proses konseling kasus kekerasan seksual dari para perempuan korban. Jaringan internet membantu bukan hanya mempermudah interaksi antara para aktivis dan kelompok sasaran.

Penelitian ini menunjukkan bahwa internet telah mengambil peran dalam advokasi yang dilakukan oleh OMS, tetapi pemanfaatannya belum maksimal. SPEK-HAM dan Rifka Annisa adalah dua dari enam organisasi yang diteliti. Dibanding empat lainnya, kedua organisasi ini cukup aktif menggunakan media sosial untuk kepentingan aktivisme. Sementara itu, komunitas lain lebih menekankan aktivisme *offline*, yaitu dengan melakukan diskusi ataupun bincang santai secara langsung. Representatif Yasanti menyatakan bahwa strategi advokasi *offline* dipilih oleh organisasi mereka karena kelompok target yang diberdayakan adalah para buruh perempuan. Metode *offline* dirasa lebih tepat untuk segmen advokasi yang kebanyakan berupa pelatihan keterampilan kerja.

Riset terkait peran OMS yang langsung menarget pada kesetaraan gender digital masih lebih sedikit dibandingkan dengan riset terkait isu-isu kesetaraan gender lainnya. Prioritas advokasi yang dilakukan oleh OMS dalam mendorong kesetaraan gender banyak berbicara soal kekerasan seksual, hak kesehatan seksual serta reproduksi, pemberdayaan buruh perempuan dan ekonomi, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja, politik, dan lainnya. Sementara itu, advokasi yang dilakukan oleh OMS dan khusus menasar pada pemberdayaan TIK terhadap perempuan masih sangat sulit ditemukan dalam riset-riset lima tahun terakhir ini. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah gagasan mengenai ketimpangan gender dalam digital sendiri merupakan konsep yang relatif baru jika dibanding isu-isu kesetaraan gender lainnya.

Berdasarkan analisis terhadap riset-riset terdahulu, diketahui bahwa terdapat tiga OMS yang melakukan kerja-kerja pemberdayaan terhadap perempuan dengan menekankan pentingnya partisipasi dalam TIK. Organisasi tersebut juga melakukan literasi digital kepada perempuan. Tiga OMS tersebut adalah IWITA, FemaleDev, dan SAFEnet. Berdasarkan analisis terhadap delapan jurnal tersebut, diketahui gambaran umum tentang apa saja tantangan keterlibatan perempuan dalam TIK yang menimbulkan ketimpangan gender digital. Diketahui juga bahwa OMS telah melakukan sejumlah inisiatif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini hendak memperdalam terkait bagaimana tantangan yang dihadapi kelompok perempuan rentan dalam mengakses TIK. Informasi tersebut dieksplorasi melalui FGD dan wawancara mendalam terhadap sejumlah OMS yang terhubung dengan kelompok target. FGD dan wawancara juga dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi umum yang telah didapat dari studi literatur terhadap delapan artikel jurnal yang diteliti. Melalui wawancara mendalam pada sejumlah OMS, perempuan praktisi IT, dan aktivis/politisi perempuan; penelitian ini secara aktif menggali sejumlah data terkait inisiatif baik, tantangan yang dihadapi selama melakukan advokasi, dan bentuk penguatan demokrasi yang disumbangkan dari kerja-kerja mereka.





BAB 3

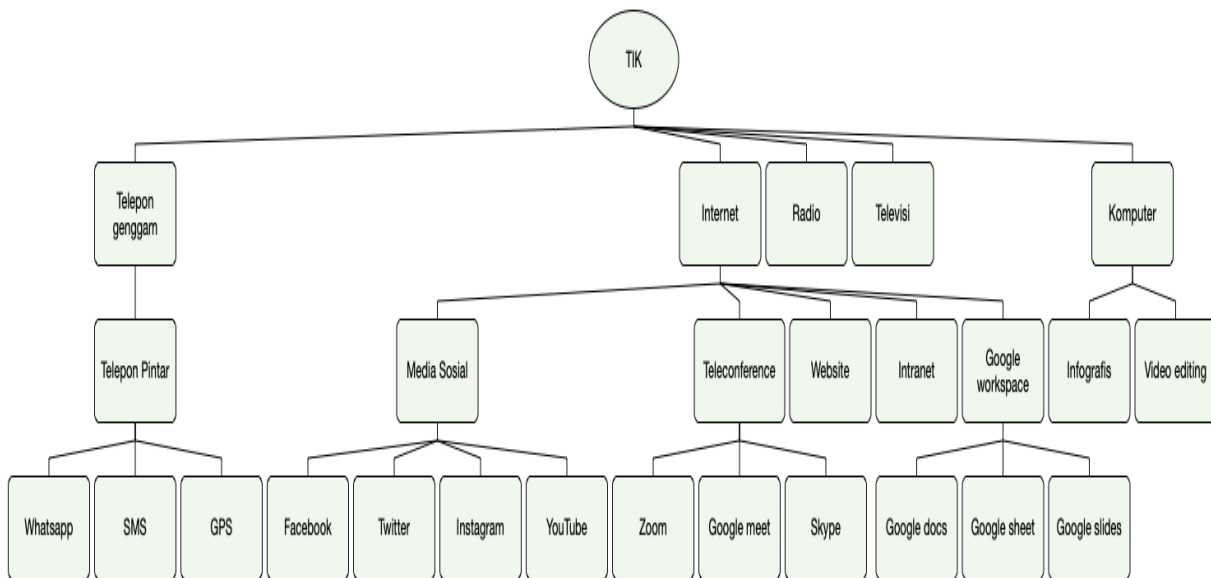
KETIMPANGAN GENDER DALAM TIK

1. Pemanfaatan TIK oleh Perempuan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang demikian banyak ragam dan perkembangannya tidak selalu dimaknai sama oleh seseorang, termasuk OMS dan kelompok perempuan. Studi ini melihat ada asosiasi yang sangat kuat antara TIK dan “internet” sebagai sesuatu yang dianggap sama. Padahal, TIK itu sendiri memiliki banyak ragam, bentuk, dan perkembangannya. Seandainya penelitian ini dilakukan dua puluh tahun lalu, kemungkinan media TIK yang dominan bukanlah internet, melainkan telepon atau televisi. Dengan perkembangan yang ada, wajar jika asosiasi OMS dan informan kunci lainnya dalam studi ini memiliki persepsi yang sangat dominan bahwasanya yang dimaksud TIK adalah segala hal yang terkait dengan internet. Meskipun demikian, sebagian juga masih menyebut platform TIK yang lain, seperti telepon seluler, telepon pintar, komputer, dan radio.

“Ya, aku sih cuma tahunya kalau Teknologi, Informasi, dan Komunikasi itu ada proses informasi. Jadi, ada teknologi menggunakan media internet gitu ya pemrosesannya. Pokoknya, kegiatan yang menggunakan teknologi internet.” (Wawancara dengan UK, Juli 2021).

Jika diringkas dalam diagram, berbagai mode TIK yang sering disebutkan oleh informan kunci dalam diskusi kelompok terfokus ataupun wawancara mendalam adalah sebagai berikut.



Gambar 6. Pohon TIK yang diidentifikasi dari pernyataan informan-informan kunci. Diolah menggunakan NVivo 12.

Asosiasi internet sebagai teknologi yang dominan dalam TIK menunjukkan bahwa era digital saat ini tak lain adalah era internet. Lalu, bagaimana kita dapat mengidentifikasi ketimpangan gender di era digital/internet saat ini? Salah satu indikasi ketimpangan gender digital yang paling menonjol adalah dengan melihat pada aspek akses dan penggunaan internet dalam praktik sehari-hari. Penggunaan itu sendiri dapat dilihat sebagai jenis penggunaan aktif atau penggunaan pasif (Ghobadi, 2013). Penggunaan aktif yang dimaksud adalah bagaimana perempuan berkontribusi terhadap internet, misalnya seperti publikasi *website*, berkontribusi dalam komunitas daring, melakukan bisnis, memeriksa harga komoditas, dan penggunaan lain dari internet yang bermanfaat bagi pemberdayaan diri, kelompok, serta komunitas. Artinya, penggunaan internet yang dimaksudkan adalah penggunaan yang bermanfaat dan bersifat memberdayakan.

Menurut Alliance for Affordable Internet (A4AI), untuk mencapai konektivitas yang bermakna, ada prasyarat yang perlu dipenuhi, antara lain adanya akses internet secara reguler (akses harian), perangkat yang memadai, kecukupan data internet, dan tersedianya jaringan internet yang stabil dan cepat. Agar perempuan dapat terlibat dalam konektivitas yang bermakna, persoalan pada akses material dan keterampilan TIK perlu diselesaikan. Dalam FGD pertama (19 November 2020), OMS ICT Watch menyatakan bahwa walaupun sebagian kelompok perempuan miskin kota dan perempuan pedesaan telah memiliki akses terhadap TIK, partisipasi publik mereka masih dinilai rendah. Alasannya, pemanfaatan media masih

berkisar pada komunikasi melalui media sosial. Kelompok tersebut belum memanfaatkan media sebagai arena untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi politiknya atau untuk keperluan pemberdayaan lain seperti misalnya pada aspek ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terlihat beberapa hambatan yang menyebabkan ketimpangan gender digital di Indonesia (lihat tabel 7).

Table 7. Hambatan Keterlibatan Penuh Perempuan dalam TIK berdasarkan Riset Terdahulu

Hambatan	Temuan
Motivasi (Tantangan kultural, merasa inferior terhadap teknologi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Suana (2017) mengutip representatif IWITA dan FemaleDev menunjukkan bahwa perempuan memiliki rasa rendah diri terkait TIK, sehingga berdampak pada kurangnya motivasi untuk lebih terlibat. 2. Habsari <i>et al.</i> (2021) juga menunjukkan perempuan sebagai aktivis dalam SII kurang berani membuat konten sosial selain mengunggah foto kegiatan. Ada tantangan bagi perempuan untuk menyuarakan pengalaman, gagasan, dan aspirasinya secara eksplisit di media sosial. 3. Karolus & Afiani (2016) dalam bagian wawancara menunjukkan bahwa perempuan masih sedikit terlibat dalam pendidikan dan profesi TIK. Mayoritas perempuan memahami TIK sebagai hal yang sulit, rumit, tidak menarik, dan dipandang sebagai industri yang hanya cocok untuk laki-laki (Karolus & Afiani, 2016: 51).
Akses Material (Keterkaitan dengan kepemilikan perangkat, internet, aksesibilitas)	Penelitian Ratnasari <i>et al.</i> (2021) menyebutkan bahwa ada kesulitan melakukan kampanye isu KS terhadap perempuan di kawasan timur Indonesia karena hambatan infrastruktur, sehingga masih mengandalkan kampanye atau pendidikan publik <i>offline</i> .
Keterampilan (Terkait penguasaan penggunaan perangkat dan aplikasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sukmi (2016) menyatakan bahwa advokasi yang dilakukan sejumlah OMS dan aksi kolektif perempuan mayoritas masih mengandalkan advokasi <i>offline</i>, karena menyesuaikan dengan target kelompok, seperti kelompok buruh dan pedesaan yang tidak bisa dengan metode <i>online</i>. 2. Sukmi (2016) menunjukkan juga bahwa di kalangan kelompok gerakan perempuan sendiri, pemanfaatan media baru TIK masih terhambat pada kapasitas SDM yang belum mampu menggunakan TIK untuk kepentingan gerakan.
Pemanfaatan (Terkait kecenderungan penggunaan internet oleh perempuan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suwana (2017) menunjukkan bahwa penggunaan internet pada perempuan sebagian besar untuk kepentingan komunikasi di media sosial. 2. Habsari <i>et al.</i> (2021) menunjukkan bahwa aktivis perempuan SSI hanya menggunakan media sosial untuk menunjukkan kegiatan komunitas daripada untuk memobilisasi gerakan atau memberikan pendidikan publik dalam bentuk tulisan/ Pernyataan.

Hambatan pada motivasi, akses material, dan keterampilan berimplikasi pada hambatan penggunaan internet yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi perempuan. Sebab, penggunaan internet secara bermakna dapat dilakukan ketika faktor-faktor pendahulunya tersedia. Berdasarkan pengalaman pendampingan yang dilakukan oleh OMS, ketimpangan dalam konektivitas bermakna akan dirasakan secara berlipat, khususnya bagi kelompok perempuan di daerah pedesaan, daerah terisolasi, serta mereka yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan rendah. Pada kelompok tersebut, pemanfaatan internet yang bermakna masih jauh dari harapan. Sebab, pada aspek akses yang paling dasar saja, mereka masih tertinggal.

Meski demikian, di tengah keterbatasan dan sulitnya akses TIK pada kelompok perempuan rentan, sejumlah indikasi terkait penggunaan internet secara bermakna telah dilakukan oleh kelompok rentan dengan dukungan dari OMS-OMS terkait. Secara garis besar, penggunaan akses internet yang bermanfaat dan memberdayakan terlihat dalam dua aspek. *Pertama*, adanya upaya pelibatan perempuan di ruang publik digital. *Kedua*, adanya pemberdayaan ekonomi berbasis digital.

Dalam FGD, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menyatakan bahwa akses dan penguasaan TIK menjadi kebutuhan primer bagi kelompok disabilitas. Kemajuan teknologi telah sampai pada tahap di mana tersedia sejumlah aplikasi yang membantu kelompok disabilitas untuk dapat mengakses informasi publik secara lebih mudah. Adanya aplikasi untuk disabilitas runtu dan netra memudahkan mereka mengakses informasi. Berdasarkan pengalaman dampingan HWDI, persoalan pada hambatan akses material dan keterampilan tidak muncul dalam diskusi. Sebab, kelompok dampingan HWDI telah memiliki akses terhadap aspek tersebut. Tantangan yang muncul adalah terkait kerentanan difabel intelektual.

“Banyak anggota kita juga ada disabilitas intelektual. Teman-teman disabilitas intelektual mayoritas memiliki kecenderungan suka dengan menggunakan komunikasi di media-media sosial. Kita kumpulkan informasi-informasi dan pengaduan-pengaduan terkait dengan *cybercrime*, seperti misalnya perlakuan pelecehan-pelecehan seksual bagi disabilitas intelektual, *which is* barangkali si pelakunya belum tahu kalau dia lakukan atau orang-orang yang disasar itu adalah perempuan-perempuan disabilitas intelektual. Sementara itu, pelaporan kejahatan *cyber* ini tidak mudah dilakukan.” (FGD 12 April 2021, HWDI)

Dalam perspektif interseksionalitas, pengalaman kelompok disabilitas penting untuk dikenali, diperbincangkan, dan disertakan dalam proses dialog publik. Tujuannya agar pengalaman diskriminasi yang dialami secara konkret dapat diakomodasi. Berdasarkan kutipan pengalaman OMS HWDI, terlihat bahwa perempuan disabilitas mengalami ketimpangan yang berlapis. Berdasarkan FGD, salah satu isu yang paling banyak mengemuka terkait hambatan penggunaan akses internet secara bermakna adalah isu keamanan digital. Beberapa OMS menyatakan bahwa keamanan data menjadi tantangan dalam penggunaan internet secara aman dan bermakna.

Dalam pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh HWDI, persoalan kejahatan siber kerap terjadi pada disabilitas intelektual. Hal ini tentu merupakan hambatan pada penggunaan internet yang bermakna bagi perempuan disabilitas. Merespons persoalan tersebut, HWDI melakukan sejumlah pelatihan dan edukasi, misalnya melalui pembuatan video tentang tata cara pelaporan kasus kejahatan siber. Hanya saja, menurut HWDI, inisiatif tersebut masih belum efektif. Sebab, keterbatasan konsentrasi dan intelektual pada kelompok disabilitas membuat mereka kesulitan.

Dalam FGD pertama dan kedua, persoalan kejahatan siber secara umum telah mengemuka. Dalam FGD pertama, ICT Watch menyatakan bahwa kasus kekerasan berbasis digital kerap terjadi dan menimpa perempuan. OMS seperti SAFENet dan lembaga negara seperti Komnas Perempuan dan Kominfo pun menanganinya. Menurut ICT Watch, persoalan kekerasan dan kejahatan dalam dunia siber perlu direspons secara serius. Sebab, ketidakamanan di dunia siber membuat para korban menarik diri dari partisipasi di ruang digital (FGD 19 November 2020, ICT Watch). Sebagaimana yang dialami oleh kelompok perempuan disabilitas intelektual dampingan HWDI, isu lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah bagaimana menciptakan dan menjamin ruang digital yang aman dan ramah bagi perempuan.

2. Hambatan dan Tantangan Pemanfaatan TIK bagi Perempuan

2.1. Hambatan Motivasi (Mental)

Menurut Van Dijk (2002), persepsi seseorang terhadap TIK, khususnya internet, memengaruhi bagaimana keinginannya untuk mengenal teknologi tersebut dan memiliki perangkat untuk terhubung. Van Dijk menjelaskan bahwa sikap ketakutan terhadap internet, kecemasan terhadap komputer, dan pikiran internet tidak berguna bagi kehidupan sehari-hari adalah salah satu hambatan yang membuat seseorang tak memiliki ketertarikan atau mengalami keengganan terhadap TIK. Berdasarkan data survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), terlihat bahwa 4% responden tidak menggunakan internet karena tak tahu cara menggunakannya dan 3,8% tidak menggunakannya karena merasa tak tertarik atau menganggap internet tidak berguna bagi dirinya.

Berdasarkan FGD diketahui adanya sejumlah hambatan mental atau motivasi bagi perempuan untuk terlibat dalam TIK. Hambatan tersebut dapat dialami secara berbeda antara kelompok perempuan yang satu dan kelompok lain. Beberapa tantangan mental yang dihadapi oleh perempuan antara lain stereotip bahwa TIK adalah ranah laki-laki, kecemasan terhadap teknologi, rasa rendah diri, dan tidak berani untuk bertanya. Berdasarkan FGD, tiga OMS menemukan adanya hambatan motivasi dan mental ini dalam setiap pendampingan yang mereka lakukan terhadap kelompok perempuan.

Dari 11 OMS yang melakukan diskusi, mayoritas menyatakan bahwa perempuan memiliki antusiasme tinggi untuk mempelajari dan menggunakan internet. OMS Migrant Care dan GIZ menyatakan bahwa dalam kerja mereka, persoalan ketakutan terhadap teknologi tidak ditemui. Namun stereotip gender berdampak pada minimnya keterlibatan perempuan dalam TIK. OMS Migrant Care memberikan pendampingan pada perempuan pekerja migran, sedangkan GIZ bekerja dalam proyek Innovation and Investment for Inclusive Sustainability Economic Development (ISED), berfokus pada isu Perempuan dalam Digitalisasi, dan

melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dalam sektor pariwisata di Lombok.

“Terdapat permasalahan stereotip dalam dunia digital. Dikaitkannya kalau bidang-bidang manufaktur, *engineering*, *programming*, IT, dsb. yang hanya laki-laki.... Kalau hambatan-hambatan perempuan di sektor pariwisata itu *skill* digitalisasi masih didominasi oleh laki-laki. Hambatan perempuan tentunya tidak hanya digitalisasi. Tapi untuk bekerja di sektor pariwisata saja itu masih memiliki hambatan karena sektor pariwisata memberikan stigma yang negatif terhadap perempuan. Jadi, perempuan mengalami hambatan berlapis. *Pertama*, hambatan untuk masuk ke sektor pariwisatanya sendiri. *Kedua*, hambatan masuk ke digital.” (FGD, 12 April 2021, GIZ)

OMS Perempuan AMAN yang mendampingi penggunaan internet pada perempuan adat di enam wilayah menyatakan bahwa antusiasme perempuan adat untuk mempelajari TIK sangat tinggi, walaupun dalam proses pembelajaran terkadang para perempuan masih ragu dan merasa cemas akan melakukan kesalahan. (FGD, 12 April 2020, OMS Migrant Care, GIZ dan Perempuan AMAN)

Sementara itu, dalam kelompok dampingan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), keengganan dan kecemasan terhadap teknologi masih ditemukan pada kelompok perempuan nelayan. Menurut PPNI, anak muda di kelompok nelayan mayoritas telah mengetahui dan mengakses internet, tetapi tidak pada kelompok tua. Artinya, faktor karakter demografi seperti umur memengaruhi bagaimana antusiasme atau sikap seseorang terhadap TIK. Dalam konteks perempuan nelayan, mereka yang berusia tua cenderung enggan untuk terlibat dalam TIK.

“Rata-rata anak muda sekarang sudah pegang HP. Kecuali orang tua (perempuan) mereka yang kadang memilih ‘*Aku tidak tahu (ponsel dan internet)-lah, mending tidak pegang HP karena aku tidak paham,*’ dan orang tua lebih memilih untuk (tetap seperti) itu.” (FGD, 12 April 2021, PPNI)

Rasa rendah diri dan keyakinan bahwa mereka tidak dapat memahami TIK membuat kalangan perempuan nelayan berusia tua menyerahkan urusan TIK kepada anak mereka. Hal serupa disampaikan juga oleh OMS Kiara yang mendampingi perempuan nelayan.

“*Handphone* ini digunakan sedikit oleh perempuan. Alasannya, sebagian dari mereka merasa malu untuk bertanya bagaimana cara menggunakannya. Selain itu, ada keterbatasan komunikasi antara anak dan orang tua. Jadi, misalkan ibunya tidak tahu cara menggunakan HP dan internet, tetapi anaknya merasa segan untuk mengajarkan atau ada juga anak yang menganggap ibunya sudah paham dengan teknologi tersebut.” (FGD, 12 April 2021, Kiara)

Berdasarkan riset Women's Right Online yang dilakukan oleh ICT Watch pada tahun 2015 dan 2020, diketahui bahwa ditemukan gap bagi perempuan miskin kota untuk mengakses internet. Menurut representatif ICT Watch, temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak perempuan di Palembang, Yogyakarta, dan Jakarta yang merasa tidak perlu untuk memiliki gadget selama laki-laki/suami mereka mempunyai perangkat tersebut. Riset ICT Watch juga menunjukkan bahwa beberapa responden hanya menggunakan gadgetnya ketika suami atau anaknya tidak di rumah (FGD 20 November 2020, ICT Watch). Selain rasa rendah diri untuk dapat menguasai TIK, perempuan juga terkendala oleh sejumlah nilai-nilai budaya patriarki yang melekatkan kerja domestik pada perempuan. Dalam konteks perempuan nelayan, mereka melakukan berbagai kerja reproduksi dan produksi mencapai 15 jam per hari (Arivia & Gina, 2017; Pratiwi & Gina, 2017). Oleh sebab itu, waktu untuk belajar atau mencari informasi dari internet tidak banyak mereka lakukan.

"Biasanya yang mendominasi (penggunaan HP dan internet) adalah nelayan laki-lakinya. Laki-laki nelayan menggunakan (aplikasi) HP untuk mengetahui di mana titik tangkap mereka. Ketika nelayan laki-laki melaut, di situ HP ditinggal. Biasanya, di momen-momen seperti itu, perempuan yang memakai *handphone* tersebut. Tapi biasanya waktunya sudah habis tersita, bukan untuk *handphone*, tetapi aktivitas lain. Contohnya membereskan rumah dan mengurus anak." (FGD, 12 April 2021, Kiara)

Dalam perspektif interseksionalitas, ketimpangan yang dialami oleh perempuan nelayan ini berlipat. *Pertama*, karena identitas gendernya sebagai perempuan, mereka dilekatkan pada kerja-kerja domestik. *Kedua*, dari aspek kelas sosial dan ekonomi, mereka merupakan kelompok tanpa privilese. Posisi sosial mereka berdampak pada terbatasnya akses pada penikmatan distribusi hak secara penuh. Situasi sosial mereka membuat perempuan nelayan tersingkir dari penikmatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara bebas dan penuh, khususnya internet.

Di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, perempuan menggunakan waktu 4,1 kali lebih banyak untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki, dan 80% total jam kerja untuk pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan. Menurut ILO (2018), di seluruh dunia, perempuan lebih banyak melakukan kerja-kerja perawatan yang tidak dibayar dibandingkan dengan laki-laki. Dalam kerangka interseksionalitas, pembagian kerja berdasarkan gender ternyata memiliki dampak yang serius. Dalam penikmatan TIK, beban perawatan rumah tangga ternyata menjadi salah satu penyebab rendahnya motivasi untuk menggunakan internet. Sebab, waktu mereka telah terkuras untuk melakukan aktivitas perawatan rumah tangga dan kerja reproduksi sosial.

"Kalau pun toh dia mempunyai HP, bisa jadi akan lebih diutamakan untuk pendidikan anak-anaknya, sehingga untuk kebutuhan sendiri, saya kira dia akan terpinggirkan." (FGD, 12 April 2021, Rahima)

Kelompok perempuan rentan tak hanya mengalami tantangan mental, tetapi juga hambatan kultural. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi dasar, stereotip, kecemasan terhadap teknologi, dan ketiadaan waktu karena beban kerja ganda menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam TIK. Kemajuan TIK diharapkan membawa inklusivitas sosial, terutama bagi kelompok marginal. Meski demikian, hal tersebut hanya dimungkinkan dengan mengenali hambatan yang terjadi di lapangan. Data survei dan riset yang ada sebelumnya tidak banyak membicarakan soal tantangan konkret yang dihadapi mereka. Ketimpangan hanya terpotret dalam angka. Lebih jauh, perempuan pun hanya digambarkan dalam narasi yang abstrak juga homogen. Untuk memastikan agar persoalan kelompok marginal dikenali, perspektif interseksionalitas perlu diaplikasikan dalam riset-riset sosial.

Berdasarkan FGD, diketahui bahwa OMS mengambil peran inisiatif untuk menjangkau kelompok-kelompok yang paling tidak memiliki privilese. Merespons ketimpangan pada aspek mental yang dialami oleh kelompok perempuan, OMS melakukan pemberdayaan terhadap perempuan melalui sejumlah pelatihan dan edukasi bahwa keterlibatan perempuan menjadi penting. PPNI dan Kiara melakukan sosialisasi agar perempuan terlibat dalam TIK. OMS tersebut memperkenalkan fungsi dan potensi TIK pada perempuan nelayan dan memberdayakan mereka agar mau dan berani terlibat. Sementara itu, GIZ melakukan sejumlah pelatihan digital pada sektor pariwisata dengan terus menargetkan perempuan dalam pelatihan data sains yang biasanya masih didominasi oleh laki-laki.

Meski demikian, tantangan yang dialami oleh perempuan kelompok rentan yang didampingi sejumlah OMS ini memiliki kaitan yang lebih luas daripada sekadar hambatan mental dalam kaitannya dengan TIK. Pemberdayaan dalam aspek mental dilakukan oleh semua OMS yang terlibat. Sebab, seluruhnya mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik. Seluruh OMS terlibat memberikan penyadaran tentang hak perempuan dan membantu kelompok-kelompok tersebut untuk mengakses keadilan dan menuntut pemenuhan haknya. OMS juga memberikan pemberdayaan dari aspek motivasi, yakni dengan memberikan gagasan-gagasan kesetaraan gender, hak perempuan melalui berbagai diskusi, dan pelatihan bagi kelompoknya.

Respons terhadap hambatan pada aspek budaya dan psikologis menjadi penting karena hal tersebut akan berdampak pada motivasi perempuan untuk lebih terlibat dan mempelajari TIK. Intervensi pada hambatan kultural dan mental merupakan salah satu faktor pendorong bagi perempuan untuk memiliki akses material terhadap TIK. Budaya patriarki yang termanifestasi dalam stereotip gender, pembagian kerja berdasarkan gender, dan subordinasi perempuan dalam keluarga memengaruhi aspek mental perempuan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam TIK.

2.2. Akses Material

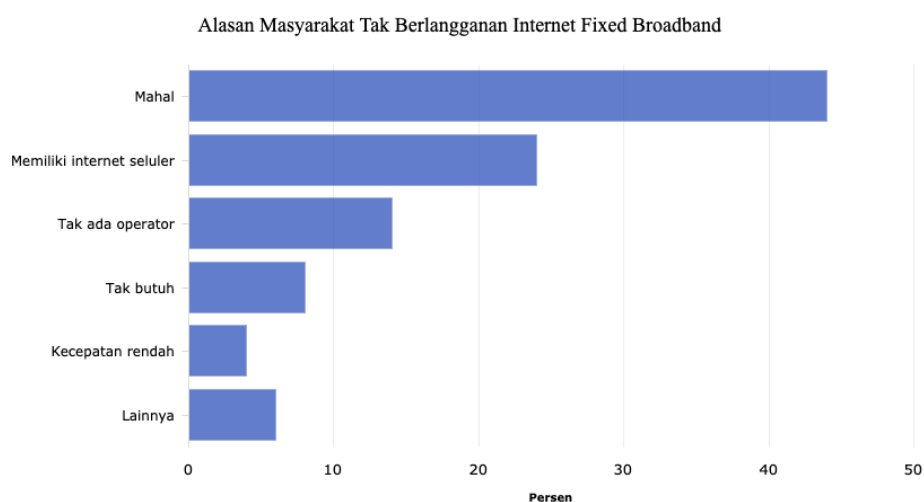
Penyebab lain timpangnya akses TIK perempuan adalah hambatan pada aspek material. Berdasarkan Susenas (2020), terlihat bahwa ada ketimpangan pada akses material perempuan terhadap TIK, baik itu dari segi kepemilikan komputer sebagai salah satu perangkat maupun jumlah pengguna internet. Kepemilikan komputer dan perempuan pengguna internet lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Bila dilihat berdasarkan data Susenas (2020), dari tahun ke tahun, tingkat ketimpangan pada akses material sedikit demi sedikit telah berkurang. Meski demikian, ketimpangan akses material tetap perlu diperhatikan dan direspons secara tepat.

Ketimpangan pada akses material dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti demografi (usia, jenis kelamin, ras, inteligensi, kepribadian, dan kemampuan) serta kategori posisi (pekerjaan, pendidikan, dan jejaring sosial). Kondisi-kondisi ini perlu dikenali. Sebab, jalin kelindan antara faktor demografi dan identitas sosial yang melekat pada diri seseorang serta faktor ketimpangan struktural di dalam masyarakat berdampak langsung pada ketimpangan dalam distribusi hak, termasuk akses terhadap internet (Van Deursen & Van Dijk, 2019: 356).

Salah satu faktor yang sangat memengaruhi bagaimana perempuan tereksklusi dari akses material terhadap kemajuan TIK adalah pendapatan dan daya beli. Kepemilikan perangkat dan kemampuan membeli (pulsa) internet sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut. Kelompok rentan dengan pendapatan rendah atau tidak pasti seperti perempuan nelayan, perempuan miskin kota, perempuan pekerja migran, perempuan pedesaan, dan berbagai kelompok rentan lainnya memiliki hambatan yang lebih besar untuk mengakses internet.

Masih banyak masyarakat yang tak berlangganan jaringan tetap pita lebar telekomunikasi (*fixed broadband*) di Indonesia (Bank Dunia, 2021). Fasilitas internet tersebut masih dianggap mahal karena pelanggan harus menyiapkan biaya untuk sewa modem, pemasangan, dan langganan bulanan yang berkisar Rp 250 ribu hingga Rp 800 ribu per bulan. Data menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai adopsi *fixed broadband* tergolong mahal adalah mereka yang tinggal di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Selain mahalnya biaya, masyarakat lebih senang untuk mengandalkan internet seluler dibanding *fixed broadband*. Biaya internet dari operator seluler relatif lebih murah dan bisa menjangkau penduduk di wilayah pelosok.

Dari hasil FGD yang dilakukan dengan sejumlah OMS, 9 dari 11 representatif OMS menyatakan adanya hambatan akses material pada kelompok yang mereka dampingi. Persoalan dalam hal akses material terkait kesanggupan perempuan untuk membeli perangkat beserta kuota internetnya dan kemampuan mempertahankan alat tersebut. Persoalan lain adalah tidak tersedianya jaringan internet yang stabil dengan harga yang dapat mereka jangkau.



Gambar 7. Alasan masyarakat tak berlangganan *internet fixed broadband* (2021).

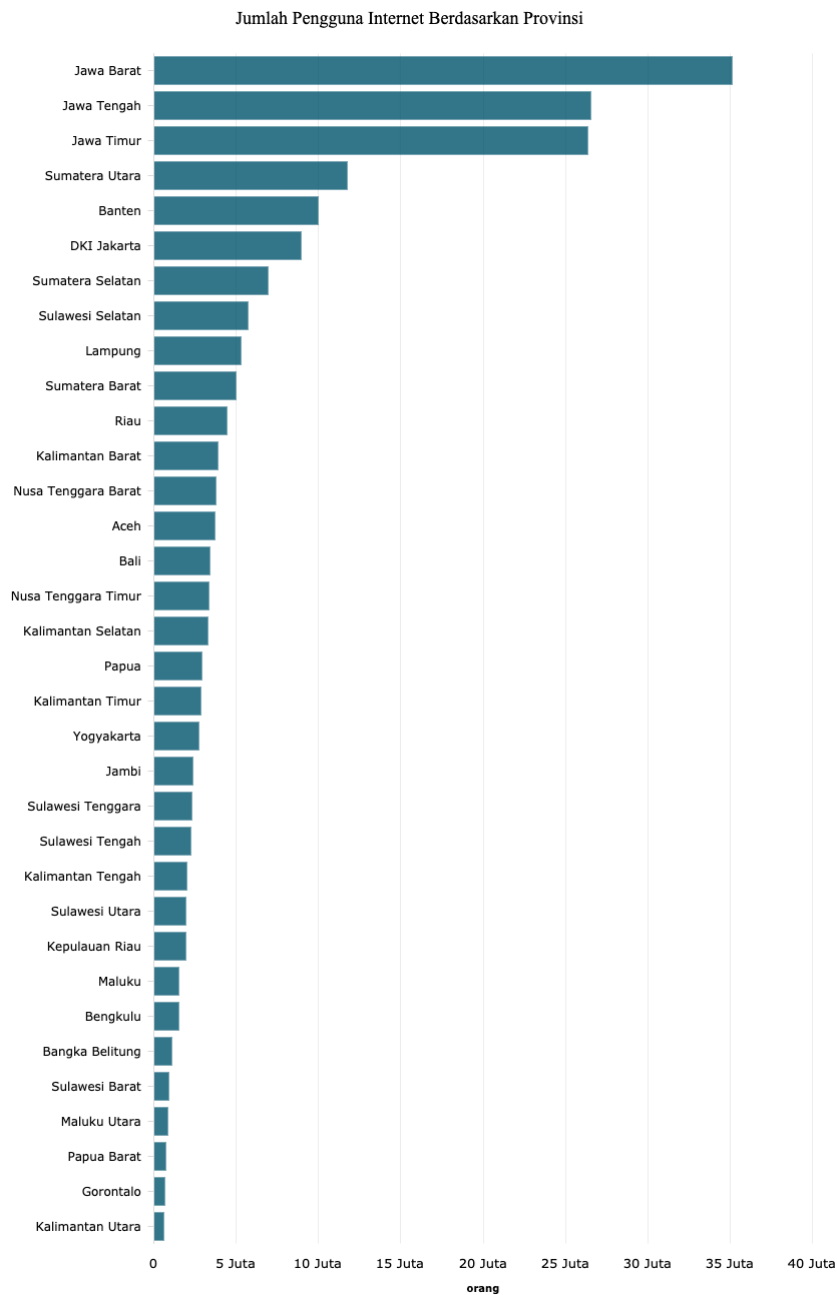
Selain kesulitan untuk memiliki perangkat dan internet karena faktor ekonomi, persoalan geografis dan bahkan kebijakan sebuah negara memengaruhi akses perempuan terhadap penggunaan dan pemanfaatan TIK. Mayoritas OMS menyatakan bahwa masalah infrastruktur terkait jaringan internet yang lambat dan tidak stabil adalah hambatan yang dihadapi hampir di setiap kelompok dampingan. Selain itu, sarana listrik sebagai pendukung proses operasional kegiatan internet masih menjadi tantangan di lapangan.

Migrant Care, OMS yang memberikan pendampingan pada perempuan pekerja migran, menyatakan bahwa masih banyak pekerja migran yang tidak memiliki perangkat ponsel. Tantangan lain adalah mahalnya biaya pulsa dan batasan dari negara tempat mereka bekerja.

“Waktu itu kita konsentrasi ke Timur Tengah. Ternyata di Timur Tengah kita melakukan survei 62% memiliki *handphone*, 37% tidak memiliki *handphone*. Persoalan lain, ini yang paling vital, mereka (perempuan pekerja migran) punya *device*. Tapi mereka tidak bisa akses informasi karena saluran internet juga sulit untuk mereka jangkau. Ya, mereka tidak bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam *device* mereka. Ini terjadi karena memang kita tahu Timur Tengah negara yang isolatif. Saya ke sana waktu itu memang akses internet tidak semeriah di sini.” (FGD 12 April 2021, Migrant CARE)

Dalam perspektif interseksionalitas, perempuan pekerja migran di Timur Tengah mengalami tantangan yang khusus dan unik. Mereka rentan karena identitas profesi mereka sebagai pekerja migran. Pekerja migran perempuan yang bekerja di Timur Tengah mayoritas bekerja pada sektor kerja perawatan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Mereka bekerja demi memenuhi ekonomi keluarga. Di negara asing, tidak jarang mereka berada pada kondisi yang terisolasi karena tak dapat berkomunikasi dengan keluarga atau komunitas sesama pekerja migran. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan ekonomi, sehingga mereka tidak menggunakan fasilitas komunikasi—internet. Dalam situasi mereka, biaya komunikasi terbilang mahal, sehingga perlu dikesampingkan.

Tantangan lain adalah kebijakan negara tempat bekerja yang memberikan sejumlah batasan pada akses informasi. Berdasarkan pengalaman dampingan OMS Migrant Care, keadaan ini membuat kondisi pekerja migran semakin rentan. Sebab, keterputusan terhadap komunikasi membuat mereka terpinggirkan dari pengetahuan dan informasi terkait hak mereka sebagai pekerja migran dan terkait perlindungan sosial yang bisa mereka dapatkan dari organisasi dan dari KBRI. Menurut OMS Migrant Care, komunikasi dari KBRI dan dari OMS pemerhati migran umumnya diberikan melalui grup WhatsApp. Namun mayoritas perempuan pekerja migran di Timur Tengah tidak memiliki ponsel. Walaupun mereka memilikinya, ponsel tersebut adalah ponsel biasa, bukan *smartphone*.



Gambar 8. Jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan provinsi (November 2020).

Berdasarkan laporan penetrasi internet yang dirilis oleh APJII (2020), kontribusi penetrasi internet per wilayah tertinggi disumbang oleh Jawa (56,4%), Sumatera (22,6%), Sulawesi (7%), Kalimantan (6,3%), Bali dan Nusa Tenggara (5,2%), serta Maluku & Papua (3%). Mengacu pada data tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi di Pulau Jawa telah baik dan maju. Dalam perspektif interseksionalitas, menjadi penduduk Jawa adalah sebuah privilese jika disertai dengan kapasitas ekonomi dan pendidikan yang baik. Pada kelompok rentan, menjadi penduduk Jawa sekalipun, perempuan tetap tersingkir dari akses terhadap TIK.

Sementara itu, Gita Pertiwi—OMS yang memberikan advokasi pada perempuan marginal khususnya 7 Kabupaten/Kota Solo Raya—mengatakan kelompok dampingan mereka masih banyak yang menghadapi tantangan dari aspek sarana dan prasarana, yaitu kendala pada aspek material/aspek fisik. Berdasarkan pengalaman advokasi yang dilakukan oleh OMS Gita Pertiwi, persoalan ekonomi juga menjadi faktor yang menghambat keterlibatan penuh perempuan dalam menikmati kemajuan TIK.

“Tantangan di kota adalah kalau dia (perempuan miskin kota) tinggal di dalam satu rumah atau tinggal dengan keluarga yang lain, ada beberapa kejadian alat komunikasinya dijual, digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain.” (FGD 12 April 2021, Gita Pertiwi)

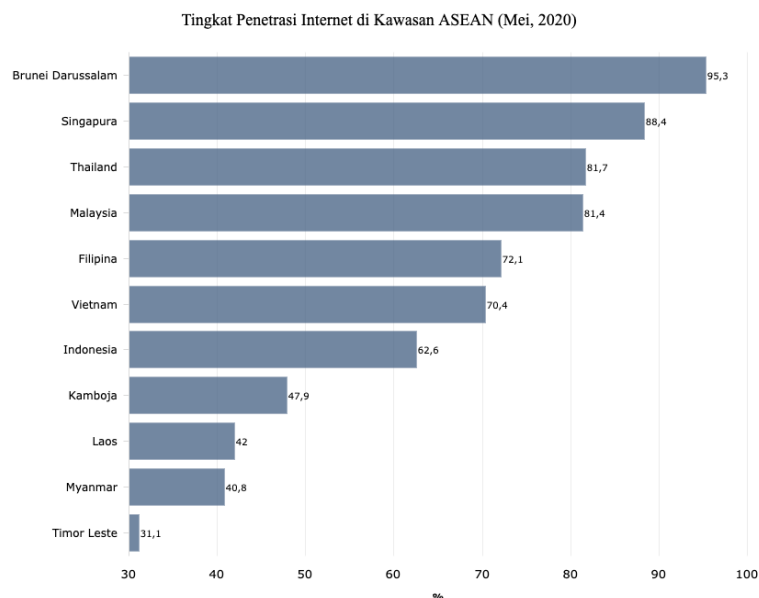
Hal serupa juga dialami oleh perempuan nelayan yang didampingi oleh OMS PPNI. Dalam situasi pandemi, saat kondisi ekonomi keluarga menjadi sulit, tidak jarang perempuan menjual perangkat ponselnya. Narasi dari kelompok perempuan rentan tersebut, selain akibat faktor ekonomi, dipengaruhi pula oleh internalisasi norma gender yang menekankan bagaimana urusan kelangsungan dan perawatan keluarga menjadi tanggung jawab perempuan (Friedan, 1963; Chodorow, 1999). Selain itu, di dalam rumah tangga, perempuan diposisikan sebagai gender kedua, sehingga ketika terjadi krisis, perempuanlah yang akan pertama mengalah atau dikorbankan demi yang lain.

“Untuk konteks nelayan pesisir kota di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, biasanya mereka (suami dan istri) memiliki alat komunikasi sendiri-sendiri. Untuk konteks nelayan rural atau desa, biasanya ada satu alat komunikasi atau bahkan dua. Biasanya, dua itu untuk ayah ibu satu dan untuk anak satu. Biasanya, yang mendominasi adalah nelayan laki-lakinya.” (FGD 12 April 2021, Kiara)

Dengan adanya pandemi, kondisi perempuan nelayan saat ini memang menanggung beban berlapis-lapis. Ditambah, tidak semua perempuan nelayan memiliki ponsel. Seperti yang dialami oleh perempuan miskin kota dampingan Gita Pertiwi serta kelompok perempuan nelayan yang didampingi oleh OMS Kiara dan PPNI, representatif TIKI Papua dan Lappan Maluku juga menyatakan bahwa perempuan mengalami hambatan berlapis pada akses material. Perempuan-perempuan dampingan tersebut rentan karena mereka memiliki pendapatan rendah, berada di pedesaan atau di daerah yang belum terjangkau sarana dan prasarana internet.

Itu terkait lagi dengan geografis wilayah yang sulit. Kita di sini (kota) bisa beli pulsa dengan mudah, tetapi di beberapa wilayah lain, ada persoalan harga pulsa. Jadi, itu repot.... Mitra kami kan korban yang belum mengenal teknologi ini secara baik, karena tidak semua orang punya akses berhubungan dengan informasi digital. Paling HP di sini dibelangnya HP kayu (HP yang bukan *smartphone*/HP kuno) yang macam-macam itu. Selain itu, akses internet berkaitan dengan uang ya. Jadi, mereka (perempuan mitra) akan memilih mana yang prioritas, misalnya membeli pulsa untuk komunikasi atau beli beras sekilo.” (FGD 12 April 2021, Tiki Papua).

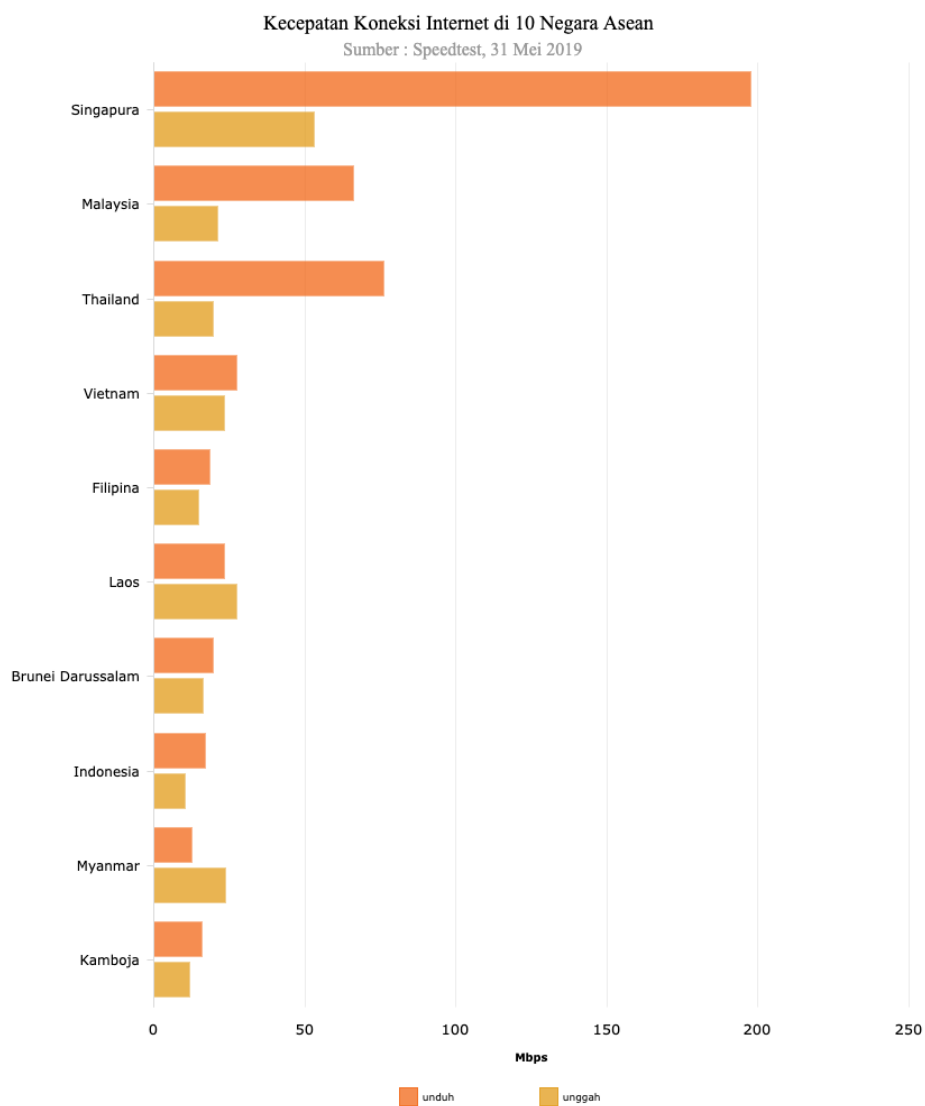
Ketimpangan jaringan internet ini masuk dalam faktor ketersediaan (*availability*). Akses hanya akan diperoleh kalau terdapat ketersediaan. Meskipun seseorang mampu secara ekonomi untuk membeli perangkat atau membayar pulsa, jika jaringan internet tersebut tidak ada, ia tak akan mampu mengakses dan memanfaatkan internet. Kominfo menyebut masih ada 12.548 desa di Indonesia yang belum tersentuh oleh internet.¹ Mayoritas desa yang belum terjangkau tersebut berada di daerah pelosok yang memiliki kondisi geografis atau bentang alam yang relatif sulit dijangkau. Perempuan yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) tentu saja akan mengalami hambatan berlipat dibanding perempuan di tempat lain. Bahkan, tidak hanya mereka yang tinggal di wilayah 3T, mereka yang tidak terisolasi pun sering kali masih mengalami hambatan akses ketika internet lambat atau bahkan tidak ada sama sekali (*blank spot*). Statista mencatat, hingga Mei 2020, tingkat penetrasi internet tertinggi di kawasan Asia Tenggara ada di Brunei Darussalam (95,3%), disusul oleh Singapura dengan tingkat penetrasi 88,4%. Kemudian Thailand, Malaysia, dan Filipina yang masing-masing sebesar 81,7%, 81,4%, dan 72,1%. Indonesia berada di posisi ketujuh di kawasan ini dengan tingkat penetrasi 62,6%. Sedangkan tingkat penetrasi terendah di kawasan ini adalah Timor Leste, yakni 31,1%



Gambar 9. Tingkat penetrasi internet di Asia Tenggara (Mei 2020).

1 <https://bisnis.tempo.co/read/1352697/kominfo-sebut-12-548-desa-belum-tersentuh-sinyal-internet>

Koneksi internet di Indonesia juga masih terbelakang dibanding negara-negara lain di dunia. Menurut data Speedtest Global Index, Indonesia berada di posisi ke-112 dunia dengan rata-rata kecepatan mengunduh (*download*) file sebesar 17,02 Mbps per Mei 2019. Sedangkan untuk rata-rata kecepatan mengunggah (*upload*) file, Indonesia berada di peringkat ke-123 dunia dengan kecepatan sebesar 10,44 Mbps. Di antara negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia hanya unggul dari Kamboja dan Myanmar. Kamboja berada di peringkat ke-117 dunia untuk kecepatan unduh, sedangkan Myanmar di peringkat ke-127. Untuk kecepatan internet ketika mengunggah file, Indonesia berada di posisi terbawah di ASEAN. Singapura merupakan negara yang memiliki koneksi internet terbaik di ASEAN ataupun di dunia, yaitu mencapai 197,5 Mbps untuk mengunduh file dan 53,12 Mbps untuk mengunggah file.



katadata.co.id

databoks

Gambar 10. Kecepatan koneksi internet di ASEAN (Mei 2019).

Di daerah timur Indonesia, masalah infrastruktur sangat menjadi persoalan karena persebaran jaringan internet sangat tidak merata. Dalam perspektif interseksionalitas, pengalaman perempuan di Papua dan Maluku menunjukkan bahwa dalam hal akses terhadap internet, mereka mengalami hambatan berlapis sebagai perempuan; dari wilayah pedesaan, di wilayah timur Indonesia di mana pembangunan belum merata, dan berada di wilayah yang terisolasi dari jangkauan internet. Data persebaran internet yang dirilis oleh APJJI (2020) dan Susenas (2019) hanya sebatas menunjukkan bahwa penetrasi internet paling rendah berada di kawasan timur Indonesia. Namun data tersebut tidak memotret bagaimana kerugian yang ditanggung oleh perempuan karena tak meratanya pembangunan di wilayah tersebut.

“Kalau di pulau-pulau itu sama sekali tidak menggunakan teknologi, karena tidak ada jaringan internet. Kemarin beberapa kali kita bikin kegiatan-kegiatan virtual. Itu jarang mama-mama komunitas dari Pulau Seram yang terlibat. Karena kalau kita ingin mencari sinyal, itu beta pernah jalan sudah pergi 15 km, lalu sinyalnya harus naik gunung lagi. Begitu lihat gunung, sudah capek duluan. Pernah juga di suatu desa, itu HP-nya kami gantung di atas pohon. Begitu HP bunyi, kami lari dan itu sudah ngos-ngosan karena pohonnya tinggi.” (FGD 12 April 2021, Lappan Maluku).

Menurut representatif OMS Lappan Maluku, masih banyak perempuan yang sulit mengakses internet. Banyak daerah yang masih terisolasi merupakan daerah miskin. Berdasarkan pengalaman para representatif OMS diketahui bahwa perempuan mengalami ketimpangan dalam hal aspek material. Pengalaman dampingan OMS Lappan Maluku menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual semakin jauh aksesnya terhadap keadilan. Kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dialami menjadi sulit dan/atau terlambat diproses secara hukum karena wilayah mereka terisolasi dari internet.

Ketimpangan tersebut antara lain terlihat dari kesempatan untuk memiliki perangkat dan internet. Selain itu, sekalipun perempuan telah memiliki akses terhadap perangkat atau internet, dalam keadaan ekonomi sulit, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan akses tersebut. Untuk mereduksi ketimpangan gender digital perlu dilakukan sejumlah upaya. Respons utama yang dilakukan oleh sejumlah OMS adalah dengan memberikan akses material kepada kelompok perempuan. OMS yang memberikan bantuan perangkat serta pulsa internet pada kelompok perempuan antara lain Gita Pertiwi dan Perempuan AMAN.

“Kita juga *support* sarana dan prasarana kerja sama dengan banyak *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kita memberikan *support*, misalnya, sarana teknologinya ada HP kemudian paket pulsa, dan sebagainya.” (FGD 12 April 2021, Gita Pertiwi)

Dukungan pada komunitas perempuan seperti ini harus dimulai dari dukungan material yang paling dasar, yaitu memberikan akses kepada perangkat TIK itu sendiri. Pelatihan, pendidikan,

dan upaya literasi digital lainnya tidak akan bermakna jika mereka tak memiliki perangkat dasar tersebut. Upaya inilah yang dilakukan oleh OMS pendamping perempuan di wilayah-wilayah 3T, seperti yang dilakukan oleh OMS Perempuan AMAN dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota internal mereka yang berada di pelosok Tanah Air.

“Perempuan AMAN mengambil keputusan untuk *men-support* dalam hal kecil, yaitu peralatan komunikasi seperti *handphone*, laptop, komputer. Itu memang sengaja kita *support*. Tujuannya bukan sebagai asistensi kita saja, tetapi karena waktu itu pada tahun 2019 dan 2020 kita sedang dipersiapkan pada agenda-agenda internal kita sebagai Perempuan AMAN, yaitu rapat kerja nasional, kongres yang pada minggu ini akan dilaksanakan.... Saat ini, ada 58 wilayah pengorganisasian yang tersebar di 6 region. Namun untuk *support handphone* itu memang masih belum sepenuhnya, masih 40-50%-nya saja.” (FGD 12 April 2021, Perempuan AMAN)

Persoalan yang dihadapi kelompok-kelompok perempuan sangatlah kompleks. Ketimpangan gender digital dialami oleh perempuan karena kelit kelindan kategori identitas yang melekat pada dirinya. Gender perempuan sudah menjadi tantangan pertama dalam kaitannya dengan akses internet. Berdasarkan pengalaman pendampingan OMS tersebut, setidaknya ada beberapa interseksionalitas identitas yang menimbulkan tantangan berlipat pada perempuan, yaitu identitas gendernya, pendapatan dan daya beli yang rendah, serta lokasi geografis tempat tinggalnya (desa, pedalaman, atau pulau). Gita Pertiwi dan Perempuan AMAN dalam hal ini merespons ketimpangan digital dengan memberikan akses material kepada kelompok perempuan. Sebab, memiliki akses fisik terhadap perangkat dan internet adalah syarat paling dasar dalam mendukung keterlibatan perempuan terhadap TIK.

2.3. Hambatan Keterampilan

Hambatan pada akses material terhadap dunia digital merupakan gambaran situasi ketimpangan digital tingkat kedua setelah hambatan motivasi. Pada ketimpangan digital tingkat ketiga, persoalan sudah beranjak dari isu kepemilikan atas perangkat dan konektivitas internet menjadi penguasaan teknis dan keterampilan dalam TIK. Berdasarkan hasil diskusi terarah, diketahui bahwa perempuan dari kelompok rentan juga menghadapi ketimpangan terkait keterampilan TIK. Ketimpangan ini banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan secara luas. Hal ini terkait bagaimana kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait TIK. Laporan APEC (2019) menunjukkan bahwa di Amerika Serikat tingkat akses internet relatif setara. Menurut laporan tersebut, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal yang juga sudah setara. Sebaliknya, makin timpang tingkat pendidikan, semakin buruk pula kondisi ketimpangan gender digital yang dialami.

Semakin tinggi tingkat edukasi seseorang, makin tinggi pula kesempatannya mengakses dan menguasai TIK. Sebaliknya, semakin rendah tingkat edukasi seseorang akan makin

mungkin mereka mengalami kesenjangan digital (Sanders & Scanlon, 2021). Di Indonesia sendiri, kesenjangan dalam pendidikan masih dialami, khususnya bagi perempuan dengan ekonomi lemah dan dari kelompok pedesaan. Berdasarkan Susenas dalam Kemennppa (2019), dari tahun 2015-2019 tingkat melek aksara perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pada rentang usia 15-59 tahun, ketimpangan gender melek huruf berkisar 1,15% atau setara 1.281.208 perempuan tidak melek aksara.

“Misalnya, kami melakukan studi atau survei-survei kalau melibatkan petani atau masyarakat lokal. Mereka tidak bisa melakukan survei lewat Google Form atau survei-survei *online*, melainkan harus lewat telepon atau datang langsung ke mereka. Selain persoalan akses fisik, juga tentunya ini terpengaruh oleh faktor dari pendidikan (FGD 12 April 2021, GIZ).

Rendahnya tingkat dan mutu pendidikan berdampak pada akses dan penguasaan TIK seseorang. Sebab, kemampuan untuk mempelajari dan menguasai TIK menuntut penguasaan pada pendidikan dasar seperti baca tulis dan bahasa. Oleh sebab itu, dalam menganalisis ketimpangan gender digital, perlu dilihat bagaimana isu ketimpangan gender secara luas, termasuk dalam pendidikan yang memengaruhi kurangnya kemampuan dan kesempatan untuk mengakses TIK (Makinen, 2006). GIZ dan Rahima menyatakan bahwa ada keterkaitan antara rendahnya pendidikan dan kesempatan akses TIK pada kelompok rentan.

“Pemanfaatan TIK erat kaitannya soal pendidikan dan kesadaran perempuan, bagaimana mereka dengan sadar menggunakan media digital untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, bukan menjadi objek atau bahkan korban pendidikan.” (FGD 12 April 2021, Rahima)

Lebih jauh, berdasarkan FGD diketahui bahwa seluruh OMS mendapati bahwa adanya hambatan penguasaan teknis pada TIK dialami oleh kelompok perempuan yang mereka dampingi/advokasi. Seluruh OMS menyoroti bahwa perlunya peningkatan pada aspek literasi digital pada kelompok perempuan. Merespons persoalan tersebut, beberapa OMS telah melakukan pelatihan dan asistensi bagi kelompok-kelompok dampingan/kelompok yang mereka advokasi. OMS Rahima, GIZ, Migrant Care, Gita Pertiwi, Kiara, PPNI, dan Perempuan AMAN telah melakukan sejumlah pelatihan digital terhadap kelompok dampingannya. OMS mengenalkan perangkat, penggunaan terhadap perangkat, dan cara mengoperasikan sejumlah aplikasi yang relevan terkait pengembangan kapasitas kelompok perempuan.

Rahima menyatakan bahwa saat ini, khususnya di masa pandemi, ceramah-ceramah banyak dilakukan secara daring. Namun, karena ulama perempuan masih banyak yang belum menguasai teknologi, masih sedikit perempuan ulama yang terlibat dalam ceramah *online*. Kegagapan dalam teknologi ini menjadi persoalan serius. Sebab, saat ini kehidupan publik banyak terjadi di dunia *online*. Dalam kasus Rahima, terlihat bahwa perempuan tersingkir dari ruang publik digital karena tidak dapat menguasai TIK.

“Hambatan yang kami alami bahwa tidak semua perempuan ulama ini melek teknologi. Jadi, kami terkesan belum begitu banyak melibatkan perempuan ulama karena mereka biasa ceramah *offline*. Ketika harus berhadapan secara *online*, ini menimbulkan berbagai persoalan. Tidak semua perempuan ulama melek teknologi.” (FGD 12 April 2021, Perempuan Rahima)

Migrant Care juga menunjukkan bahwa ada ketimpangan pada literasi digital antara perempuan pekerja migran yang berada di wilayah Timur Tengah dan non-Timur Tengah. Perempuan pekerja migran non-Timur Tengah seperti Hong Kong dan Singapura sudah memiliki literasi digital yang sangat baik. Sementara perempuan pekerja migran di negara Timur Tengah 37% tidak memiliki perangkat. Di sana teknologi komunikasi yang dikenal masih sebatas SMS.

“Sebagian besar (perempuan pekerja migran di Timur Tengah) berkomunikasi dengan *Short Message Service* (SMS). SMS saat ini sudah mulai ditinggalkan, tetapi ternyata teman-teman kita yang bekerja di Timur Tengah harus berkomunikasi lewat aplikasi pengirim pesan yang kita anggap tradisional atau kuno.” (FGD 12 April 2021, Migrant Care)

Menurut Migrant Care, ketimpangan penguasaan teknologi ini bermasalah dan berpotensi membuat posisi perempuan pekerja migran semakin rentan karena keterputusan dari informasi (Ariste, Evi, Susilo, 2020). Informasi adalah salah satu modal agar perempuan pekerja migran lebih berdaya. Dengan menguasai TIK, mereka dapat mengakses data layanan bantuan, memahami hak mereka sebagai pekerja, mengetahui ke mana melaporkan pelanggaran hak kerja, dan lain sebagainya. Namun, dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan TIK, mereka tereksklusi dari potensi pemberdayaan tersebut. Gita Pertiwi dan Perempuan AMAN melihat bahwa ketimpangan keterampilan digital dipengaruhi faktor bahasa yang digunakan dalam aplikasi. Perempuan pedesaan dan perempuan adat terkendala faktor tersebut.

“Masih ada (hambatan bahasa, baca, dan tulis). Memang, kawan-kawan perempuan adat masih banyak juga yang menggunakan bahasa daerahnya. Jadi, belum berani bicara menggunakan bahasa Indonesia karena takut salah. Jangankan (penggunaan internet dan aplikasi) bahasa Inggris, mungkin beberapa dalam bahasa Indonesia juga sulit.” (FGD 12 April 2021, Perempuan AMAN)

Merespons ketimpangan pada penguasaan (akses material) dan keterampilan TIK, penelitian ini menemukan bahwa hampir seluruh responden FGD telah melakukan kegiatan/program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas terhadap kelompok-kelompok perempuan tersebut (lihat tabel 8). GIZ, Gita Pertiwi, Kiara, HWDI, Perempuan AMAN, PPNI, dan KPI melakukan sejumlah pelatihan serta asistensi secara aktif terhadap kelompok perempuan rentan.

Tabel 8. Tabel Hambatan Pemanfaatan TIK Kelompok Perempuan Rentan Berdasarkan Pengalaman Pendampingan OMS

Organisasi	Kelompok yang Diadvokasi	Akses Material	Keterampilan	Motivasi/Mental
Rahima	Perempuan Ulama	V	V	-
GIZ-Gender Vocal Point Indonesia & Timor Leste	Perempuan dalam Digitalisasi (Khususnya Sektor Pariwisata)	-	V	V
Migrant Care	Perempuan Pekerja Migran	V	V	-
Gita Pertiwi	Perempuan Petani, Perempuan Miskin Kota, Perempuan Perajin, Perempuan Kepala Keluarga	V	V	-
Kiara	Nelayan	V	V	V
HWDI	Kelompok Difabel	-	V	-
TIKI Papua	Perempuan Korban Pelanggaran HAM Papua	V	V	-
Perempuan Aman	Perempuan Adat	V	V	-
Lappan Maluku	Perempuan dan Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual	V	V	-
PPNI	Perempuan Nelayan	V	V	V
KPI	Perempuan Miskin dan Marginal	V	V	-

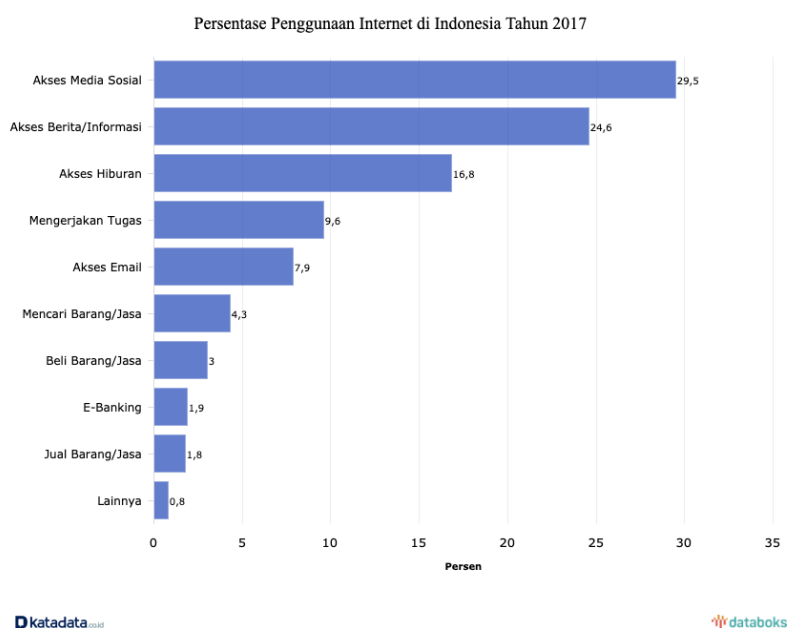
Sumber: Diolah dari data FGD 12 April 2021

Berdasarkan kerja advokasi yang dilakukan OMS, terdapat sejumlah pemberdayaan keterampilan yang dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan. *Pertama*, melalui pelatihan dan pendampingan untuk mengoperasikan perangkat dan aplikasi. *Kedua*, pelatihan keterampilan untuk mencari informasi melalui TIK dan pemberdayaan keterampilan. *Ketiga*, keterampilan memberikan informasi. Pada aspek ini, OMS membantu kelompok dampingan mereka untuk menggunakan TIK dalam upaya mencapai tujuan perbaikan posisi dalam masyarakat. Beberapa contoh pemberdayaan ekonomi berbasis digital yang dilakukan oleh OMS dapat dilihat pada kerja yang dilakukan oleh PPNI dan Gita Pertiwi.

“Kami berusaha untuk memberi penguatan kapasitas melalui beberapa kegiatan.... Melalui kegiatan-kegiatan *online* Zoom dsb., kawan-kawan UMKM di Demak atau tempat-tempat lain ada kelas rumah BUMN yang difasilitasi di masing-masing tempat. Pada kegiatan itu dilatih bagaimana menggunakan teknologi digital dengan baik; bagaimana cara pemasaran, manajemen, dsb. Pelatihan semacam itu sangat membantu ketika saat pandemi ini. Pasar yang paling membantu supaya untuk tidak terlalu terpuruk adalah pasar *online* yang tetap kita bisa melakukan seperti biasanya. Justru malah ada peningkatan pendapatan dari UMKM, itu bisa terbantu dari pasar-pasar *online* yang banyak difasilitasi era digital saat ini. Namun ini tidak berlaku untuk perempuan atau komunitas yang tidak mampu menguasai teknologi atau hambatannya tadi tidak punya HP, tidak ada sinyal, dsb.” (FGD 12 April 2021, PPNI)

“Untuk perempuan-perempuan di desa atau di kota yang punya usaha ekonomi, pemberian sarana dan penggunaan digital teknologi sangat bermanfaat bagi mereka. Ini untuk membangun promosi, jaringan kerja sama untuk pengembangan usaha.” (FGD 12 April 2021, Gita Pertiwi)

Data menunjukkan bahwa 64,5% dari total UMKM Indonesia dikelola oleh perempuan. Namun, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari separuh pelaku UMKM perempuan belum berjualan *online*. Padahal, melakukan usaha dengan basis digital menjadi hal yang penting bagi pemberdayaan ekonomi perempuan. Sebab, 80% dari UMKM yang menerapkan teknologi digital mengalami kenaikan omzet. Menurut Google, alasan mengapa masih banyak perempuan pelaku UMKM belum melakukan bisnis *online* karena urusan kerja rumah tangga. Banyak di antara mereka yang merasa khawatir tidak fokus pada urusan keluarga jika mengembangkan bisnis (Burhan, 2020). Artinya, norma gender terkait pembagian kerja dalam keluarga merupakan tantangan pemberdayaan perempuan. Potensi ekonomi perempuan menjadi terhambat karena perempuan menanggung beban kerja ganda. Fakta ini tidak mengherankan ketika kita melihat dominasi penggunaan internet di Indonesia adalah untuk aktivitas sosial (media sosial dan hiburan) dibanding aktivitas ekonomi lainnya.



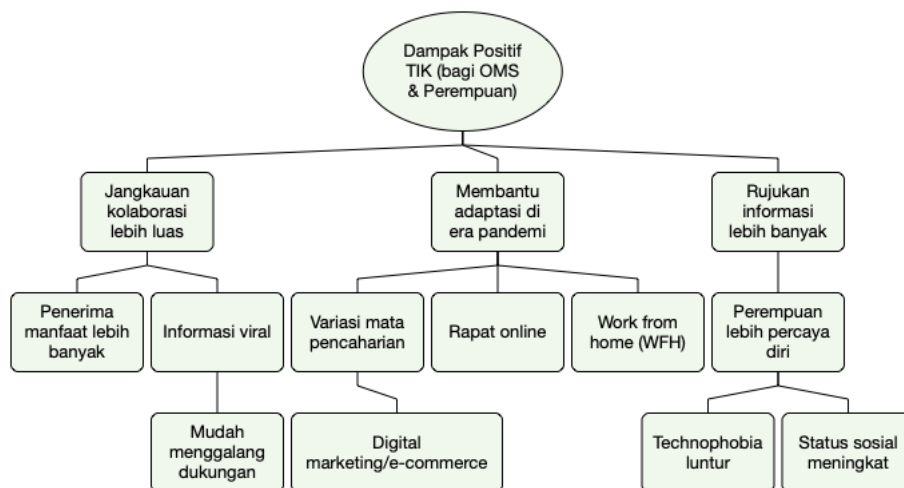
Gambar 11. Penggunaan internet di Indonesia (2017).

Berdasarkan paparan terkait ketimpangan keterampilan digital yang dialami oleh kelompok perempuan marginal, selain ketimpangan digital tahap pertama yakni terkait akses fisik, perempuan juga mengalami ketimpangan digital tahap kedua mengenai aspek keterampilan. Hal ini berkaitan erat dengan literasi dasar yang belum menyentuh kelompok perempuan rentan. Kedua tahap ketimpangan tersebut kemudian berdampak pada ketimpangan digital tingkat ketiga, yakni dalam aspek yang lebih luas terkait ketimpangan pada politik, sosial,

ekonomi, masyarakat sipil, dan lainnya. Sebab, seperti telah ditargetkan oleh UN (2020), akses dan partisipasi perempuan dalam TIK merupakan sarana untuk mendorong kesetaraan dan inklusi. Pemanfaatan penuh terhadap TIK dapat menjadi alat bagi kelompok terpinggirkan untuk mengubah situasi sosial mereka.

3. Dampak Positif TIK bagi Perempuan

Penelitian ini menggali lebih jauh bagaimana pemanfaatan TIK oleh OMS dan perempuan. Hasil studi menemukan bahwa TIK memberikan lebih banyak manfaat, baik kepada OMS maupun perempuan. Dengan catatan, mereka memiliki akses terhadap TIK tersebut, khususnya terhadap perangkat internet dan telepon pintar. Jika diuraikan, setidaknya ada tiga manfaat utama yang dirasakan secara langsung oleh informan kunci dalam studi ini. *Pertama*, TIK membantu OMS dan perempuan untuk memperluas jejaring kolaborasi menjadi lebih luas. Bagi OMS, kegiatan mereka tidak lagi hanya menjangkau lingkungan sekitar atau komunitas yang dapat dikunjungi secara fisik, tetapi juga komunitas-komunitas baru, bahkan yang lokasinya paling jauh sekalipun. Selama mereka bisa terhubung dengan internet, kolaborasi bisa diciptakan. Di samping itu, pendengar dan penerima manfaat dari agenda-agenda OMS juga menjadi lebih luas. Terlebih, ketika mereka mengadakan kampanye atau advokasi terhadap isu-isu perempuan yang sedang hangat atau mendesak, kehadiran TIK akan membantu mereka mendapatkan dukungan publik yang lebih luas dan relatif cepat.



Gambar 12. Dampak positif TIK bagi OMS dan perempuan.

Kedua, kehadiran TIK juga diakui membantu OMS dan perempuan untuk beradaptasi di era pandemi Covid-19. Salah satu bentuk adaptasi yang paling kentara adalah ketika kebijakan pembatasan sosial diterapkan, hampir semua pekerjaan dilakukan dari rumah (*work from home*/WFH). Kebiasaan baru WFH ini menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok bagi OMS ataupun perempuan pekerja (praktisi & aktivis/politisi). Tanpa akses terhadap internet,

pekerjaan akan sangat sulit diselesaikan. Bagi perempuan kelas menengah dan atas yang tidak memiliki kendala terhadap akses internet, WFH membuat intensitas pertemuan dengan keluarga, khususnya anak-anak, menjadi semakin tinggi dan baik. Hal ini menjadi dampak positif tidak langsung dari pemanfaatan TIK untuk WFH. Bagi OMS dan perempuan umumnya, terutama yang menjalankan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), kehadiran TIK jelas sangat membantu, terutama dalam hal pemasaran dan penjualan. Keduanya kini dilakukan secara *online* melalui media sosial ataupun grup-grup percakapan di telepon pintar masing-masing. Fenomena ini dapat kita sebut sebagai variasi mata pencaharian yang muncul di tengah pandemi. Bahkan, tak jarang ada yang menyebut sebagai “berkah di tengah musibah”, manakala terjadi pandemi, banyak usaha kecil (bahkan usaha baru) terbantu karena peningkatan konsumsi dan belanja *online* dari individu atau rumah tangga, terutama yang tinggal di daerah perkotaan. Usaha-usaha kecil ini rata-rata dikelola dan digawangi oleh perempuan.

Ketiga, bagi OMS yang aktif mendampingi perempuan, kehadiran dan perkembangan TIK telah membantu mereka menjadi lebih dekat kepada kelompok-kelompok perempuan atau komunitas yang didampingi. Mereka menjadi tempat rujukan baru yang mudah dijangkau oleh kelompok perempuan rentan. Hal ini tentu menggembirakan karena sebagian perempuan yang selama ini sulit mendapatkan dukungan di luar lingkungan fisiknya dapat menemukan *system support* lain di luar keluarga intinya. Bahkan, di tingkat paling sederhana, misalnya untuk mendapatkan informasi tepercaya, perempuan dan publik pada umumnya dapat lebih mudah mengakses informasi dari rujukan yang mereka percaya atau yang selama ini mendampingi mereka. Dengan demikian, dampak tidak langsungnya adalah kepercayaan diri perempuan ikut meningkat dengan informasi dan jejaring baru yang dimilikinya. Hal ini juga secara langsung membantu mengikis stigma bahwa perempuan gagap teknologi. Kepemilikan dan penguasaan perangkat TIK tertentu, seperti telepon pintar, juga dapat meningkatkan keterampilan pemilikinya, sehingga ia dapat memanfaatkan perangkat tersebut untuk kepentingan sosial (berjejaring) ataupun ekonomi (berbisnis). Pada akhirnya, aktivitas yang membawa manfaat itu secara tak langsung juga akan mengangkat derajat dan status sosial perempuan jika usaha yang ditekuninya itu dianggap berhasil.

4. Dampak Negatif TIK bagi Perempuan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tentu tidak hanya membawa manfaat positif bagi OMS dan perempuan, tetapi juga mengandung berbagai risiko dan eksek negatif yang mungkin menyertai. Dampak negatif yang paling sering disorot oleh informan dalam diskusi terfokus ataupun wawancara adalah terkait penyebaran informasi bohong/palsu atau dikenal sebagai hoaks. Informasi bohong yang menyebar hampir tak terbendung di era kelimpahan informasi ini tak jarang juga menyasar perempuan dan menjadikan mereka korban (Gelgel, *et al.*, 2020). Fenomena ini sejalan dengan pendapat dan hasil studi lain di mana media sosial banyak memuat informasi palsu yang merugikan individu, bahkan dapat memperlemah

solidaritas sosial di tengah masyarakat itu sendiri (Prayitno & Khoirunurrofik, 2020).

Selain penyebaran berita bohong, masalah lain yang menjadi dampak negatif TIK, khususnya internet, adalah adanya akses kepada situs-situs pornografi. Selain dianggap membahayakan anak-anak dan generasi penerus, di balik tingginya akses pornografi di internet ini, terdapat kejahatan perdagangan manusia dan kekerasan seksual lainnya yang tak lain korban utamanya adalah perempuan dan anak-anak itu sendiri. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI sendiri mengungkapkan bahwa banyak sekali aduan konten negatif yang masuk dari laporan masyarakat adalah berisi situs-situs pornografi. Sebagai ilustrasi, pada bulan Januari 2020, Kominfo telah menerima 21.305 temuan konten negatif yang beredar di dunia maya, yang didominasi oleh konten perjudian sebesar 14.726 temuan dan konten pornografi 5.948 temuan.² Hal ini juga diperkuat dari temuan survei KPAI bahwa 22% anak-anak Indonesia aktif menonton konten pornografi dari internet selama pandemi.³ Kondisi ini tentu membawa kekhawatiran tersendiri, baik bagi kalangan OMS pendamping perempuan dan anak maupun bagi perempuan dan anak itu sendiri yang berpotensi menjadi korban.

“Untuk penggunaan internet sendiri, pastinya ada hambatan kalau ada penyebaran informasi yang bohong atau hoaks. Adanya akses kepada situs-situs porno atau berbahaya dan adanya kemungkinan kejahatan cyber. (FGD 12 April 2021)

Di samping konten hoaks dan pornografi yang mudah diakses di internet, informan kunci dalam studi ini juga menyampaikan beragam dampak negatif dari penggunaan TIK, khususnya di era pandemi yang memaksa setiap orang dan organisasi untuk beradaptasi dengan perangkat digital. Konsolidasi OMS yang memiliki skala dan lingkup kerja nasional tampaknya merasakan efek dunia serba-*online* yang tidak selalu positif. Terutama dalam hal energi, waktu, dan efektivitas konsolidasi jejaring. Sebagai contoh, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) secara daring ternyata jauh lebih lama dan lebih menguras energi dibandingkan dengan metode luring (sebelum pandemi). Banyak sekali waktu yang diperlukan untuk rapat-rapat konsolidasi per provinsi hingga menghabiskan total enam bulan. Hal ini tentu saja menjadi kurang efektif bagi gerak dan aktivitas organisasi.

“Ini pengalaman koalisi perempuan, di mana KPI melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama tiga bulan dan persiapannya selama satu bulan. Bahkan, persiapan-persiapan yang lebih lagi, karena kita besar dan kita tidak mungkin melakukan Rakernas dengan metode *online*, sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengonsolidasikan dahulu per region dan itu juga dilakukan secara *online*. Bagaimana Sumatera kita gali dahulu, bagaimana Jawa, dll., sehingga itu membutuhkan proses panjang. Kalau boleh dihitung, proses Rakernas KPI hampir mencapai enam bulan, sampai dengan selesai karena proses *online* ini.” (FGD 12 April 2021)

2 https://kominfo.go.id/content/detail/24960/kominfo-aduan-konten-negatif-didominasi-pornografi/0/sorotan_media

3 <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/16/11564091/kpai-22-persen-anak-menonton-tayangan-bermuatan-pornografi-saat-pandemi?page=all>

Selain efektivitas dan waktu persiapan konsolidasi *online* yang lebih panjang, masalah lain yang muncul tentu terkait dengan ketimpangan akses dan keterampilan perempuan atau OMS dalam memanfaatkan TIK itu sendiri. Meski pandemi sudah berjalan satu tahun, tidak lantas semua memiliki akses terhadap perangkat TIK yang diperlukan. Beberapa daerah bahkan tidak memiliki infrastruktur dasar seperti jaringan internet. Bagi mereka yang memiliki akses jaringan internet, faktor keterampilan dan pengetahuan tentang berbagai platform digital juga masih menjadi kendala yang sangat umum dan hampir merata, khususnya di luar Jawa. Aspek pengetahuan dan keterampilan ini memang membutuhkan waktu dan pendampingan untuk dapat meningkat lebih cepat. Di sinilah salah satu peran kunci OMS, selain mendampingi dari sisi substansi (isu-isu strategis perempuan), mereka juga secara langsung harus melakukan pendampingan aspek teknis (meningkatkan pengetahuan dan keterampilan) agar partisipasi perempuan ini semakin meningkat.

“Kami memastikan sekali teknis-teknisnya, supaya kawan-kawan bisa tetap hadir walaupun *online*. Tantangan-tantangan masih banyak, masih ditemukan yang takut-takut untuk mencet, *mute*, dan *unmute* masih ada, meskipun jumlahnya sangat berkurang jauh. Karena bisa dibayangkan teman-teman malah *eager*-nya luar biasa. Mereka senang sekali sekarang sudah bisa aplikasi-aplikasi *online* ini.” (FGD 12 April 2021)

Dampak negatif lain yang menjadi *concerns* partisipan adalah terkait keamanan data pribadi dan data kependudukan lainnya. Masalah keamanan data pribadi ini dianggap masih sangat jarang dibicarakan dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Banyak sekali fenomena di lapangan terkait dengan keamanan data pribadi yang belum mendapat perhatian. Sebagai contoh, pinjaman *online* (pinjol) yang bermunculan dan tak sedikit memakan korban kaum perempuan ini secara terang-terangan mengoleksi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan data pribadi lain dari nasabahnya. Demikian pula ketika ingin mendapatkan layanan dari platform digital, baik yang legal maupun ilegal, orang selalu diminta untuk mengunggah data pribadi tanpa tahu pasti apakah data itu akan aman atau tidak. Bahkan, data kependudukan yang dikelola oleh platform milik pemerintah, seperti BPJS Kesehatan, saja masih bisa bocor⁴, dan kebocoran itu ditaksir merugikan negara hingga Rp 600 triliun⁵.

“Dari Kementerian Dalam Negeri memperbolehkan platform-platform *marketplace* untuk bisa mengakses data KTP dari WNI. Ini baru saya lihat beritanya kemarin. Itu kan sesuatu yang berbahaya, di mana data kita yang sudah terdigitalisasi dalam KTP elektronik ini kalau misalnya bisa diakses oleh pihak ketiga perusahaan dll. itu kan bisa berbahaya jika bocor.” (FGD 12 April 2021)

Proteksi data pribadi dan kependudukan ini tentu bukan persoalan sederhana dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab, data ini adalah aset utama di era digital. Bahkan, banyak orang menyebut data di era digital ini setara nilainya dengan minyak bumi di era industrial (*data is*

4 <https://teknokompas.com/read/2021/06/11/13040057/kasus-kebocoran-data-279-juta-wni-bpjs-kesehatan-akan-digugat-lewat-ptun?page=all>

5 <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun>

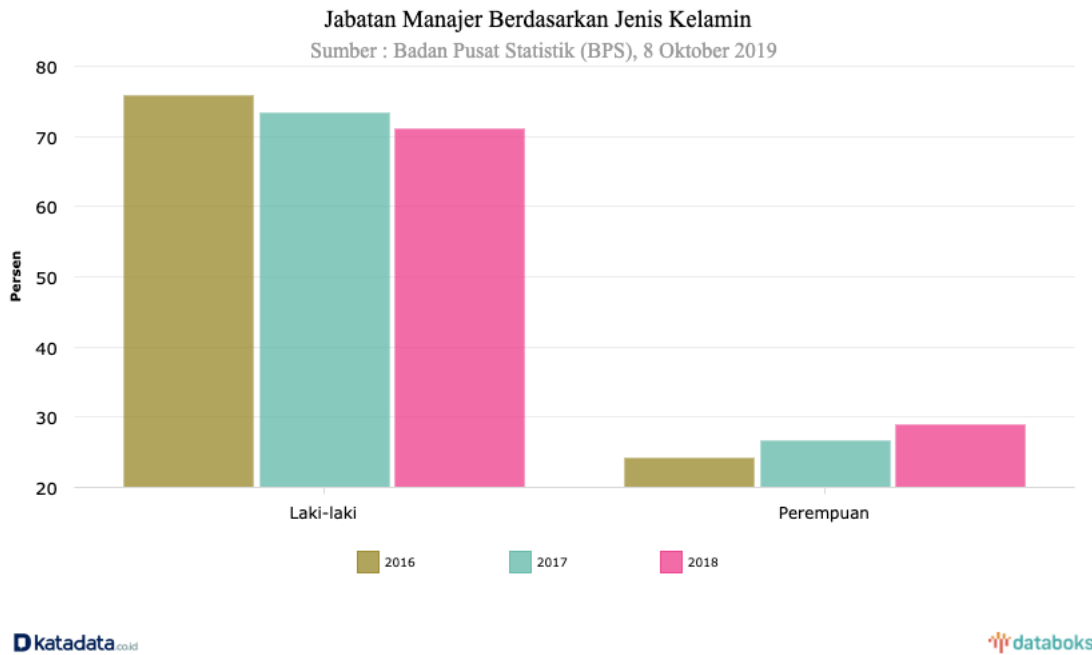
the new oil of the digital era). Demikian penting dan strategisnya perlindungan data pribadi ini, semua pihak (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil) seharusnya duduk bersama dan memikirkan risiko serta mengantisipasi berbagai dampak negatif yang mungkin muncul di masa mendatang. Selain membuat regulasi yang tepat, termasuk dalam tindakan preventif, pemerintah tentu saja harus membekali masyarakat, terutama perempuan, dengan berbagai pengetahuan mendasar tentang *digital security* dan hak-hak mereka dalam dunia digital.

“Ada satu hal yang menurut kami penting terkait dengan regulasi *data protection* di isu digitalisasi ini, karena kami di GIZ harus patuh terhadap peraturan *General Data Protection Regulation* (GDPR) dengan Uni Eropa. Jadi, kita dalam aspek digitalisasi tidak bisa semena-mena menggunakan aspek digital tanpa bertanya kepada para *beneficiaries* terkait kesediaan mereka. Saya rasa itu hal yang penting untuk di-*raise awareness*. Khususnya di Indonesia, isu tersebut juga ada di RUU Perlindungan Data Pribadi.” (FGD 12 April 2021)

5. TIK dan Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja

Ketimpangan gender dalam dunia kerja masih mendominasi dalam berbagai laporan, termasuk di dalamnya bagaimana kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dianggap masih belum setara (Miller, 2009). Bahkan, dalam banyak laporan juga ditemukan ketimpangan dari sisi pendapatan antara laki-laki dan perempuan, meski mereka menempati posisi yang sama atau memiliki keahlian dan kontribusi yang sama (Boll & Lagemann, 2014). Meski demikian, kondisi ini perlahan-lahan mengalami perbaikan positif, khususnya bagi kaum perempuan. Seperti dituturkan oleh NY, seorang perempuan praktisi IT yang bekerja di dunia perbankan, komposisi pekerja perempuan di tempatnya bekerja sudah cukup berimbang (laki-laki 55% dan perempuan 45%). Bahkan, posisi-posisi strategis dalam perusahaan sudah banyak diduduki oleh perempuan. Artinya, peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk berkarier relatif setara. Hal ini sesuai dengan tren yang berkembang bahwa perempuan semakin banyak memiliki kesempatan dan dipercaya untuk duduk dalam kursi manajer.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jabatan manajer di perusahaan-perusahaan Indonesia masih didominasi laki-laki. Dalam rentang 2016-2018, angka tertinggi ada di 2016 sebesar 75,83%. Sebaliknya, hanya 24,17% jabatan manajer yang diisi oleh perempuan. Meskipun laki-laki masih mendominasi jabatan manajer, jumlahnya mulai berkurang perlahan pada 2017 dan 2018. Masing-masing sebesar 73,37% dan 71,03%. Kepercayaan terhadap perempuan untuk mengemban tugas sebagai manajer pun bertambah. Pada 2017, sebanyak 26,63% perempuan menjabat sebagai manajer. Tahun berikutnya persentasenya naik menjadi 28,97%.



Gambar 13. Perempuan perlahan semakin dipercaya menduduki posisi manajer (2016-2018).

“Kalau di BCA Digital ini, kayaknya cewek itu 45%, cowok 55%. Cuma kalau di BCA Digital ini, pimpinan tertingginya itu cewek, CEO-nya cewek, komisarisnya juga dua cewek satu cowok. Jadi, kalau yang di BCA Digital ini, saya lumayan *ngerasain* kesetaraan gender. Saya banyak dialog sama CEO karena memang kerjanya *report* langsung ke CEO. Ya, salah satu semangat yang dikembangkan di BCA Digital ini adalah inklusivitas, termasuk kesetaraan. Semua karyawan punya kesempatan yang sama buat berkarya, gitu. Tapi kalau misalnya soal *salary*, ya kayaknya aku lihat di *report-report*, kalau cowok itu masih *salary*-nya lebih tinggi, gitu. Kecenderungan untuk mendapatkan *salary*-nya lebih tinggi.” (Wawancara NY, Juli 2021)

Tidak hanya kesempatan berkarier yang semakin terbuka, kebijakan-kebijakan khusus untuk perempuan seperti cuti hamil juga sudah diadopsi oleh perusahaan tempat NY bekerja. Kondisi ini sangat membantu dan disyukuri oleh NY. Kesetaraan gender dalam dunia kerja seperti ini tentu bukan hanya karena peran perempuan, tetapi juga andil dari keterbukaan laki-laki dalam menerapkan kebijakan yang sensitif gender. Sensitivitas semacam itu diasah dan dimulai dari perilaku sehari-hari dalam menciptakan relasi kerja yang tidak memandang rendah salah satu gender. Hal ini diakui oleh FP, praktisi IT yang telah berkecimpung di dunia IT dan berinteraksi dengan banyak perempuan di perusahaannya.

“Iya betul, kita lihat antusiasme anak-anak zaman sekarang terhadap dunia digital sudah berbeda *landscape*. Makanya, kita mencoba mendorong kalau misalkan memang wanita enggak kalah lebih hebat dibandingkan dengan pria secara kualitas, ya kenapa enggak.

Makannya, kita dorong untuk sama-sama, yang penting mereka itu tahu apa *goals* perusahaan. Apa yang mereka kerjakan ya kita belajar sama-sama di sini. Jadi, kita enggak ada yang namanya siapa yang paling tinggi. Kita komunikasinya enggak *talk down* gitu. Kita mencoba untuk komunikasinya itu ya kita bangun sama gitu. Jadi, kita enggak mau komunikasi *talk down*.” (Wawancara FP, Juli 2021)

Respek dan menghargai rekan kerja tanpa melihat latar belakang, posisi, dan perbedaan gender adalah awal mula dari membangun atmosfer lingkungan kerja yang ramah gender dan ramah perempuan. Keadaan seperti ini tentu harus diciptakan dan dikondisikan sejak awal, bahkan sejak penerimaan karyawan atau staf baru. Seperti diungkapkan oleh DI, dalam melakukan perekrutan karyawan, perusahaan juga menilai pandangan calon karyawan terhadap beragam perilaku yang diskriminatif. Proses ini penting dilakukan sejak awal untuk memberikan pemahaman bahwa perusahaan atau tempat kerja mendukung kesetaraan gender dan menghargai hak setiap orang.

“Misalkan dalam wawancara pekerjaan juga pasti akan saya tanyakan. Kemarin juga kami mencari staf keuangan, gitu ya. Saya tanyakan juga, ‘Kalau kamu melihat ada perempuan cantik lewat, kemudian (laki-laki) *catcalling, suit, suit tuh* bagaimana?’, gitu. Kami tidak akan terima ketika dia bicara ini. ‘Ya itu hal yang wajar, Mbak.’ Oh, ini berarti enggak cocok.” (Wawancara DI, Juli 2021)

Kemajuan TIK juga menghadirkan peluang dan tantangan baru dalam dunia kerja. Tantangan tersebut tidak hanya dihadapi pekerja laki-laki, tetapi juga perempuan. Otomatisasi dan perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah menghadirkan ancaman yang serius terhadap beberapa sektor pekerjaan. Berdasarkan studi Universitas Oxford (2013), sekitar 47% pekerja di Amerika Serikat terancam tergantikan oleh AI. Perkembangan semacam ini juga sudah disadari oleh OMS dan kaum perempuan, terutama mereka yang menjadi praktisi dalam dunia IT. Seperti dinyatakan oleh LA, banyak pekerjaan akan menghadapi ancaman yang sama. Mulai dari jurnalis hingga asisten rumah tangga.

“Nah, persoalannya kan kalau dia tidak punya akses gitu. Kalangan kelas menengah atas ini terbantu dengan adanya teknologi. Tapi untuk kelas bawah kan itu enggak bisa, kerja-kerja yang misalnya kerja pabrik ya atau kerja PRT. Itu kan enggak bisa dilakukan dengan teknologi gitu *Iho, Mbak*. Ya, kan? Kalau PRT tuh nanti akan ada. Revolusi lima titik kosong itu kan ada robot kan, Mbak. Jadinya, nanti diganti oleh robot gitu. Tapi pengganti itu kemudian menafikan pekerja gitu. Jadi kita tuh juga mesti hati-hati tuh, Mbak, menjawab ini karena kalau nanti ada AI tuh ya. Itu juga akan menggantikan posisi wartawan gitu *Iho*.” (Wawancara LA, Juli 2021)

Di samping hadir sebagai ancaman, kemajuan TIK dan AI secara umum sebenarnya juga menghadirkan peluang bagi sebagian pekerja. Akan banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah dengan bantuan teknologi. Kehadiran pandemi Covid-19 saat ini juga telah

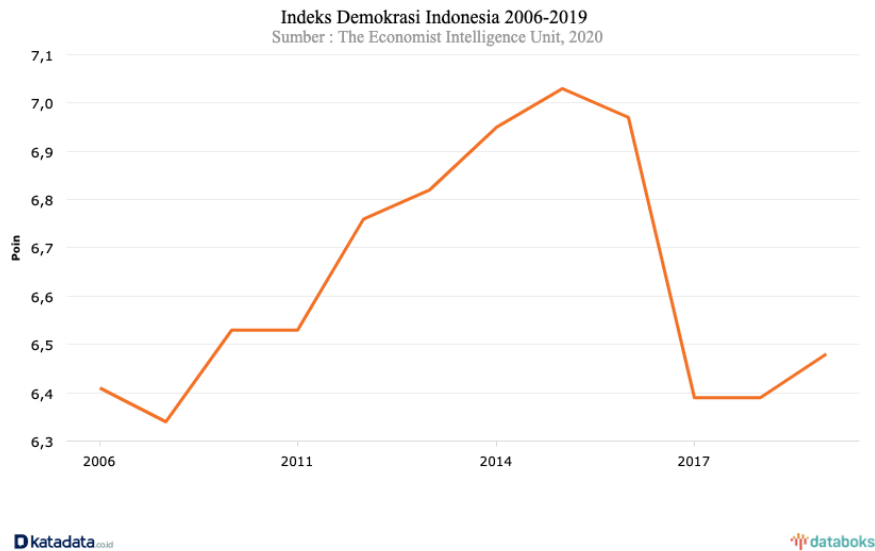
memberikan kesempatan yang sangat luas bagi banyak pihak untuk bekerja jarak jauh tanpa kehilangan produktivitas. Bahkan, pekerja cenderung semakin produktif dan memiliki waktu lebih banyak untuk keluarga. Peluang ini barangkali cocok bagi kaum perempuan yang memimpikan keseimbangan antara bekerja dan mengurus keluarga.

"Sebenarnya, di Indonesia itu kan mengenal yang delapan jam kerja, harus masuk kantor gitu. Padahal, pekerjaan-pekerjaan jurnalis itu sebenarnya bisa dilakukan dengan teknologi gitu. Nah, kemudian pandemi ini memberikan isyarat kan bahwa ternyata menggunakan teknologi pun, itu bisa dilakukan gitu. Orang tidak usah bertemu, tapi menggunakan teknologi gitu. Karena kan jurnalis itu dia kerja 12 jam, terus dia mengedit sehari 30 berita gitu. Jadi, kerjanya itu selalu lebih dari sepuluh jam. Plus dia ada di jalan. Di jalan empat jam kalau di Jakarta. Jadi, 14 jam itu habis kan waktunya gitu. Jadi, menurutku, teknologi itu bisa membantu selagi dia punya akses." (Wawancara LA, Juli 2021)

6. TIK dan Kesetaraan Gender dalam Dunia Politik dan Demokrasi Kekinian

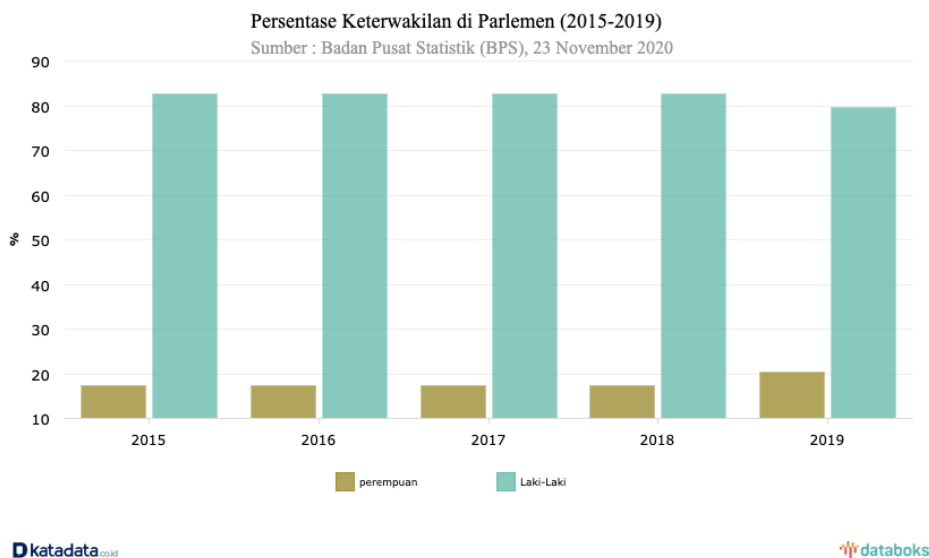
Di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Meski begitu, skor Indonesia yang kini sebesar 6,3 turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,48. Sementara itu, Malaysia memimpin dengan skor 7,19. Perolehan ini disebabkan ada perbaikan dalam proses pemilu, sehingga institusi politik pun lebih demokratis. EIU memberikan penilaian tersebut berdasarkan lima indikator, yakni proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.⁶ Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2019 mencapai 74,92, meningkat dari skor tahun sebelumnya sebesar 72,39. Penilaian ini dari skala 0 hingga 100 dengan pengelompokan menjadi tiga kategori, yaitu "baik", "sedang", dan "buruk". Meskipun skor dan peringkat Indonesia membaik, demokrasi di Indonesia masih dalam kategori cacat (*flawed democracy*). Hal tersebut disebabkan adanya usulan penghapusan pemilihan langsung oleh politisi senior.

6 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/04/demokrasi-indonesia-peringkat-ke-4-di-asia-tenggara>



Gambar 14. Indeks Demokrasi Indonesia (2006-2019).

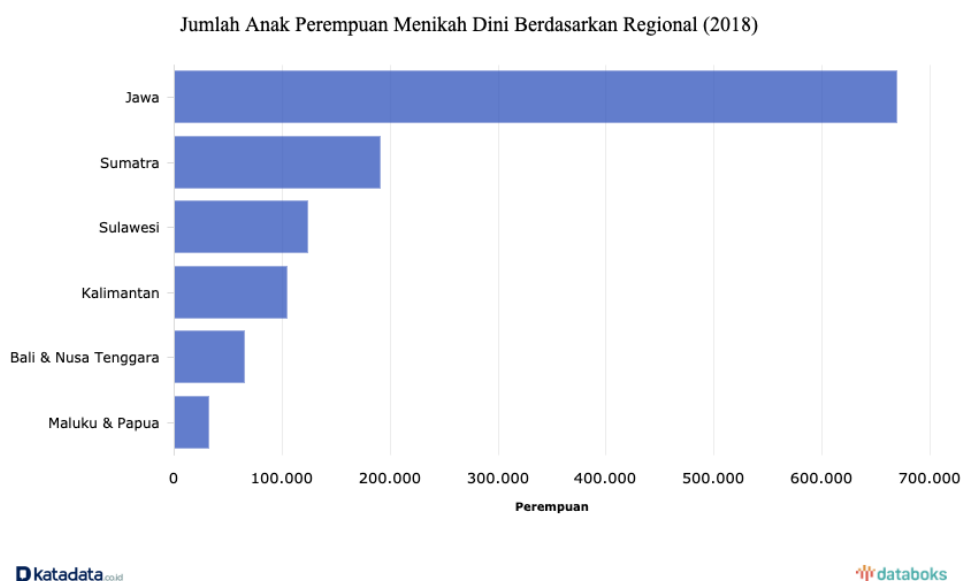
Indonesia hingga saat ini masih memiliki pekerjaan rumah mengenai kesetaraan gender. Meskipun masih tinggi, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia sebenarnya mengalami tren membaik. Pada 2019, IKG Indonesia sebesar 0,421, membaik apabila dibandingkan dengan IKG pada tahun 2015 sebesar 0,466 poin. Salah satu indikator yang mengalami perbaikan adalah persentase keterwakilan di parlemen. Pada 2015, keterwakilan perempuan hanya 17,3%, sedangkan laki-laki 82,7%. Pada 2019, keterwakilan perempuan meningkat menjadi 20,5%. Ketimpangan gender dalam politik ini berakar sangat dalam pada budaya patriarki dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.



Gambar 15. Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia (2015-2019).

Ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dibentuk, disosialisasikan, dan diperkuat oleh interpretasi agama serta mitos-mitos. Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut (Gusmansyah, 2019). Akibatnya, terjadi pembagian peran gender, yaitu peran domestik dan peran publik. Dunia politik sendiri diasosiasikan sebagai aktualisasi peran publik. Sebab, dalam politik, ada upaya untuk merebut peran kekuasaan, termasuk akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan. Sampai saat ini, dunia politik dan demokrasi di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki, baik di tingkat yang paling bawah maupun nasional. Keterwakilan perempuan masih sangat rendah karena jumlah perempuan dalam panggung politik juga minim (lihat gambar 10). Upaya untuk mendorong partisipasi politik perempuan juga menjadi pekerjaan rumah yang sangat panjang.

Berbeda dengan laki-laki, sejak awal perempuan sudah dihadapkan pada masalah prioritas keluarga yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Masih banyak keluarga yang menganggap pendidikan tinggi hanya penting untuk laki-laki dan bukan prioritas untuk perempuan. Akibatnya, banyak perempuan harus menghadapi fakta pernikahan dini dan bahkan pernikahan anak yang menyebabkan masa depan mereka menjadi suram. Data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di Indonesia menikah pada rentang umur 19-24 tahun (2015). Sekitar 11,21% perempuan menikah di bawah umur 15 tahun. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan yang lama mengatur bahwa batas usia menikah bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Pada tahun 2014, Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Hak Anak melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas usia menikah perempuan. Kini, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan sudah disahkan dengan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun.



Gambar 16. Jumlah pernikahan usia dini berdasarkan wilayah (2019).

Beragam faktor melatarbelakangi pernikahan usia muda, seperti persoalan ekonomi keluarga, pengaruh norma agama dan budaya setempat, serta minimnya edukasi terkait pernikahan dini. Pandemi Covid-19 semakin memperdalam masalah pernikahan dini ini. Jumlah pernikahan dini di Indonesia meningkat selama pandemi. Pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi pernikahan di bawah 19 tahun diajukan dan 97% di antaranya dikabulkan. Jumlah ini meningkat pesat dibanding tahun 2019 yang hanya 23.700 permohonan. Berdasarkan data tahun 2018, pernikahan dini ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan (lihat gambar 11). Persoalan inilah yang mendorong beberapa OMS untuk terus melakukan upaya edukasi dan pemberdayaan yang bertujuan mencegah pernikahan usia dini bagi perempuan sebagai langkah paling dasar untuk mendorong kesetaraan gender.

“Jadi, kesetaraan gender tuh didorongnya, yuk perempuan kamu harus sekolah, kamu harus sekolah tinggi, nah itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah pernikahan dini. Karena kan kita prevalensi perkawinan usia anak kan masih sangat besar. Ada data bahwa satu dari lima perempuan itu pernah menikah pada usia 20 sampai 24 tahun, bahkan melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Jadi, tingkat perceraian pada perempuan usia 20-24 tahun pun lebih tinggi dibanding mereka yang menikah pada usia 18 tahun ke atas. Jadi, persoalan perkawinan usia anak ini memang sangat mengkhawatirkan.” (Wawancara, UK, Juli 2021)

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) seharusnya mampu melindungi perempuan dari berbagai praktik diskriminasi dan kekerasan. Caranya adalah dengan membuat berbagai kebijakan yang bertujuan menghapuskan ketimpangan gender. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain dengan meningkatkan kuota dan keterwakilan perempuan di parlemen serta menggalakkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, misalnya dengan menerapkan anggaran responsif gender. Anggaran responsif gender bisa dilakukan dengan berbagai cara, meliputi perencanaan, alokasi anggaran, restrukturisasi pendapatan, dan pengeluaran guna mencapai kesetaraan serta kesejahteraan melalui pemenuhan hak-hak dasar bagi perempuan dan laki-laki (Farida, 2018). Integrasi anggaran responsif gender ke dalam APBN ataupun APBD diharapkan akan mampu mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan gender.

Secara implisit, kebijakan anggaran responsif gender terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Di tingkat daerah, juga terdapat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran responsif gender. Sayangnya, anggaran yang ada di Indonesia masih dianggap belum responsif gender. Masih ada pandangan bahwa masalah gender bukan merupakan tanggung jawab bersama, proses penganggaran yang belum

berperspektif gender, kecilnya pagu indikatif yang diajukan oleh pemerintah, dan minimnya keterwakilan perempuan dalam posisi strategis dalam penyusunan APBN. Pengalaman ND menunjukkan bahwa di lapangan masih banyak pembuat kebijakan yang belum sensitif gender dan belum memahami pentingnya anggaran responsif gender tersebut.

“Ini pengalamanku, aku bertanya bagaimana soal anggaran responsif gender di suatu provinsi, lalu aku dijawab kita menyusun anggaran bukan hanya untuk kebutuhan perempuan. Lalu, aku bilang berarti dia memahami gender hanya perempuan, berarti di sini masih ada kendala. Harusnya dia memahami bagaimana budget yang responsif gender, peran utama gender, dan anggaran mereka. Dia memahami bahwa itu hanya untuk perempuan, padahal bukan itu. Lalu, aku bertanya apakah karena yang bertanya adalah perempuan, makanya dia menjawab seperti itu? Selain dia tidak tahu pengetahuan ini, lalu dari kepala dinas *release* bahwa mereka sedang berproses dan paham dengan apa yang aku maksud.” (Wawancara ND, Juli 2021)

Kesadaran pentingnya pengarusutamaan gender tidak hanya perlu didorong kepada pemerintah. Di dalam internal OMS juga perlu untuk terus dilakukan edukasi dan penguatan. Penguatan pemahaman dan praktik kesetaraan gender dalam internal OMS akan menjadi kunci utama agar perspektif gender dapat diimplementasikan dalam setiap program pendampingan kepada masyarakat. Praktik-praktik dalam relasi sosial dan interaksi antar-rekan kerja merupakan langkah pembiasaan dan internalisasi nilai yang kuat dan efektif sebelum melakukan edukasi kepada orang atau lembaga lain.

“Ya, pertama di tingkat internal terus-menerus kita akan memperkuat, menyolidkan tim supaya tim kita juga mempunyai bekal, terutama perspektif kesetaraan gender dan keadilan gender serta pluralisme ya. Kita ini ada dua, yaitu feminisme dan pluralisme. Eh, kita berusaha menginternalisasi perspektif tersebut ke dalam keseharian, ke dalam kebijakan-kebijakan sehari-hari, misalnya, kebijakan tentang bawa anak kalau *single parent* difasilitasi. Nah, itu kan juga menjadi media untuk memperkuat kesetaraan gender di internal. Kemudian, bagaimana kita membuat *budgeting* yang responsif gender itu di tingkat organisasi juga. Biasanya, ini kita berantem sama *funding* ya, biasanya *funding*-nya kan enggak mau. Tapi kita selalu desakkan jadi harus menjadi kebijakan. Kemudian, sekarang setiap hari, kita internalisasinya melalui diskusi di WhatsApp ya karena memang virtual kan. Terus juga kita punya rapat-rapat bulanan, rapat-rapat tim, itu semua terintegrasi. Kalau dulu, ada *training* gender untuk staf, *training* feminisme untuk staf, dan sebagainya, kayak gitu. Tapi sekarang enggak bisa dilakukan. Nah, ke depan, pengingnya sih itu juga dihidupkan lagi kalau pandemi sudah selesai.” (Wawancara M, Juli 2021)

Praktik demokrasi dan kesetaraan gender haruslah dimulai dari lingkungan terkecil, termasuk dalam lingkungan kerja dan organisasi OMS itu sendiri. Demokrasi tanpa kesetaraan gender bukanlah demokrasi yang sejati karena mengesampingkan hak-hak perempuan

dan kelompok rentan lainnya. Kunci keberhasilan pengarusutamaan gender tak lain adalah membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi, termasuk pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang lebih luas. Aturan-aturan atau hal-hal yang membatasi partisipasi aktif perempuan perlu untuk dihilangkan. Semangat kesetaraan ini tentu sejalan dengan semangat dunia yang semakin terkoneksi tanpa batas dan sekat.

“Jadi, organisasi itu punya kewajiban untuk itu dan pelan-pelan kita sudah mulai memikirkan bagaimana memberikan ruang aktivitas atau ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan. Kalau WALHI secara terbuka merekrut ya bahkan kepemimpinan politik perempuan di WALHI itu direktur pertama WALHI perempuan. Direktur-direktur yang hebat itu perempuan, justru gitu. Jadi, kalau ruang demokrasinya dibuka untuk itu, kita mesti menyiapkan dan memberikan kesempatan pada perempuan aktivis di WALHI untuk bisa berkembang.” (Wawancara KK, Juli 2021)

Kehadiran negara, sektor privat, hingga dukungan komunitas diperlukan untuk berkolaborasi dan bersama-sama mendorong kesetaraan gender dalam era demokrasi digital saat ini. Tidak cukup peran satu pihak saja tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun demikian, tidak ada yang mampu menandingi peran dan kekuasaan negara dalam mengatur dan memfasilitasi warganya. Oleh karena itu, peran negara perlu diperbesar untuk menyediakan kebutuhan infrastruktur dan kelembagaan yang membantu kelompok marginal beradaptasi dengan perkembangan dunia digital. Perkembangan dunia digital juga harus diikuti dengan pendidikan digital yang memadai. Literasi digital untuk menangkal berbagai penyalahgunaan internet atau menghindari berbagai dampak negatif dunia digital sangat diperlukan, terutama bagi masyarakat yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang minim.

“Negara harus memfasilitasi, kalau di level pendidikan Islam, pondok-pondok pesantren, di seluruh Indonesia (harus dibantu) untuk *going digital*, minimal punya TV digital. Entah di YouTube atau yang lain. Fungsinya apa? Untuk semakin memperkaya digital literasi di level orang. Itu yang menurutku krusial untuk 5-10 tahun lagi karena TV mungkin akan semakin hilang dan berganti ke digital.” (Wawancara DP, Juli 2021)

Adaptasi terhadap perubahan semacam ini tentu membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang, terutama mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat. Banyak peristiwa kekerasan dalam dunia nyata justru dilanggengkan dalam dunia maya. Masalah seperti ini memerlukan perhatian khusus dan tanpa henti dari setiap pemangku kepentingan. Digitalisasi dalam setiap aspek kehidupan hampir mustahil untuk dibendung. Bukan tidak mungkin, Revolusi 4.0 yang ditandai dengan dominasi komputerisasi, otomatisasi, dan mesin cerdas ini akan terus melanggengkan ketimpangan sosial ekonomi yang ada. Atau sebaliknya, kemajuan TIK dan internet saat ini bisa jadi peluang baru bagi ruang sosial dan politik yang lebih adil dan

setara bagi setiap warga negara. Semua tergantung pada bagaimana masyarakat, negara, dan dunia usaha menyikapinya.

"Jadi, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa Indonesia ini, dalam pemanfaatan internet bagi kehidupan berdemokrasi, termasuk yang paling maju. Memang, kita belum bisa memanfaatkan *e-voting*. Atau bahkan, kita belum juga bisa memanfaatkan rekapitulasi elektronik dalam penghitungan suara hasil pemilu. Itu semuanya masih manual. Tapi itu masalahnya, seperti saya bilang tadi, masih banyak orang seperti saya, lebih banyak percaya buku tabungan daripada *e-banking*." (Wawancara MF, Juli 2021)

Dari perkembangan tersebut, kita dapat melihat bahwasanya demokrasi dan teknologi memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik (resiprokal) yang cukup kuat. Aktivitas ketatanegaraan, pemerintahan, pelayanan publik, sosialisasi politik, partisipasi politik, pemenuhan hak dasar warga negara, hingga berbagi pendapat secara *online* dapat berkembang dengan cepat ketika memanfaatkan TIK dan internet. Dengan kata lain, kita telah hidup di era e-demokrasi. Sebuah era ketika ruang demokrasi semakin terbuka; dan keterbukaan ini membawa dampak bagi proses kontrol, akuntabilitas, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam mendukung prinsip-prinsip *good governance* (pemerintah yang bersih, jujur, transparan, dan akuntabel).



BAB 4

PERAN OMS MENDORONG KESETARAAN GENDER DALAM DEMOKRASI DI ERA DIGITAL

Selain mendorong akses TIK yang setara bagi kelompok perempuan marginal, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga memanfaatkan akses TIK guna menyuarakan isu kesetaraan gender secara lebih luas bagi perempuan. Berdasarkan FGD, OMS merupakan salah satu motor transformasi sosial. Inisiatif yang mereka lakukan telah memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek. Terlihat bahwa OMS adalah agensi yang melakukan pemberdayaan terhadap kelompok rentan. Pemberdayaan sendiri, menurut Bank Dunia (2000), dimaknai sebagai peningkatan kapasitas masyarakat rentan untuk dapat memengaruhi institusi negara agar lebih memperhatikan kehidupan mereka. Pemberdayaan dilakukan dengan cara memperkuat partisipasi kelompok tersebut dalam proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Untuk tiba pada kondisi tersebut, segala rintangan pada aspek politik, hukum, dan sosial budaya yang berpotensi dan/atau telah menghambat keterlibatan kelompok rentan tersebut harus dipecahkan. Pemberdayaan perlu dimaknai sebagai kondisi ketika kelompok rentan memiliki lebih banyak kendali terhadap hidup mereka.



1. Advokasi Hak-Hak Perempuan

OMS melakukan fungsi pemberdayaan terhadap perempuan di era digital. Pertama dengan melakukan pendampingan untuk mengetahui dan mengenali hambatan yang dialami kelompok rentan dalam mengakses manfaat kemajuan TIK secara berimbang. OMS juga menjembatani agar pengalaman perempuan dari kelompok rentan didengar dan disertakan dalam dialog publik. Tujuan besarnya adalah agar kebijakan di tingkat lokal-nasional memastikan perlindungan atas kepentingan kelompok tersebut. Dengan demikian, peran OMS penting dalam mendorong kesetaraan gender terhadap demokrasi yang bersifat inklusif.

Sejumlah OMS yang terlibat dalam FGD menyatakan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan melalui kampanye dan penyebaran data terkait hak-hak perempuan. Rahima, misalnya, menyediakan sejumlah info grafis terkait hak perempuan dalam konteks Islam. Rahima menyediakan narasi tandingan terkait diskriminasi terhadap perempuan dengan basis agama Islam. Informasi yang disajikan oleh Rahima banyak dirujuk dan dijadikan referensi dalam dakwah yang dilakukan oleh para ulama perempuan. Rahima mengangkat diskursus hak perempuan dan gagasan kesetaraan gender berbasis agama serta menyebarkannya melalui digital. Advokasi kesetaraan gender lainnya dapat ditemukan pada kerja OMS seperti Migrant Care melalui kanal-kanal media sosialnya yang secara aktif menyuarakan hak-hak perempuan pekerja migran. KPI dalam kanal sosial medianya (khususnya melalui blog) menunjukkan sikap dan seruan politisnya kepada pemerintah terkait isu perkawinan anak, perdagangan manusia, tes keperawanan, dan berbagai isu pelanggaran HAM perempuan di Indonesia.

Berdasarkan FGD bersama sejumlah OMS yang berfokus pada kerja pemberdayaan terhadap perempuan, sejumlah tantangan mengemuka. Secara umum, tantangan dalam melakukan advokasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan kelompok rentan di era digital ini adalah adanya ketimpangan gender digital. Persoalan infrastruktur dan ketimpangan penguasaan TIK adalah persoalan yang hampir dihadapi seluruh OMS. Menurut sejumlah OMS, dengan adanya tantangan pada infrastruktur dan keterampilan, arus informasi menjadi terhambat. OMS terhalang untuk mendapatkan informasi terkini dari kelompok dampingannya, sehingga akan terhambat pula dalam proses advokasi. Hambatan pada distribusi informasi juga berdampak pada tidak efektifnya pendidikan publik dan kampanye yang dilakukan oleh OMS. Lappan Maluku adalah salah satu OMS yang mengalami hambatan untuk mengadvokasi hak korban karena kondisi ketimpangan TIK di wilayah desa/pulau.

“Hambatan dalam penggunaan teknologi erat kaitannya dengan infrastrukturnya yang tidak merata. Banyak tempat yang masih sulit untuk mengakses informasi dan hal-hal lain secara *online*. Banyak daerah yang masih terisolasi dan merupakan daerah miskin. Infrastruktur yang tidak merata tadi menyebabkan ketidakmampuan untuk berkomunikasi

secara jarak jauh. Kalau informasi tidak dapat disebar, persoalan-persoalan yang mereka hadapi juga jadi sulit untuk di-expose dan disebar.” (FGD 12 April 2021, Lappan Maluku)

Persoalan pada infrastruktur memengaruhi kerja advokasi yang dilakukan oleh TIKI Papua, khususnya di masa pandemi. Pada masa sebelum pandemi, proses advokasi kasus pelanggaran HAM perempuan di Papua mayoritas dilakukan secara *offline*. Maka, perubahan pada masa pandemi ini memberikan tantangan berlapis pada perempuan pembela HAM di Papua.

“Kita ada di 24 lembaga dan individu yang tersebar di Papua dan Papua Barat. Kalau bicara tentang informasi digital, saya pikir ini kita melihat kembali kepada masa sebelum pandemi dan saat pandemi. Masa sebelum pandemi katakanlah itu normal, laporan dan lain sebagainya memenuhi standar dan komunikasi sangat lancar sekali dengan teman-teman di daerah, karena rata-rata kita pertemuannya secara fisik.... Hal yang paling krusial adalah bagaimana masalah (advokasi pemenuhan hak) korban itu terkait dengan geografi wilayah, di wilayah-wilayah yang mudah akses dengan jaringan internet, (kita) bisa telepon, WhatsApp, dsb. Tetapi bagi perempuan korban yang di wilayah geografisnya sulit, komunikasi semacam itu kita tidak dapat gunakan. (FGD 12 April 2021, TIKI Papua)

Menurut OMS TIKI Papua, pandemi menghasilkan tantangan berlapis bagi kerja advokasi terhadap kasus pelanggaran HAM perempuan di Papua. Biaya komunikasi meningkat di masa pandemi. Kegiatan seminar, berjejaring, dan lainnya menguras kuota internet yang tidak sedikit. Persoalan lain adalah para korban (mitra dampingan) TIKI Papua, secara umum, belum mengenal dan menguasai TIK secara baik. Walaupun ada korban yang telah mulai mengenal TIK, mereka terkendala untuk membeli pulsa. Penggunaan uang akan diutamakan untuk biaya bertahan hidup sehari-hari, makanan, dll.

Situasi pandemi telah mengubah proses advokasi. Mayoritas advokasi pemenuhan hak korban dilakukan secara *offline*. Namun, di masa pandemi, semua proses harus beralih menjadi *online*. OMS KPI juga menyatakan tantangan advokasi di masa pandemi. Salah satu strategi advokasi yang dilakukan KPI adalah pelatihan terkait pengembangan UMKM pada kelompok rentan, misalnya kepada perempuan kepala keluarga. Pelatihan tersebut biasanya dilakukan secara *offline*, tetapi saat ini beralih menjadi *online*. Namun, menurut KPI, tantangannya adalah dengan sistem pelatihan *online*, KPI tidak mampu memastikan apakah seluruh kelompok sasaran dapat menerima manfaat. Sebab, kapasitas koneksi anggota sangatlah beragam. Merespons tuntutan situasi untuk advokasi *online*, KPI melakukan sejumlah pembekalan pada fasilitator dan para anggota agar dapat berjejaring menggunakan fasilitas TIK.

“*Training* fasilitator metode *online*, karena tipikal program pemberdayaan yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia melalui pelatihan dan diskusi. Saat ini, kami melakukan *training for facilitator* dengan menggunakan metode *online*. Kami melatih beberapa pengurus atau kader-kader kita yang biasa melakukan pendidikan kader dasar, menengah, dll. Tujuan pelatihan adalah untuk memastikan agar mereka dapat memfungsikan perangkat-perangkat digital atau aplikasi-aplikasi. Supaya kemudian mereka dapat melakukan pelatihan-pelatihan rutin atau pelatihan-pelatihan standar yang selama ini harus dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia.” (FGD 12 April 2021, KPI)

Tantangan lain yang dihadapi KPI dalam mengadvokasi hak perempuan dan mendorong kesetaraan gender di Indonesia adalah terkait mobilisasi gerakan dan kampanye. Sebelum pandemi, kedua hal tersebut berfokus pada ranah *offline*. Namun saat ini kampanye dan aksi damai dilakukan secara *online*. Bagi KPI, ada gap antara advokasi melalui *online* dan *offline*. Untuk itu, KPI merasa bahwa mereka perlu memahami strategi kampanye *online* secara lebih baik lagi agar kampanye mereka tetap dan semakin efektif. Tantangan advokasi pemberdayaan perempuan kelompok rentan yang dialami oleh HWDI adalah memastikan agar kelompok difabel terlibat dalam kehidupan publik secara penuh. Menurut HWDI, kesadaran masyarakat tentang tantangan kelompok difabel untuk berpartisipasi dalam masyarakat masih kurang. HWDI bekerja untuk terus membangun kesadaran tersebut.

“Kalau untuk penyandang disabilitas, aplikasi, alat-alat, atau *tools* utama untuk memastikan penyandang disabilitas berpartisipasi penuh, yang itu masih menjadi tantangan bagi kita untuk menyadarkan orang-orang. Misalkan bagaimana dalam satu pertemuan yang diselenggarakan oleh siapa saja, pemerintah, masyarakat sipil, kemudian mereka selalu memperhitungkan serta menyediakan alat-alat teknologi ini untuk memastikan kami, perempuan disabilitas, bisa berpartisipasi penuh. Misalkan *running text*, atau ada presentasi di mana teks presentasi itu bisa berjalan di dalam PPT-nya. Apa yang disampaikan oleh pembicara bisa kemudian ada seperti CAD. Istilahnya yang ada di penyandang disabilitas. Apa yang diucapkan oleh para pembicara itu bisa tertulis atau bisa muncul di layar. Itu merupakan salah satu alat utama untuk memastikan para penyandang disabilitas yang mengalami hambatan pendengaran bisa mengikuti, berpartisipasi penuh, dan bermakna. Datang di sana bukan sekadar melihat.” (FGD 12 April 2021, HWDI)

2. Pendampingan Komunitas

Pembangunan infrastruktur TIK barangkali relatif lebih mudah. Namun membangkitkan kesadaran dan pemanfaatan secara tepat dan benar untuk menjaga keberlangsungannya tidaklah mudah. Sering kali pemerintah ataupun OMS yang menjalankan program pendampingan TIK kepada komunitas berasumsi bahwa menyediakan akses TIK adalah tujuan akhir. Hal ini mengakibatkan banyaknya program pembangunan infrastruktur TIK yang dilaksanakan tidak berujung pada pembangunan komunitas itu sendiri (Hardjono, 2006). Sebagian dari program seperti ini ada yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu di

komunitas tersebut karena tidak diarahkan pada *target group* yang tepat. Sebagian lagi malah tidak berkelanjutan dan masyarakat tidak merasakan manfaat dari kegiatan atau program yang dijalankan. Hal inilah yang mendasari beberapa OMS untuk terus meningkatkan kapasitas pendampingan dan ketepatan konten pendampingan yang mereka lakukan kepada kelompok binaan, terutama dalam hal literasi digital.

“Jadi anak Konde harus tahu teknologi biar dia bisa *ngajarin* orang lain gitu karena kita kan juga *ngelihat* ya ternyata tidak banyak organisasi yang kemudian menaruh perhatian pada kelompok minoritas untuk teknologi. Kalaupun ada itu, sifatnya umum, misalnya diskusi soal apa namanya.... teknologi gitu kan, tapi tidak melakukan pendampingan. Nah kalau Konde itu kan melakukan pendampingan. Misalnya PRT dari bikin modul, *ngajarin nulis*, *ngajarin* kampanye, terus kemudian kita *coaching* soal kampanyenya, *coaching* soal tulisan. Sekarang setiap Rabu di tahun ini tuh tulisan PRT ada di Konde. Nama programnya KEDIP, Konde Digital Literacy Perempuan.... Itu untuk buruh, PRT, miskin kota. Tidak banyak CSO yang kemudian melakukan pendampingan itu. Kebanyakan bikin seminar, bikin modul, bikin panduan, riset. Kayak gitu, padahal kalau sama minoritas tuh gak bisa. Itu tuh untuk menengah ke atas. Nah, kalau buruh, miskin kota, PRT, itu dia... latihan, Mbak.” (Wawancara LA, Juli 2021)

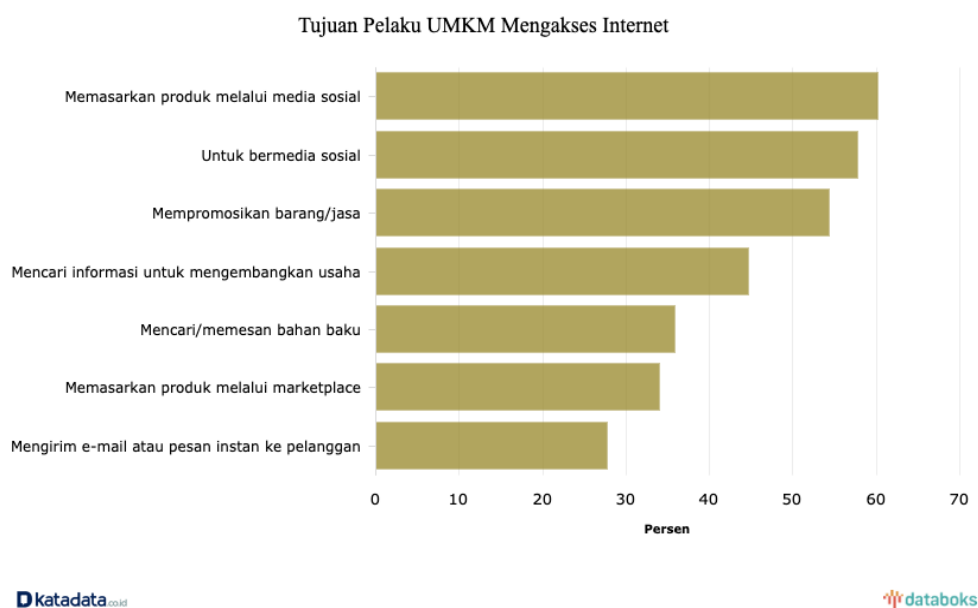
Literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan dari berbagai sumber sangat luas yang diakses melalui peranti komputer. Literasi digital juga banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarkan informasi. Dalam *roadmap* UNESCO (2015-2020), literasi digital menjadi pilar penting untuk masa depan pendidikan. Literasi digital menjadi basis pengetahuan yang didukung oleh teknologi informasi secara terintegrasi. Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Perempuan, dalam hal ini ibu rumah tangga, memiliki posisi penting dalam pendidikan teknologi secara baik dan benar di lingkungan keluarga. Maka, seorang ibu perlu meng-*upgrade* pengetahuan, khususnya yang terkait teknologi, agar bisa membina anggota keluarga, terutama anak-anak, dalam penggunaan teknologi (Sulistiyowati dkk., 2019).

“Kalau untuk kesetaraan gender, mulai tahun ini, kita mau *ngajakin* anak muda untuk bisa menyuarakan bagaimana sih kesetaraan gender. Kita akan ada di tiga area: Palu, Bandung, dan Jakarta. Jadi, UMKM ataupun pelaku usaha yang ada, misalnya, anggota Koalisi Perempuan itu akan mendapat semacam kursus kewirausahaan. Itu dilakukan selama sebulan dan secara *online*. Ada pendampingan juga nantinya. Jadi, bagaimana kemudian para anggota KPI ini bisa menggunakan media sosial ataupun media yang lain untuk *promoting* ataupun pemasaran dan nanti juga diharapkan meningkatkan penjualan mereka dengan menggunakan teknologi dan media sosial.” (Wawancara BS, Juli 2021)

3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

E-commerce menjadi salah satu komponen utama pendorong ekonomi digital, terutama di masa pandemi Covid-19. Sistem dagang elektronik menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan baru bagi banyak masyarakat. Pada 2019, sebanyak 13,2 juta dari 127 juta pekerja terlibat dalam kegiatan dagang tersebut. Kondisi ini akan menjadi pekerjaan lebih umum dan dijadikan masyarakat untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Masyarakat menengah ke bawah saat ini banyak bergerak di sektor UMKM. Namun hanya 13% dari 65 juta pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital. Saat ini, kontribusi ekonomi digital kepada ekonomi nasional (PDB) masih relatif rendah (3,7%)¹.

Sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengaku telah menggunakan perangkat yang terhubung ke internet untuk menjalankan usahanya. Dalam survei Katadata Insight Center (KIC), sebanyak 42,7% responden memanfaatkan PC/laptop dengan internet untuk menjajakan dagangannya. Sementara itu, sekitar 84% responden sebagai pelaku UMKM menggunakan ponsel pintar untuk menjalankan usahanya dengan bantuan internet. Menurut pelaku UMKM yang menggunakan internet, sekitar 60,2% responden menggunakan akses jaringan tersebut untuk memasarkan produk melalui media sosial. Sementara kegiatan yang paling minim digunakan yakni mengirim pesan singkat ke pelanggan. Kegiatan itu hanya dilakukan 27,7% responden.



Gambar 17. Pemanfaatan internet oleh pelaku UMKM (Juni, 2020).

Hampir seluruh OMS melihat bahwa peningkatan ekonomi adalah hal yang penting dilakukan untuk memberdayakan perempuan rentan. Rahima, Migran Care, GIZ, Gita Pertiwi, Kiara, PPNI, HWDI, dan Lappan Maluku memberikan pelatihan dan asistensi terkait *marketing online*.

¹ <https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/610a935c18410/segudang-masalah-yang-picu-ketimpangan-ekonomi-digital-indonesia>

Sebagai contoh, Kiara melakukan literasi digital kepada kelompok perempuan nelayan. Dengan penguasaan terhadap aplikasi, perempuan nelayan menjadi diuntungkan secara ekonomis. Sebab, mereka mengetahui harga terbaik untuk menjual produk mereka. Dengan literasi digital, perempuan nelayan tidak lagi terjebak dalam jerat tengkulak. HWDI melakukan program kewirausahaan melalui digital pada 1.000 perempuan disabilitas di Jawa Timur. Sementara itu, Lappan Maluku menginisiasi digitalisasi produk UMKM untuk membantu akses dan penyebaran informasi, terutama bagi mama-mama komunitas selaku pelaku usaha.

Penguatan UMKM dengan pemberdayaan digital juga dirasakan oleh komunitas perempuan nelayan PPNI, khususnya di era pandemi. Marketing dan bisnis *online* memperkuat ekonomi keluarga nelayan yang sangat terdampak Covid-19. Pengalaman senada juga dipaparkan oleh OMS Gita Pertiwi. Menurut Gita Pertiwi, pemberian sarana TIK telah memberdayakan perempuan dampingan yang memiliki usaha/bisnis. Gita Pertiwi juga menjelaskan penggunaan teknologi digital sangat bermanfaat bagi mereka untuk membangun promosi, jaringan kerja sama, dan pengembangan usaha.

4. Partisipasi Publik Perempuan dalam E-Demokrasi

Dalam negara dengan budaya patriarkal seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang cenderung bias ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga (Parawansa, 2002). Menengok pada sejarah, di era perjuangan kemerdekaan Indonesia, masyarakat sebenarnya sudah menerima dan menghargai peran para pejuang perempuan, baik yang ikut berperang di medan perang, dalam pendidikan, pengobatan, maupun pengelolaan logistik. Kesempatan ini memberikan kemudahan kepada perempuan untuk memperjuangkan isu-isu yang dianggap penting. Oleh karena itu, pada pemilihan umum tahun 1955, jumlah perempuan di DPR mencapai 17 orang. Pemilu ini pun mendapat gelar sebagai pemilu yang demokratis, dengan partisipasi perempuan dalam politik didasarkan pada kemampuan mereka sebagai pemimpin unit-unit yang ada dalam organisasi-organisasi partai. Berbeda dengan periode Orde Lama (era Soekarno), pada masa Orde Baru (era Soeharto) dengan konsep partai mayoritas tunggal, representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan dalam institusi-institusi kenegaraan ditetapkan oleh para pemimpin partai di tingkat pusat serta sejumlah tertentu elite. Akibatnya, sebagian perempuan yang menempati posisi penting memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan para pejabat dan pemegang kekuasaan di tingkat pusat (nepotisme). Hal ini membuat sebagian dari mereka tak melewati tahapan dalam proses pencalonan/pemilihan, dan mungkin tidak memiliki kemampuan mengartikulasikan kepentingan konstituennya.

Dalam pemilihan umum 1999, proses pemilihan mengalami perubahan cukup berarti, di mana rekrutmen kandidat partai untuk lembaga legislatif, termasuk perempuan, harus disetujui

oleh daerah—para pengambil keputusan partai di daerah. Sebagian besar wakil perempuan terpilih berpartisipasi dalam proses pemilu; antara lain dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat, diskusi, ceramah, dan kegiatan partai lainnya yang berhubungan dengan kampanye pemilu. Penyebaran anggota legislatif perempuan dalam komisi-komisi juga mencerminkan pola tradisional (pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan); di mana banyak anggota perempuan dalam komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan, agama, pendidikan, dan kebudayaan.

Selain itu, seleksi terhadap para kandidat politisi perempuan biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki. Tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM, dan partai-partai politik di era itu juga memperlemah keterwakilan perempuan di parlemen. Di samping itu, faktor-faktor lain seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan perempuan, faktor keluarga, dan sistem multipartai juga dianggap sebagai penghambat partisipasi perempuan dalam politik era itu (Parawansa, 2002).

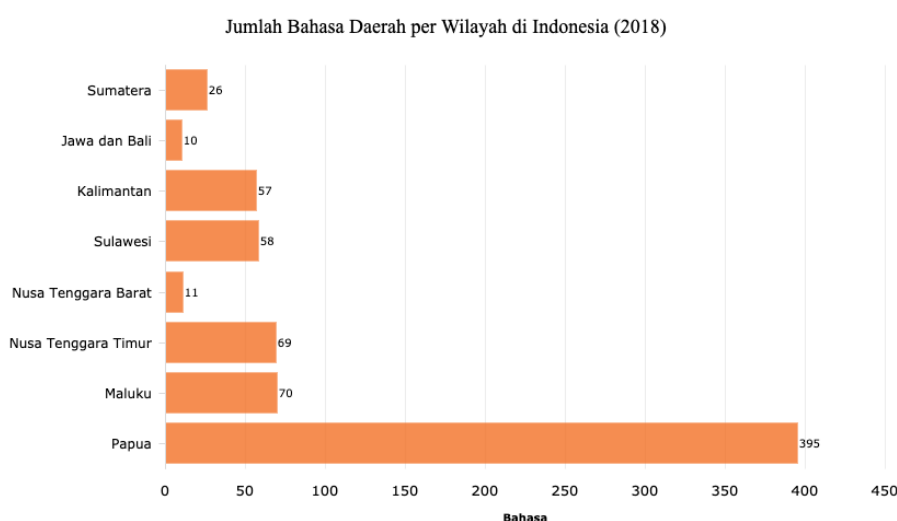
Diperlukan strategi untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik, politik, dan demokrasi di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain dengan membangun dan memperkuat jejaring organisasi perempuan: meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik; melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik; membangun akses ke media; meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan; dan meningkatkan kualitas politik perempuan. Dalam era digital saat ini, potensi untuk itu relatif besar karena akses pada internet yang lebih mudah. Tidak hanya di dunia politik, partisipasi perempuan juga perlu didorong dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti bidang ekonomi, pariwisata, dan kebudayaan.

Seluruh OMS yang terlibat dalam studi ini juga telah terlibat dalam upaya mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Berbagai inisiatif OMS tersebut berangkat dari kesadaran dan misi bahwa perempuan harus terlibat dalam kehidupan bersama, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. GIZ, misalnya, dalam proyek Innovation and Investment for Inclusive Sustainability Economic Development (ISED) berfokus pada isu perempuan dalam digitalisasi dan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dalam sektor pariwisata di Lombok. Dalam program-program pelatihan data sains pariwisata di Lombok, OMS ini mengubah pola pikir perusahaan dan masyarakat bahwa yang memiliki kapasitas pada bidang data sains hanya laki-laki. GIZ memastikan agar program pelatihan bidang data sains memasukkan sebanyak-banyaknya perempuan (80%). Tujuannya untuk memastikan, pada bidang pariwisata, perempuan tidak tersingkirkan.

“Kalau ada *flyer* (diskusi), narasumbernya (semua) laki-laki. Kemudian di balik, gitu, karena tidak ada kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai narasumber. Kadang juga gender hanya menjadi prasyarat dari donor. Tapi kadang-kadang organisasi yang berbasis gender sekalipun, itu kadang-kadang belum cukup paham untuk memasukkan isu gender dalam program mereka. Misalnya begini, ada pertemuan *offline* dibikannya malam ketika teman-teman perempuan enggak bisa datang. Atau, mungkin dalam diskusinya tidak melibatkan sensitivitas gender yang ada di situ. Maksudnya, bagaimana pendapat dari perempuan dan laki-laki bahwa mereka punya pengalaman dan mungkin latar belakang pemikiran yang berbeda-beda. Jadi, mungkin masih perlu dibenahi di sini, bahkan di CSO sendiri.” (Wawancara DI, Juli 2021)

5. Mendorong Pengakuan Identitas terhadap Kelompok Terpinggirkan

Identitas nasional adalah jati diri sebuah bangsa yang dimanifestasikan dari beragam nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya etnisitas, kesukuan, ras, agama, bahasa, dan berbagai bentuk perbedaan lainnya yang menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini bermakna bahwa realitas keberagaman yang terdapat di Indonesia tidaklah dimaknai sebagai sebuah permasalahan atau hambatan, melainkan seluruh identitas lokal tersebut dapat meleburkan diri menjadi satu kesatuan (*Bhinneka Tunggal Ika*). Meski demikian, dalam praktiknya, berbagai persoalan muncul di permukaan akibat perbedaan tersebut. Identitas nasional dalam konteks masyarakat multikultural memang harus dipahami berbeda dibandingkan dengan negara yang monokultur. Multikulturalisme sebagai bentuk integrasi seharusnya menerima, mengakui, menjaga, dan memelihara keragaman identitas itu sendiri, terutama identitas minoritas. Di era demokrasi digital saat ini, gesekan identitas dapat terjadi dengan sangat mudah yang berujung pada polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan identitas terhadap kelompok marginal—seperti masyarakat adat, penghayat kepercayaan, perempuan nelayan, dan minoritas lainnya—menjadi pekerjaan rumah yang semakin tidak mudah.



Gambar 18. Ragam dan sebaran bahasa menunjukkan identitas bangsa yang multikultur.

Sejumlah OMS dalam FGD mengadvokasi pengakuan atas identitas kelompok perempuan melalui strategi media. Kiara, PPNI, bersama Jurnal Perempuan menunjukkan eksistensi perempuan nelayan dan mendesak pengakuan atas profesi perempuan nelayan melalui blog dalam *website* dan video dokumenter di kanal YouTube. Dokumentasi tersebut dipakai sebagai salah satu alat untuk mendesak agar negara memberi pengakuan atas identitas mereka. Dengan berbagai dokumentasi digital, Kiara menunjukkan keterlibatan perempuan nelayan dalam profesi kenelayanan. Dalam video dokumenter yang dipublikasikan secara *online* tersebut, ditunjukkan bagaimana perjuangan perempuan nelayan mendapat pengakuan dari negara, yakni perubahan status profesi di KTP yang sebelumnya adalah ibu rumah tangga menjadi nelayan. Selain Kiara dan PPNI, Perempuan AMAN juga menggunakan media sosial untuk tujuan rekognisi atas eksistensi perempuan adat.

Perempuan AMAN melakukan *mainstreaming* masyarakat adat dan perempuan adat. Melalui media sosial, Perempuan AMAN memublikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perempuan adat. Tujuannya agar masyarakat luas menyadari dan mengakui keberadaan mereka. Melalui berbagai platform media sosial, Perempuan AMAN mendesak negara memberi pengakuan terhadap perempuan adat dengan mengesahkan RUU-Masyarakat Adat. Sebab, dengan keberadaan undang-undang tersebut, hak kolektif perempuan adat dapat terlindungi. Kedua OMS ini melakukan penguatan pada kelompok perempuan melalui pelatihan; membangun kesadaran publik melalui narasi dalam blog tentang pengalaman konkret kelompok perempuan yang didampingi, melakukan kampanye dan advokasi kebijakan melalui media sosial, serta mendorong kesadaran publik tentang identitas kelompok perempuan nelayan dan perempuan adat.

6. Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Berdasarkan kerja-kerja OMS, diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu persoalan yang membuat rentan posisi perempuan dalam keluarga dan/atau dalam komunitas. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terjadi karena adanya relasi yang timpang dan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap gender tertentu. Kekerasan terhadap perempuan juga dapat disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang tercatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) Indonesia memperlihatkan bahwa diperlukan perlindungan dan jaminan terhadap perempuan untuk menekan angka kasus kekerasan di Indonesia.

Merespons tingginya tingkat kekerasan, sejumlah OMS melakukan beragam upaya berbasis digital untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Rahima, misalnya, membangun ruang aman digital bagi korban kekerasan seksual. Komunitas perempuan ulama menggunakan media digital sebagai ruang aman untuk membagi pengalaman kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Berdasarkan pengalaman tersebut, dibuatlah

video kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan yang dibagikan dalam kanal-kanal media sosial milik Rahima. Melalui aplikasi grup WhatsApp, Rahima juga membangun sistem dukungan mental terhadap sesama anggota komunitas yang menghadapi tekanan berlipat semasa pandemi Covid-19. Selain itu, Rahima juga melakukan mobilisasi gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan dan dukungan kepada RUU PKS. Dalam kampanye 16 HKTP yang dilakukan melalui berbagai platform media Rahima, mereka mengangkat pengalaman dan suara ulama perempuan terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kemajuan TIK seharusnya dapat membantu proses pemenuhan hak korban. Jika kondisi infrastruktur mendukung dan keterampilan TIK dimiliki oleh para perempuan, pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual dan berbagai pelanggaran HAM perempuan dapat diproses secara lebih cepat. Hasil survei INFID terhadap 2.210 responden di seluruh Indonesia pada Mei-Juli 2020 mencatat sekitar 71,8% masyarakat di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual, baik pada diri sendiri, keluarga, maupun orang lain yang dikenalnya. Dari jumlah tersebut, 65,1% responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual. Sebanyak 27,4% responden pernah mendapat pemaksaan perkawinan. Sebanyak 12,3% responden pernah dipaksa memakai kontrasepsi. Pengalaman OMS Lappan Maluku menunjukkan bahwa karena ketimpangan digital, perempuan korban mengalami kerentanan yang semakin berlapis.

“Kita ini pendampingan kasus saat pandemi ada 202 kasus. Yang paling tinggi memang KDRT. Tapi nomor 2 adalah pemerkosaan. Kekerasan seksual dari situ ada sekitar 15 anak yang hamil dengan usia 12-15 tahun. Saat dirujuk ke kami, kondisinya sudah kurus, karena tidak bisa mengakses layanan, tinggal di desa, tidak ada informasi, lalu tidak tahu mau menghubungi siapa. Dalam keadaan seperti itu, kepolisian selalu merujuk ke kami. Ketika kami melakukan penjangkauan kepada korban, kami harus berjalan kaki. Bahkan, pernah kami jalan keliling Pulau Seram dari jam 08.00 sampai pulang jam 02.00 subuh, karena harus turun naik gunung. Belum lagi lanjut ke permukiman warga, jalanan rusak, kita lanjut dengan berjalan kaki. Apalagi anak-anak yang diperkosa itu sangat sulit sekali. Jadi, jika teknologi memang merata, proses penanganan kasus dapat menjadi lebih mudah, karena menghemat waktu, proses, dan biaya. Dengan akses TIK memadai, komunikasi dan interaksi antara kelompok dampingan dan pendamping bisa terbangun.” (FGD 12 April 2021, Lappan Maluku)

Senada dengan Lappan Maluku, OMS PPNI juga merasakan tantangan dalam melakukan advokasi hak korban di komunitas nelayan. Tantangan tersebut karena persoalan infrastruktur.

“Komunikasi sangat sulit, sehingga saya butuh kesabaran yang luar biasa ketika pendampingan kasus-kasus yang *urgent*. Ada kasus-kasus yang membutuhkan koordinasi cepat. Namun kami terhambat dari komunikasi tersebut karena tidak ada sinyal. Banyak juga yang tidak memiliki HP, sehingga membuat proses pendampingan juga ada hambatan.” (FGD 12 April 2021, PPNI)

7. Pengawasan Kebijakan Publik

Kemajuan TIK dan internet diharapkan dapat mendorong transformasi sosial di mana segala kegiatan publik bersifat lebih transparan dan akuntabel. Konektivitas yang luas dan mudah serta keterbukaan informasi digital membuat pengawasan dapat dilakukan secara lebih baik. Dari hasil studi, terdapat dua contoh OMS yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran hak perempuan rentan, yaitu OMS HWDI dan OMS Perempuan AMAN. OMS HWDI melakukan pengawasan terhadap dana bantuan kelompok disabilitas. Menurut HWDI, mereka melakukan pengawasan secara digital terkait jenis bantuan, efektivitas, dan kualitas bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kelompok disabilitas. Penguasaan TIK pada kelompok rentan terkait dengan gerakan dunia, yakni hak atas informasi—transparansi. Transparansi sendiri dapat dimaknai sebagai segala jenis upaya yang dilakukan oleh warga negara untuk mendapatkan informasi di domain publik yang sebelumnya bersifat buram menjadi jelas (Joshi, 2010). Informasi yang sebelumnya tidak dapat dan/atau sulit diakses menjadi dapat dijangkau oleh semua pihak. Artinya, dalam konteks kerja advokasi yang dilakukan HWDI, akses dan penguasaan terhadap TIK berkait erat dengan proses transparansi.

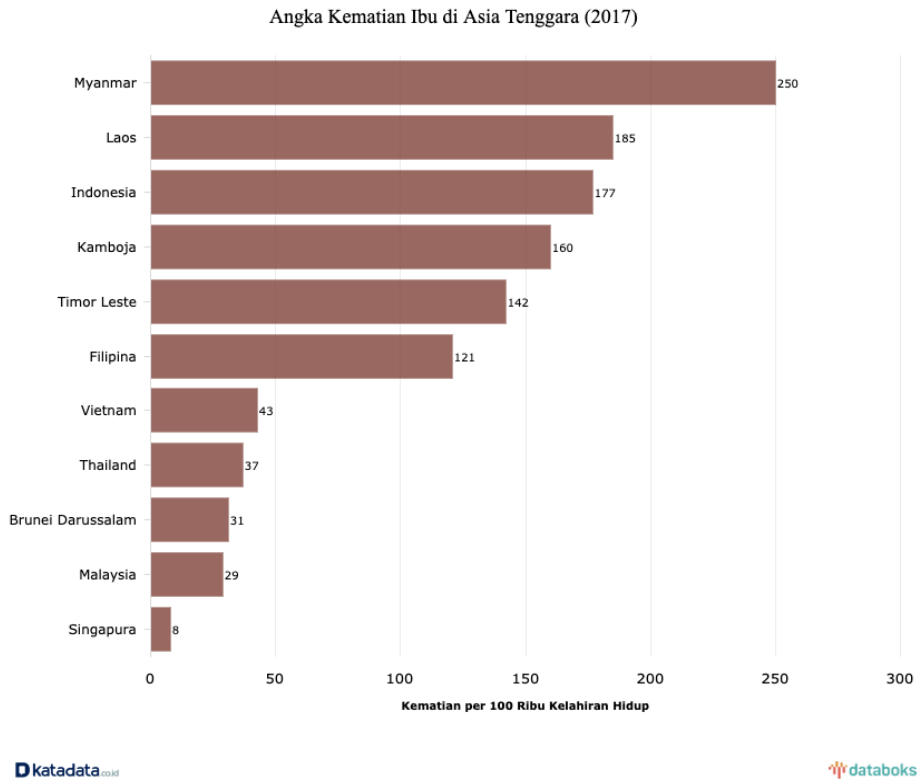
Perempuan AMAN dengan kemajuan TIK juga memberdayakan perempuan adat untuk dapat melakukan dokumentasi digital terkait pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat. Para perempuan adat saat ini sudah dapat membuat foto dan video terkait kejadian di sekitar mereka, dan kemudian menginfokannya kepada Perempuan AMAN pusat (Bogor). Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh perempuan adat adalah isu konsesi lahan, yaitu PTPN II. Perempuan adat di sana sering mengambil foto, menunjukkan kondisi yang mereka hadapi. Berdasarkan laporan dan info perempuan adat, OMS Perempuan AMAN mengolahnya menjadi video yang dijadikan sebagai materi kampanye.

Lappan Maluku adalah OMS yang memberikan pendampingan akar rumput bagi perempuan desa/pulau di Maluku. Mereka mendapati bahwa kualitas infrastruktur jaringan di wilayah tersebut sangatlah tidak memadai. Berdasarkan pengamatan Lappan Maluku, buruknya kualitas infrastruktur membuat kondisi perempuan desa semakin rentan. Persoalan yang dialami antara lain sulitnya melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian bila terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan di pedesaan. Lappan Maluku mendorong pemerintah desa melalui dana desa menyediakan infrastruktur jaringan untuk masyarakat desa. Dalam hal ini, Lappan Maluku sebagai OMS mengambil peran pendidikan publik bagi masyarakat tentang bagaimana pentingnya mengawasi penggunaan dana publik. Peran OMS pada proses ini adalah menjembatani antara *supply* dari negara dan *demand* dari warga negara serta kelompok masyarakat sipil (Wittemyer *et al.*, 2014, hlm. 30); memastikan agar kebutuhan spesifik dari komunitas atas teknologi menjadi prioritas pemerintah atau pengambil kebijakan.

8. Pemenuhan HKSR Perempuan

Wacana tentang Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) atau *Sexual and Reproductive Health and Rights* (SRHR) bukanlah sebuah diskursus yang baru. Gagasan ini telah mengemuka sejak dibahas pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development/ICPD*) tahun 1994 dan Konferensi Dunia tentang Perempuan yang Keempat (*Fourth World Conference on Women*) tahun 1995. HKSR itu sendiri mencakup hak semua individu untuk membuat keputusan mengenai aktivitas seksual dan reproduksi mereka yang bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan (Dhewy, 2017). Secara khusus, akses atas HKSR memastikan individu dapat memilih apakah, kapan, dan dengan siapa terlibat dalam aktivitas seksual; untuk memilih apakah dan kapan mempunyai anak; serta untuk mengakses informasi dan sarana untuk melakukannya. Meskipun 20 tahun lebih sudah berlalu sejak konferensi yang pertama kali secara eksplisit mengakui hak reproduksi sebagai hak asasi manusia sekaligus menandai perubahan cara pandang dunia dalam melihat isu populasi, data yang ada memperlihatkan bahwa banyak orang, terutama mereka yang paling terpinggirkan, masih kesulitan mendapatkan akses atas HKSR.

Di tataran regional ataupun global, statistik terkait rasio kematian ibu, tingkat melahirkan remaja, angka kebutuhan keluarga berencana (KB), atau kontrasepsi yang tidak terpenuhi dan indikator HKSR yang lain masih menjadi keprihatinan serius. Di sejumlah negara, termasuk Indonesia, bahkan sterilisasi sukarela, kontrasepsi darurat, dan aborsi yang aman sering dilarang atau sulit diakses. Di Indonesia, berdasarkan data Bank Dunia, Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi. AKI di Indonesia tercatat sebesar 177 kematian per 100 ribu kelahiran hidup pada 2017. Meskipun rasio itu sudah lebih baik dari belasan tahun sebelumnya, AKI Indonesia masih ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Negara yang punya AKI lebih besar dari Indonesia adalah Myanmar (250 kematian per 100 ribu kelahiran hidup) dan Laos (185 kematian per 100 ribu kelahiran hidup). AKI di Kamboja, Timor Leste, dan Filipina juga masih di atas 100 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara, lima negara lainnya di Asia Tenggara memiliki AKI yang lebih baik karena sudah di bawah 100 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Kelima negara tersebut adalah Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura.



Gambar 19. Angka kematian ibu di Asia Tenggara (2017).

Data ini tentu bukan kabar yang baik. HKSR adalah hal mendasar bagi perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang produktif, sehat, dan sejahtera. Dalam advokasi HKSR ini, beberapa isu lain juga terkait erat, seperti akses dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi universal, pendidikan seksual, serta penghapusan kekerasan berbasis gender, pernikahan paksa, pernikahan anak, dan sunat perempuan. HKSR juga memungkinkan perempuan dan anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan serta masuk ke dunia kerja yang pada gilirannya akan membantu perempuan menjadi lebih berdaya dan kehidupannya lebih sejahtera. Karena itu, akses atas HKSR akan mendorong kesetaraan gender. Sebaliknya, pengabaian terhadap pemenuhan HKSR akan menciptakan ketimpangan, memperluas kesenjangan, dan melanggengkan ketidakadilan.

Maka, jelas bahwa HKSR merupakan isu kunci pembangunan. Di tataran global, inisiatif untuk memasukkan HKSR ke dalam agenda pembangunan telah dilakukan sejak 2012; dan beberapa agenda HKSR diadopsi dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ketiga dan kelima. Menyikapi perkembangan tersebut, beberapa OMS berupaya memasukkan HKSR sebagai *concern* utama dalam program mereka di era digital ini. OMS Lappan Maluku, misalnya, melakukan advokasi terhadap pemenuhan HKSR perempuan dengan strategi digital. Di Maluku, perempuan kondisinya buruk karena tidak terkoneksi dengan internet, informasi dan layanan HKSR menjadi terabaikan. Lappan Maluku melakukan inisiatif membuat viral narasi kerentanan para perempuan. Karena kampanye

tersebut, persoalan sulitnya akses layanan HKSR perempuan di Maluku mendapat perhatian pemerintah setempat. Persoalannya seperti tidak adanya air bersih, sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan (ibu hamil harus ditandu dengan bambu), dan pemerkosaan terhadap anak perempuan. Narasi tersebut ditampilkan dalam media sosial agar diketahui secara luas dan direspons oleh pemerintah.

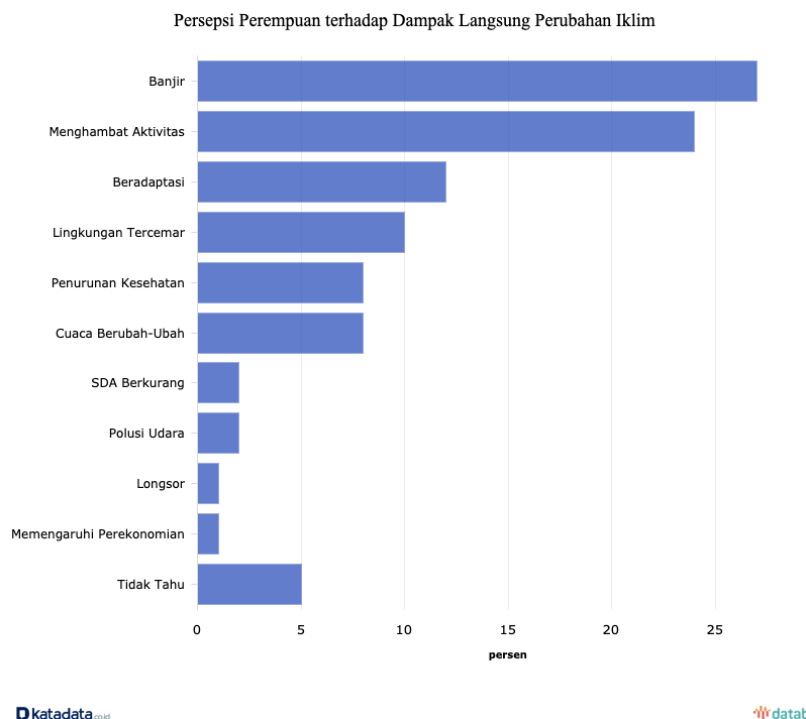
9. Kampanye Pelestarian Lingkungan

Media sosial menjadi platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Media sosial sendiri merupakan media *online* di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan beragam konten. Fenomena kontemporer dalam media sosial yang muncul adalah pemanfaatan media sosial untuk menghimpun anggota dalam suatu gerakan sosial tertentu. Pembentukan gerakan sosial diawali dengan adanya pembentukan suatu komunitas virtual yang didasarkan pada kesamaan minat dan tujuan. Uniknya, efektivitas media sosial dalam gerakan sosial, termasuk di dalamnya gerakan peduli lingkungan, terbukti cukup efektif. Dalam waktu yang relatif singkat, media sosial dapat menghimpun banyak dukungan dari para pengguna dan gerakan sosial tersebut, bahkan mampu menghimpun aksi secara *offline* (Kapriani & Lubis, 2014). Peluang inilah yang coba dimanfaatkan oleh OMS dalam melakukan gerakan sosial di internet, khususnya dalam rangka melakukan kampanye-kampanye untuk pelestarian lingkungan hidup. OMS Gita Pertiwi, misalnya, telah melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pemberdayaan dan pengembangan sikap kritis masyarakat (terutama perempuan) melalui isu lingkungan hidup dan keadilan sosial.

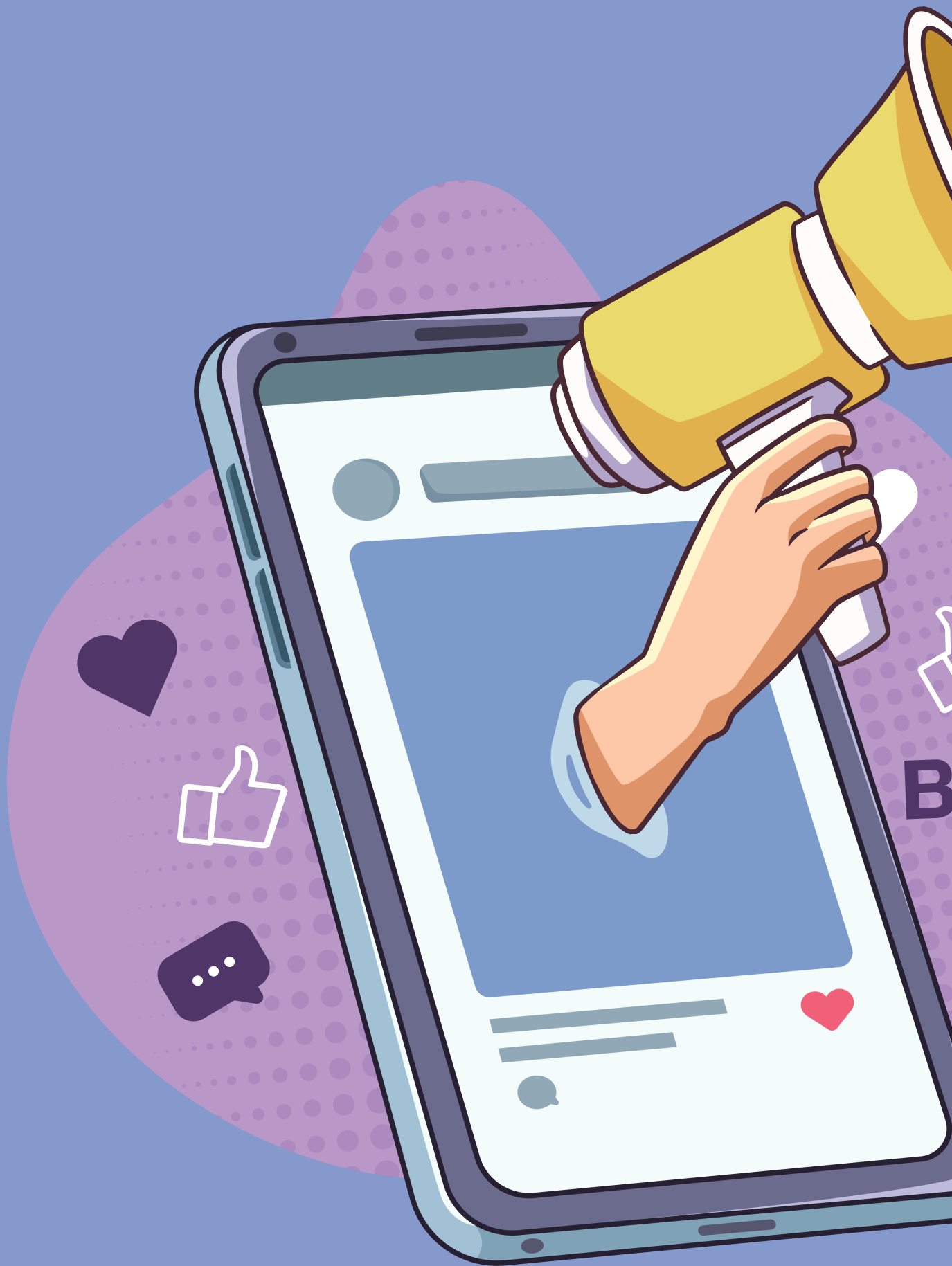
Isu keberlanjutan lingkungan hidup ini menjadi wacana utama bagi para pemimpin dunia, terutama jika dikaitkan dengan perubahan iklim. Hal ini tentu tak lepas dari kiprah para aktivis yang terus mengingatkan terjadinya krisis lingkungan di seluruh penjuru dunia. Banyak OMS lokal, nasional, hingga internasional yang menggunakan internet sebagai senjata untuk membangun solidaritas dan jejaring di negara-negara lain. Sebuah isu lingkungan lokal dapat sekejap menjadi perbincangan global akibat kampanye aktif OMS di internet atau media sosial lainnya. Kampanye-kampanye lingkungan tidak lagi dilakukan secara konvensional di depan parlemen, tetapi bisa juga dilakukan melalui *website*, *mailing list*, dan akun media sosial. Pemerintah yang mengabaikan isu lingkungan tersebut bisa mendapatkan “serangan udara” yang bertubi-tubi di dunia maya. Publik dan masyarakat umum dapat menunjukkan dukungan melalui donasi yang juga bisa dilakukan secara *online*. Metode ini sangat strategis dalam memperkuat kampanye lingkungan kontemporer.

Masalah lingkungan bukanlah persoalan yang bisa ditangani seorang diri. Masalah lingkungan harus terus diangkat ke permukaan dan dibahas agar semakin banyak orang menyadari bahaya krisis lingkungan yang sedang terjadi dan terlibat untuk ikut mengatasi. Isu-isu penting seperti krisis iklim, energi terbarukan, dan air bersih bisa menjadi wacana yang dimengerti

melalui pendidikan di internet. Salah satu strategi menumbuhkan kesadaran lingkungan di era e-demokrasi ini adalah dengan melibatkan publik dalam pembuatan kebijakan terkait, terutama kaum perempuan. Sebab, ketika terjadi krisis dan bencana akibat dari kesalahan dalam mengelola lingkungan, perempuan dan anak-anak biasanya menjadi korban pertama dan sebagai kelompok yang paling rentan. Sebuah hasil survei terhadap 400 responden perempuan di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukkan sebanyak 25,1% perempuan menilai perubahan iklim akan berdampak langsung ke diri mereka sendiri. Dari jumlah tersebut, 27% responden menilai dampak langsung perubahan iklim berupa banjir karena curah hujan tinggi. Sebanyak 24% responden menilai perubahan iklim menghambat kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, peran OMS dalam memanfaatkan TIK dan internet untuk melakukan kampanye lingkungan sudah semestinya melibatkan lebih banyak perempuan sebagai tulang punggung gerakan sosial di dunia maya ataupun nyata.



Gambar 20. Dampak langsung perubahan iklim menurut perempuan (2021).





BAB 5 PENUTUP

1. Kesimpulan

TIK memiliki peran penting menghubungkan perempuan terhadap informasi publik dan dunia digital pada umumnya. Meski demikian, isu ketimpangan gender mempengaruhi kesempatan perempuan untuk mendapatkan akses dan pemanfaatan TIK secara penuh. Berdasarkan studi literatur, diskusi terfokus, dan wawancara mendalam bersama sejumlah informan kunci; diketahui bahwa kondisi ketimpangan gender digital terjadi karena praktik diskriminasi gender masih dilanggengkan dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong kesetaraan gender digital, penting untuk dilakukan agar perempuan dapat terlibat secara penuh dalam kehidupan publik.

Resiko yang hendak muncul dalam skala pembangunan dari praktek diskriminasi gender secara terus menerus yaitu Indonesia berpotensi gagal keluar dari middle income trap dan tidak mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2036. Hal ini mengingat potensi ekonomi yang dapat diciptakan oleh keterlibatan perempuan dalam ekonomi digital jika mereka mendapat akses yang setara dalam TIK. Hal ini dibuktikan pada situasi di mana perempuan bahkan dapat menjadi motor penggerak UMKM dan menciptakan ketahanan ekonomi keluarga di masa pandemi COVID-19. Dapat dibayangkan jika keterlibatan perempuan dalam ekonomi digital didukung secara struktural melalui prioritas kebijakan, dampak positif yang muncul bagi perekonomian Indonesia di era digital akan sangat masif.

Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik dapat diakselerasi dengan akses dan penguasaan terhadap TIK. Dengan adanya akses dan penguasaan terhadap TIK, perempuan diharapkan dapat berpartisipasi dalam urusan publik, yakni demokrasi di tingkat lokal. Perempuan juga diharapkan dapat terlibat dalam pembentukan agenda publik, menyatakan pendapat, dan menuntut akuntabilitas dari aktor serta otoritas publik seperti pemerintahan di tingkat lokal dan nasional.

Studi ini menemukan asosiasi yang sangat kuat antara TIK dan “internet” sebagai sesuatu yang dianggap sama oleh informan kunci. Padahal, TIK itu sendiri memiliki banyak varian, bentuk, dan perkembangannya. Asosiasi internet sebagai teknologi yang dominan dalam TIK menunjukkan bahwa era digital saat ini tak lain adalah era internet. Untuk mencapai konektivitas yang bermakna di era digital saat ini, ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi, seperti adanya akses internet secara reguler, perangkat yang memadai, kecukupan data internet, serta tersedianya jaringan internet yang stabil dan cepat.

Persoalan yang dihadapi kelompok-kelompok perempuan sangatlah kompleks. Hasil riset terdahulu menunjukkan masih adanya hambatan motivasi/mental (terkait tantangan kultural, stereotip, dan rasa inferior terhadap teknologi), akses material (terkait kepemilikan perangkat dan akses internet), serta hambatan keterampilan (terkait penguasaan penggunaan perangkat dan aplikasi) yang berujung pada ketimpangan dan kurang optimalnya pemanfaatan TIK oleh perempuan di Indonesia.

Ketimpangan gender digital yang dialami oleh perempuan disebabkan oleh akumulasi dari kategori identitas yang melekat pada dirinya dan ketimpangan struktural yang lebih luas. Hal ini menyebabkan respons terhadap hambatan budaya dan psikologis menjadi penting. Sebab, hal tersebut akan berdampak pada motivasi perempuan untuk lebih terlibat dan mempelajari TIK.

Intervensi pada hambatan kultural dan mental merupakan salah satu faktor pendorong bagi perempuan untuk memiliki akses material terhadap TIK. Ketimpangan pada akses material itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti demografi (usia, jenis kelamin, ras, inteligensi, kepribadian, dan kemampuan) serta kategori posisi (pekerjaan, pendidikan, dan jejaring sosial). Selain itu, dengan adanya gelombang pandemi COVID-19, perempuan memiliki kondisi menanggung beban yang berlapis-lapis.

Pada sisi geografis, perempuan yang berada di pedesaan atau di daerah yang belum terjangkau sarana dan prasarana internet memiliki beban yang berlipat. Perempuan yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) mengalami hambatan berlipat dibanding perempuan di tempat lain.

Selain jangkauan, kecepatan koneksi internet di Indonesia juga masih tertinggal dibanding negara-negara lain di dunia. Rendahnya tingkat dan mutu pendidikan pun berdampak

langsung pada akses serta penguasaan TIK seseorang. Sebab, kemampuan untuk mempelajari TIK menuntut penguasaan pada pendidikan dasar seperti baca tulis dan bahasa.

Dalam merespons ketimpangan pada penguasaan (akses material) dan keterampilan TIK, seluruh informan FGD telah melakukan kegiatan/program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas terhadap kelompok-kelompok perempuan marginal. Berdasarkan kerja advokasi yang dilakukan OMS, terdapat sejumlah kegiatan pemberdayaan TIK yang dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pendampingan.

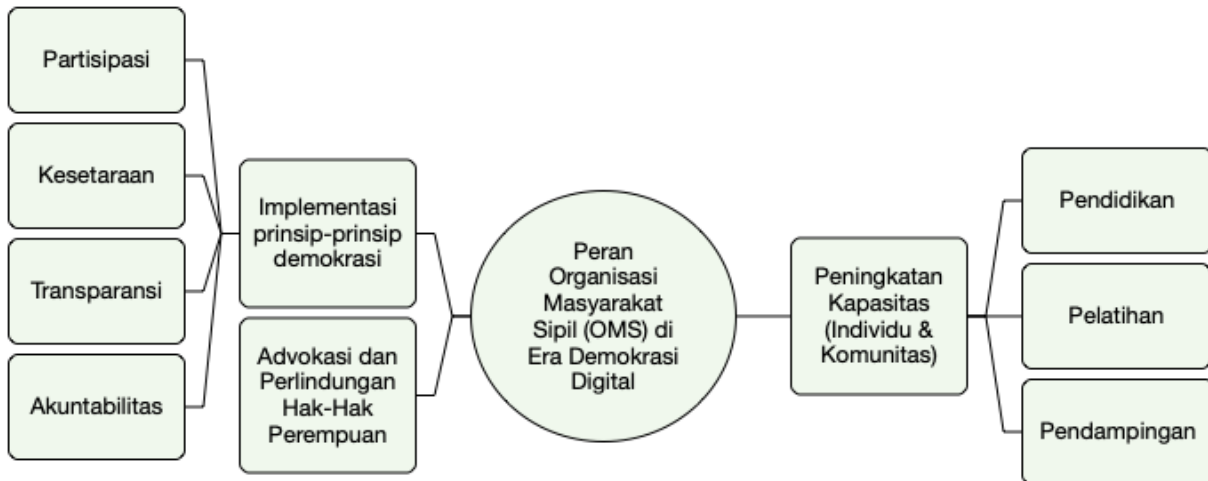
Meski data menunjukkan bahwa 64,5% dari total UMKM Indonesia dikelola oleh perempuan, lebih dari separuh pelaku UMKM perempuan belum berjualan *online*. Fakta ini tidak mengherankan ketika kita melihat dominasi penggunaan internet di Indonesia adalah untuk aktivitas sosial (media sosial dan hiburan) dibanding aktivitas ekonomi.

Secara umum, dampak positif TIK bagi OMS dan perempuan adalah kemampuannya dalam memperluas jangkauan kolaborasi dan mempermudah akses informasi. Tak kalah penting, selama pandemi COVID-19, keberadaan TIK telah membantu adaptasi perempuan pekerja ataupun perempuan secara umum.

Meskipun demikian, dampak negatif TIK juga tidak sedikit yang mengancam perempuan, seperti soal keamanan data pribadi, kekerasan berbasis gender *online*, pornografi anak, menjamurnya pinjaman *online* (pinjol) yang menyasar perempuan ibu rumah tangga, dan isu-isu keamanan digital lainnya.

Konsep kesenjangan gender digital merupakan gagasan yang penting untuk memahami bagaimana akses yang timpang dalam TIK, yang sebenarnya terkait erat dengan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat. Walaupun penetrasi TIK dan internet terus meningkat, sejumlah riset dan pengalaman empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan TIK—khususnya internet—lebih banyak dinikmati oleh laki-laki daripada perempuan. Teknologi ini juga lebih dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan Jawa serta mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan yang tinggi. Jika ketimpangan digital ini terus dipertahankan, alih-alih kemajuan TIK akan membawa keadilan sosial dan masyarakat yang lebih inklusif serta demokratis, ia justru akan semakin mempertajam ketimpangan dan eksklusi sosial yang sudah ada. Oleh sebab itu, pemetaan ketimpangan gender digital menjadi penting, terutama untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang terpinggirkan, bagaimana mereka terpinggirkan, dan bagaimana mereka dapat diberdayakan.

Pertanyaan di atas dijawab melalui studi ini berdasarkan peran serta kerja pendampingan perempuan dan TIK yang telah dilakukan oleh sejumlah OMS di Indonesia.



Gambar 21. Peran OMS dalam mendorong kesetaraan gender di era demokrasi digital.

Hasil studi menunjukkan sejumlah hambatan bagi perempuan untuk mengakses internet secara adil dan setara. Beberapa hambatan tersebut antara lain berhubungan dengan aspek motivasi/mental, akses material terkait dengan kepemilikan perangkat dan internet, serta hambatan keterampilan/penguasaan. Sebagian besar OMS dalam studi ini telah memberikan literasi digital terhadap kelompok rentan dan perempuan marginal. Selain memberikan pelatihan teknis untuk menggunakan perangkat dan aplikasi, OMS juga memberdayakan perempuan dalam menggunakan internet untuk kegiatan sosial dan ekonomi produktif lainnya. Melalui keterampilan menggunakan internet dan media sosial lainnya, perempuan didorong untuk semakin terlibat dalam kehidupan publik digital.

Setidaknya terdapat lima tingkat pemerataan yang harus dilakukan untuk mendorong pemberdayaan perempuan (Saptandari, 1999). *Pertama*, pemerataan tingkat kesejahteraan. Pemerataan kesejahteraan ini mutlak diperlukan untuk mengurangi ketimpangan gender. Tanpa pendapatan yang cukup dan kepemilikan aset ekonomi, akan sangat sulit bagi perempuan untuk mendapatkan akses material TIK, sekalipun secara mental dan motivasi mereka telah memiliki. *Kedua*, pemerataan akses, yaitu peningkatan kemampuan perempuan untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kesempatan kerja, akses pendidikan dan pelatihan yang baik, serta setara dengan kaum laki-laki.

Ketiga, pemerataan kesadaran. Ketika kesejahteraan dan akses sudah diperoleh, langkah yang berikutnya adalah meningkatkan kesadaran (*awareness*). Melalui kesadaran ini, perempuan diharapkan dapat menentukan prioritas untuk mengembangkan diri dengan dorongan dari dalam diri sendiri. *Keempat*, pemerataan partisipasi. Perempuan tidak boleh lagi dianggap sebagai kelas dua atau objek kemajuan TIK semata, tetapi harus ikut serta dalam mendapatkan manfaat dari TIK. *Kelima*, pemerataan penguasaan. Melalui pemerataan penguasaan dan partisipasi aktif dalam demokrasi digital ini, perempuan diharapkan memiliki kontrol yang lebih baik dalam setiap proses pengambilan keputusan di semua level atau tingkatan.

Fungsi dan manfaat lain dari internet juga telah ditunjukkan dalam berbagai program pendampingan OMS, seperti akses internet dapat memberdayakan ekonomi perempuan, advokasi hak-hak perempuan, pemenuhan HKSR, pendampingan korban kekerasan, dan mobilisasi/kampanye lingkungan hidup. Dalam pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan oleh OMS, secara langsung ataupun tidak langsung telah terdapat proses penguatan kapasitas kepemimpinan dan kapasitas organisasi, baik bagi anggota OMS maupun kelompok yang didampingi.

Pendidikan publik yang dilakukan oleh sejumlah OMS memastikan agar pengaruh stereotip budaya yang seksis dapat diputus atau diminimalkan dampaknya bagi keterlibatan perempuan di ruang publik. OMS berupaya memastikan agar perempuan menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, khususnya dalam penguasaan dan pemanfaatan TIK/internet.

Jika dirangkum, peran OMS dalam mendorong kesetaraan gender di era demokrasi dan digital saat ini dapat dibagi ke dalam tiga peran. *Pertama*, peran OMS dalam peningkatan kapasitas individu dan kelompok yang dijalankan melalui berbagai pelatihan, pendidikan, dan pendampingan. *Kedua*, OMS berperan dalam memperluas advokasi dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan melalui pemanfaatan TIK dan internet. *Ketiga*, OMS juga menjalankan peran secara langsung ataupun tidak langsung dalam implementasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas melalui pemanfaatan TIK. Ketiga peran ini membutuhkan dukungan dari sesama gerakan masyarakat sipil lainnya ataupun dari publik yang lebih luas agar OMS dapat terus memastikan ketiganya dapat berkelanjutan di era e-demokrasi saat ini dan di masa yang akan datang.

2. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini telah mencoba memeriksa persoalan ketimpangan gender digital yang dialami oleh kelompok perempuan menggunakan kerangka konseptual yang merupakan kombinasi antara kerangka teori Van Dick (2005) dan DDI-ESCAP. Melalui kerangka konseptual tersebut, penelitian ini hendak menunjukkan kelompok identitas mana yang masih mengalami ketimpangan digital.

Penelitian ini tentu tidak mampu memotret seluruh permasalahan di lapangan yang sangat kompleks. Meski demikian, dengan mendengarkan suara dari kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan—yang diwakili oleh OMS yang terlibat langsung dalam mendampingi banyak kelompok rentan—diharapkan penelitian ini mampu menangkap lebih banyak gejala dan problematika di lapangan.

Di samping itu, penelitian ini juga mendengarkan para perempuan praktisi IT, perempuan aktivis, dan perempuan politisi yang mengalami secara langsung jalin kelindan antara pemanfaatan TIK, ketimpangan gender, dan problem demokrasi lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mendapatkan pemahaman terkait tantangan dan hambatan keterlibatan perempuan dalam TIK, pihak-pihak terkait perlu melakukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek kesenjangan digital dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan.

Pendekatan penelitian lebih lanjut perlu memahami kompleksitas norma gender yang menghalangi keterlibatan penuh perempuan dalam TIK. Berdasarkan pendampingan yang dilakukan oleh OMS, terlihat bahwa ketimpangan gender digital bukan hal yang natural, melainkan implikasi dari konstruksi nilai sosial dan struktur yang diskriminatif, sehingga negara perlu menghadirkan kebijakan khusus yang mengenali situasi-situasi tersebut.

Untuk memastikan keterlibatan penuh perempuan dalam TIK, kebijakan harus menarget pada penghapusan diskriminasi gender, tidak hanya pada aspek TIK, tetapi dalam segala aspek, karena setiap aspek saling terhubung. Selain aspek fisik dari TIK, penting juga untuk mengintervensi pada aspek keterampilan kelompok perempuan marginal dengan mereplikasi sejumlah inisiatif yang telah dijalankan oleh OMS.

Literasi digital adalah isu penting dalam mendorong keadilan dan kesetaraan dalam digital. Literasi digital tidak dapat berdiri sendiri, ia perlu didukung dengan kualitas literasi dasar lainnya. Artinya, aspek pendidikan perlu juga diintervensi. Pendidikan inklusif adalah bagian integratif dari pemberdayaan perempuan dalam TIK. Para pemangku kepentingan perlu terus memastikan dan menumbuhkan motivasi kelompok perempuan untuk semakin terlibat dalam TIK.

Diperlukan kerja sama multisektor untuk peningkatan kapasitas TIK pada kelompok perempuan. OMS dapat berperan sebagai aktor yang membantu pemetaan permasalahan dan kebutuhan dari kelompok rentan. Di sisi lain, OMS perlu secara aktif membangun narasi serta kesadaran di kalangan masyarakat dan pengambil kebijakan bahwa kelompok perempuan harus dan layak menerima manfaat kemajuan TIK.

Dari hasil pengumpulan data dan berbagai dialog konstruktif tersebut, penelitian ini menyusun beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing pemangku kepentingan sebagai berikut.

2.1. Rekomendasi untuk Pemerintah

- Memperluas akses, keterjangkauan dan literasi digital, dengan membangun dan menghadirkan internet di desa-desa untuk mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi, khususnya bagi perempuan dan komunitas rentan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
- Pemerataan akses pendidikan dapat menjadi opsi bagi peningkatan kapasitas kelompok perempuan serta opsi jalan keluar dari *Middle Income Trap*. Beasiswa LPDP dapat menjadi opsi pemerataan akses pendidikan dengan cara memperluas kesempatan bagi kaum perempuan dengan kebijakan kuota perempuan 30-50 persen, dan dibukanya Beasiswa Profesi/Vokasi untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli terapan/terampil pada level menengah (*middle skill*).
- Mendukung kebijakan yang kondusif bagi peran OMS (*enabling environment*), termasuk melalui dukungan Pendanaan, Pengakuan dan Kerja Bersama antara pemerintah dan OMS. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan regulasi pendanaan bagi OMS melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa bagi publik.
- Melakukan kolaborasi nyata dengan CSO dan organisasi kelompok perempuan, melalui dukungan kepada kerja-kerja advokasi, pendidikan, dan pemberdayaan politik yang dilakukan oleh OMS pada masyarakat akar rumput.
- Pemerintah harus terus mendorong adanya teknologi digital yang ramah pada perempuan. Tidak hanya ramah alatnya, tetapi juga ramah dari segi pembiayaan (*affordable*). Anggaran terkait pembangunan infrastruktur TIK perlu dipastikan menarget dan mencapai inklusi sosial dan tidak ada yang tertinggal sebagaimana misi SDGs.
- Ketimpangan infrastruktur pada wilayah timur Indonesia, wilayah kepulauan, dan pedesaan perlu direspons dengan pembangunan yang lebih merata. Selain itu, keterjangkauan akses bagi kelompok rentan harus dipastikan dengan berbagai cara seperti memberikan subsidi, menyediakan layanan internet dengan harga terjangkau, serta memberdayakan dan mendukung inisiatif di tingkat komunitas/lokal lainnya.
- Pemerintah harus lebih memperhatikan kehadiran alat bantu digital dalam setiap agenda dan kegiatan pemerintah. Sebab, digital devices itu adalah salah satu kebutuhan primer dari ragam disabilitas, terutama ragam disabilitas sensorik, runtu, runtu wicara, dan netra.
- Keterbukaan informasi publik harus menjadi salah satu prioritas yang dikedepankan. Memenuhi keterwakilan perempuan di semua lini kegiatan dan pengambilan keputusan, termasuk memberikan pengetahuan serta akses kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan keputusan yang ada di setiap level pemerintahan.
- RUU Perlindungan Data Pribadi perlu untuk segera disahkan sebagai bentuk komitmen bersama melindungi hak dan privasi digital setiap warga negara. Komitmen ini bisa mengacu pada praktik *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang berlaku di Uni Eropa.

2.2. Rekomendasi untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

- OMS diharapkan menggunakan alat bantu digital yang ramah bagi kelompok disabilitas sebagai langkah konkret untuk memberikan kesamaan akses, kesempatan, dan kesetaraan bagi setiap kelompok.
- Mengembangkan intranet dan *Management Information System* (MIS) untuk memperkuat konektivitas di dalam internal OMS. MIS diharapkan akan mampu memangkas birokrasi dan pola hierarki yang feodal.
- Membuat, mengembangkan, dan menyebarkan konten-konten digital mengenai hak-hak perempuan sebanyak mungkin agar mudah diakses oleh kaum perempuan dan laki-laki sebagai upaya mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang.
- Memanfaatkan internet untuk lebih banyak menggalang dukungan dan donasi (*fundraising*) publik sebagai jalan mengurangi stigma OMS sebagai agen asing. *Fundraising* juga bisa menjadi dukungan moral dan politik bagi komunitas OMS.
- Memulai pelatihan-pelatihan *online* melalui saluran media sosial yang mudah diakses oleh publik dengan materi yang penting dan ramah bagi pengguna.
- Memberikan perhatian dan anggaran secara khusus untuk pengembangan TIK di lembaga OMS, misalnya dengan peningkatan kapasitas teknis divisi TIK dan pelibatan tim TIK untuk setiap program OMS.
- Mendorong para pendamping dan pegiat perempuan di daerah untuk lebih memahami kegiatan atau agenda yang dapat dimasukkan dalam RPJMDes, sehingga mampu untuk memasukkan agenda pelatihan TIK bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya ke dalam rencana pembangunan desa tersebut.

2.3. Riset Lanjutan untuk Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti di Masa Depan

- Riset di sekitar kendala-kendala kelembagaan dan politik untuk pemerataan akses digital bagi kelompok rentan dan lapisan low income, baik dengan metode kuantitatif (survei) dan metode kualitatif (studi kasus)
- Riset tentang model-model kelembagaan dan mekanisme demokrasi partisipatori yang lebih membuka ruang bagi suara dan pengaruh kaum perempuan dan kelompok sosial rentan
- Penelitian tentang syarat syarat kelembagaan bagi partisipasi sektor privat (bisnis) dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan demokrasi. Kajian mengenai hal ini masih sangat terbatas

LAMPIRAN: INSTRUMEN PENELITIAN

Tujuan: 1) Menggali bukti-bukti adanya ketimpangan gender, khususnya yang dialami oleh perempuan, dalam dunia TIK dan politik/demokrasi. 2) Menggali peran dan strategi CSOs dalam mengurangi ketimpangan gender di Indonesia.

Metode: Wawancara mendalam melalui aplikasi Zoom

Panduan Wawancara Mendalam

Kode	Perempuan Praktisi Teknologi	Kode	Politisi/Aktivis Perempuan*	Kode	CSOs
A	Pengetahuan dan Akses	A	Pengetahuan dan Akses	A	Pengetahuan dan Akses
A.1.	Kapankah Anda pertama kali terjun ke dunia kerja yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)?	A.1.	Kapankah Anda pertama kali terjun ke dunia aktivis/politik?	A.1.	Kapankah Anda pertama kali terjun ke dunia CSOs? Ceritakan peran/posisi apa saja yang pernah Anda jalani.
A.2.	Mengapa Anda memilih bekerja dalam dunia TIK? Jelaskan peran/posisi yang Anda jalani di perusahaan saat ini.	A.2.	Mengapa Anda memilih berkecimpung di dunia politik? Jelaskan peran/posisi yang Anda jalani di organisasi/partai saat ini.	A.2.	Mengapa Anda memilih bekerja dalam dunia CSOs? Jelaskan peran/posisi yang Anda jalani di organisasi saat ini.
A.3.	Apakah Anda pernah mengetahui/mendengar mengenai kesenjangan/ketimpangan antara pekerja perempuan dan laki-laki pada dunia TIK? (Jelaskan melalui contoh/ilustrasi yang pernah ada/dialami, baik oleh diri sendiri maupun orang lain yang dikenal.)	A.3.	Bisakah Anda ceritakan bagaimana Anda pertama kali mendengar mengenai internet? Misalnya melalui TV, orang lain, atau pendidikan? Dapatkah Anda mengingat bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali mempelajarinya?	A.3.	Apakah Anda/organisasi Anda menggunakan TIK dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev program? Seberapa sering Anda/organisasi Anda menggunakan TIK dalam pelaksanaan program? Teknologi apa yang sering digunakan untuk membantu program Anda?
A.4.	Bagaimanakah situasi (kemampuan/pengetahuan) pekerja perempuan dalam dunia kerja (terutama di perusahaan Anda) bila dibandingkan dengan pekerja laki-laki?	A.4.	Apa saja kegiatan yang sering Anda lakukan ketika online? Mengapa memilih kegiatan tersebut?	A.4.	Bagaimana TIK membantu lembaga Anda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev program? Ceritakan manfaat positif dan dampak negatifnya jika ada (langsung ataupun tidak langsung).
A.5.	Menurut Anda, apakah kesempatan dan akses untuk peningkatan kemampuan/pengetahuan antara pekerja perempuan dan laki-laki dalam dunia TIK sudah setara? (Contoh bila ada training dari perusahaan, apakah kesempatan diberikan secara setara antara perempuan dan laki-laki?) Jika belum, mengapa?	A.5.	Menurut Anda, apa yang dilakukan orang ketika mereka menggunakan internet? Menurut Anda, untuk apa kebanyakan orang menggunakan internet?	A.5.	Apakah Anda memiliki kekhawatiran dalam penggunaan TIK selama perencanaan, pelaksanaan, dan monev program?

Kode	Perempuan Praktisi Teknologi	Kode	Politisi/Aktivistis Perempuan*	Kode	CSOs
A.6.	Apakah perusahaan di tempat Anda bekerja memberikan perlakuan/kebijakan khusus kepada perempuan? Jika ya, bagaimanakah perlakuan/kebijakan tersebut berdampak pada perempuan? (Contoh, apakah ruang kerja perempuan terpisah dengan ruang kerja laki-laki? Apakah ada ruangan laktasi dan lain-lain?)	A.6.	Bisakah Anda ceritakan jam berapa Anda biasanya menggunakan internet? Apakah ada waktu yang lebih nyaman bagi Anda untuk menggunakan internet dan mengapa?	A.6.	Apakah Anda memiliki hambatan dalam mengakses dan memanfaatkan TIK?
A.7.	Bagaimanakah situasi pendapatan pekerja perempuan dalam dunia kerja teknologi informasi bila dibandingkan dengan pekerja laki-laki? Apakah ada perbedaan? Jika ya, bagaimana hal itu bisa terjadi?	A.7.	Untuk terhubung dengan internet, jaringan internet seperti apa yang menurut Anda paling nyaman dan aman untuk Anda gunakan? Wi-Fi di rumah, Wi-Fi di kantor, mobile data di ponsel, atau yang lain? Apa alasannya?	A.7.	Siapakah yang paling sering menggunakan dan mengoperasionalkan TIK dalam organisasi Anda? (Gender: Female/Male/other) Mengapa demikian? Siapa pelaksana dari TIK di lembaga Anda (L/P)? Apakah pelaksana tersebut memiliki latar pendidikan khusus terkait TIK?
A.8.	Apa saja kegiatan yang sering Anda lakukan ketika online? Mengapa memilih kegiatan tersebut?	A.8.	Apakah Anda memiliki kekhawatiran? [misal pernah mengalami pelecehan atau intimidasi online/media sosial; stalking online, atau penggunaan spyware; penyalahgunaan data atau gambar pribadi; pencurian identitas; penipuan; virus; atau paparan konten eksplisit atau tidak pantas.] Pernahkah Anda mengalami hal-hal di atas secara pribadi? Apakah Anda tahu orang lain yang mengalami hal yang sama? Apakah hal tersebut memengaruhi kegiatan online Anda? Mengapa?	A.8.	Apakah kebijakan TIK di lembaga Anda merupakan mandat organisasi atau mandat program (yang dibiayai lembaga dana)? Siapa pengambil keputusan terkait TIK di lembaga Anda (L/P)?
A.9.	Apakah Anda memiliki kekhawatiran? [misal pernah mengalami pelecehan atau intimidasi online/media sosial; stalking online atau penggunaan spyware; penyalahgunaan data atau gambar pribadi; pencurian identitas; penipuan; virus; atau paparan konten eksplisit atau tidak pantas.] Pernahkah Anda mengalami hal-hal di atas secara pribadi? Apakah Anda tahu orang lain yang mengalami hal yang sama? Apakah hal tersebut memengaruhi kegiatan online Anda? Mengapa?	A.9.	Sebagai politisi/aktivis perempuan, apa manfaat internet dan TIK lainnya untuk pengembangan karier politik/aktivisme Anda? Ceritakan manfaat positif dan dampak negatifnya jika ada (langsung ataupun tidak langsung).	A.9.	Untuk terhubung dengan internet, jaringan internet seperti apa yang menurut Anda paling nyaman dan aman untuk Anda gunakan? Wi-Fi di rumah, Wi-Fi di kantor, mobile data di ponsel, atau yang lain? Apa alasannya?

Kode	Perempuan Praktisi Teknologi	Kode	Politisi/Aktivistis Perempuan*	Kode	CSOs
B	Kepemilikan dan Kontrol Terhadap Perangkat Digital	B	Kepemilikan dan Kontrol Terhadap Perangkat Digital	B	Kepemilikan dan Kontrol Terhadap Perangkat Digital
B.1.	Apakah Anda menggunakan [komputer desktop, laptop, tablet, konsol game, ponsel] dan jika Anda menggunakannya, seberapa sering Anda melakukannya?	B.1.	Apakah Anda menggunakan [komputer desktop, laptop, tablet, konsol game, ponsel] dan jika Anda menggunakannya, seberapa sering Anda melakukannya?	B.1.	Apakah Anda menggunakan [komputer desktop, laptop, tablet, konsol game, ponsel] dan jika Anda menggunakannya, seberapa sering Anda melakukannya?
B.2.	[Untuk setiap perangkat yang mereka gunakan secara reguler] Milik siapa, apakah Anda memilikinya secara pribadi atau apakah Anda meminjamnya? Jika Anda memilikinya secara pribadi, di mana sebagian besar Anda menyimpannya dan mengapa? [di rumah, bawa di saku atau tas, di rumah orang lain, perpustakaan, dll.] Jika Anda meminjam, dari siapa Anda meminjamnya?	B.2.	[Untuk setiap perangkat yang mereka gunakan secara reguler] Milik siapa, apakah Anda memilikinya secara pribadi atau apakah Anda meminjamnya? Jika Anda memilikinya secara pribadi, di mana sebagian besar Anda menyimpannya dan mengapa? [di rumah, bawa di saku atau tas, di rumah orang lain, perpustakaan, dll.] Jika Anda meminjam, dari siapa Anda meminjamnya?	B.2.	[Untuk setiap perangkat yang mereka gunakan secara reguler] Milik siapa, apakah Anda memilikinya secara pribadi atau apakah Anda meminjamnya? Jika Anda memilikinya secara pribadi, di mana sebagian besar Anda menyimpannya dan mengapa? [di rumah, bawa di saku atau tas, di rumah orang lain, perpustakaan, dll.] Jika Anda meminjam, dari siapa Anda meminjamnya?
B.3.	[Untuk setiap perangkat yang mereka katakan milik pribadi] Apakah ada orang lain yang ikut menggunakannya? Bagaimana perasaan Anda tentang ini? [perdalam aspek kepemilikan dan penguasaannya terkait dengan relasi gender]	B.3.	[Untuk setiap perangkat yang mereka katakan milik pribadi] Apakah ada orang lain yang ikut menggunakannya? Bagaimana perasaan Anda tentang ini? [perdalam aspek kepemilikan dan penguasaannya terkait dengan relasi gender]	B.3.	[Untuk setiap perangkat yang mereka katakan milik pribadi] Apakah ada orang lain yang ikut menggunakannya? Bagaimana perasaan Anda tentang ini? [perdalam aspek kepemilikan dan penguasaannya terkait dengan relasi gender]
B.4.	Jika Anda tidak memiliki atau memiliki akses pada (device), apakah Anda ingin memiliki atau mengaksesnya? Jika iya, apa yang menghalangi Anda untuk memiliki device tersebut?	B.4.	Jika Anda tidak memiliki atau memiliki akses pada (device), apakah Anda ingin memiliki atau mengaksesnya? Jika iya, apa yang menghalangi Anda untuk memiliki device tersebut?	B.4.	Jika Anda tidak memiliki atau memiliki akses pada (device), apakah Anda ingin memiliki atau mengaksesnya? Jika iya, apa yang menghalangi Anda untuk memiliki device tersebut?
B.5.	Jenis ponsel apa yang dimiliki teman dan keluarga Anda? Apa fungsi utamanya yang mereka sering gunakan? [Gali pengetahuan dan pengaruh lingkaran sosial, serta perbedaan antara akses dan penggunaan ponsel/jenis ponsel laki-laki dan perempuan.]	B.5.	Jenis ponsel apa yang dimiliki teman dan keluarga Anda? Apa fungsi utamanya yang mereka sering gunakan? [Gali pengetahuan dan pengaruh lingkaran sosial, serta perbedaan antara akses dan penggunaan ponsel/ jenis ponsel laki-laki dan perempuan.]	B.5.	Jenis ponsel apa yang dimiliki teman dan keluarga Anda? Apa fungsi utamanya yang mereka sering gunakan? [Gali pengetahuan dan pengaruh lingkaran sosial, serta perbedaan antara akses dan penggunaan ponsel/jenis ponsel laki-laki dan perempuan.]
C.	Kendala/Hambatan	C	Kendala/Hambatan	C	Kendala/Hambatan
C.1.	Apa kendala utama (untuk Anda dan perempuan Indonesia pada umumnya) untuk bekerja di dunia TIK? Mengapa?	C.1.	Apa kendala utama (untuk Anda dan politisi perempuan Indonesia pada umumnya) untuk mengakses dan menggunakan internet? Mengapa?	C.1.	Apa kendala utama CSO di Indonesia pada umumnya untuk mengakses dan menggunakan internet/ TIK? Mengapa?

Kode	Perempuan Praktisi Teknologi	Kode	Politisi/Aktivistis Perempuan*	Kode	CSOs
C.2.	Sebagai perempuan, apakah Anda pernah memiliki kekhawatiran dalam dunia kerja? [misal pernah mengalami pelecehan atau intimidasi online; disusupi spyware oleh perusahaan; penyalahgunaan data atau gambar pribadi; pembagian tugas pekerjaan yang tidak setara/adil antara perempuan dan laki-laki; atau paparan konten yang tidak pantas.] Pernahkah Anda mengalami hal-hal di atas secara pribadi? Jika ya, apa dampak hal di atas terhadap Anda?	C.2.	Apakah ada seseorang yang mungkin mendorong atau mencegah Anda untuk menggunakan internet? Siapa mereka? [Tanyakan tentang dan norma sosial seputar penggunaan internet oleh perempuan. Pertimbangkan juga untuk mengeksplorasi dampak organisasi dan institusi seperti sekolah, pemerintah, atau LSM lokal.]	C.2.	Bagaimana kondisi ketidaksetaraan gender dalam lingkungan CSO? (Bisa pengalaman pribadi informan ataupun orang terdekat.) Bagaimana TIK membantu organisasi Anda dalam meningkatkan kesetaraan gender? (Di dalam ataupun di luar organisasi.)
C.3.	Apakah terdapat pencitraan tertentu (stereotype) terkait gender (perempuan) dalam dunia kerja TIK? Jelaskan.	C.3.	Apakah ada yang membantu Anda sekarang (dalam mengoperasikan akun-akun di media sosial misalnya)? Siapa? Mengapa? [Jelajahi mengapa mereka tidak melakukan sendiri dan apakah kurangnya keterampilan/pengetahuan, atau takut salah adalah penghambat, atau sesuatu yang lain, dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.]	C.3.	Apakah ada praktik baik (best practices) dalam penggunaan TIK untuk peningkatan kesetaraan gender? (Di dalam ataupun di luar organisasi.) Upaya yang telah dan akan dilakukan organisasi Anda dalam meningkatkan kesetaraan gender? (Baik di dalam internal OMS maupun eksternal.)
C.4.	Apakah ada peraturan pemerintah atau perusahaan yang Anda ketahui yang mendiskriminasi perempuan dalam dunia kerja teknologi informasi?	C.4.	Apakah Anda dapat menggunakan internet sebanyak yang Anda inginkan? Apa yang menghentikan Anda dari menggunakannya sebanyak yang Anda inginkan? [Jelajahi khususnya jika norma gender sosial dan budaya lebih memengaruhi penggunaan internet perempuan daripada laki-laki. Jika ya, jelajahi caranya. Misalnya, selidiki: tingkat penggunaan internet mereka saat ini, faktor pendukung/hambatan untuk penggunaan lebih lanjut, apakah mereka menggunakan sebanyak yang mereka mau. Lihat petunjuk yang disarankan tentang hambatan untuk meningkatkan penggunaan internet di pertanyaan berikutnya.] Adakah hal lain yang ingin Anda lakukan lebih banyak? Apa? Mengapa?	C.4.	Menurut Anda, apakah organisasi Anda sudah melaksanakan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan dan implementasi program? Jika sudah, apa contohnya? Jika belum, apa kira-kira hambatannya?

Kode	Perempuan Praktisi Teknologi	Kode	Politisi/Aktivistis Perempuan*	Kode	CSOs
		C.5.	Apakah partai politik/ organisasi di tempat Anda mengabdikan memberikan perlakuan/kebijakan khusus kepada perempuan? Apabila ya, bagaimanakah perlakuan/kebijakan tersebut?	C.5.	Apakah lembaga/organisasi Anda melakukan monev berkala atas konten TIK yang telah ditayangkan di medsos lembaga Anda?
D	Rekomendasi	D	Rekomendasi	D.	Rekomendasi
D.1	Apakah ada saran dan rekomendasi terkait peningkatan/perbaikan kesenjangan/ketimpangan bagi pekerja perempuan dalam dunia kerja teknologi informasi?	D.1.	Apa pendapat Anda terkait dengan internet dan perkembangan politik serta demokrasi di Indonesia saat ini?	D.1.	Apa pendapat Anda terkait dengan internet dan perkembangan CSOs di Indonesia saat ini?
D.2	Apa saja rekomendasi Anda untuk memperkuat demokrasi dan kesetaraan gender di Indonesia untuk saat ini dan di masa mendatang?	D.2.	Apa saja rekomendasi Anda untuk memperkuat demokrasi dan kesetaraan gender di Indonesia untuk saat ini dan di masa mendatang?	D.2.	Apa saja rekomendasi Anda untuk memperkuat demokrasi dan kesetaraan gender di Indonesia untuk saat ini dan di masa mendatang?
D.3	Apakah ada saran dan rekomendasi Anda untuk para perempuan di luar sana yang ingin bekerja di dunia/perusahaan berbasis TIK lainnya?	D.3.	Apakah ada saran dan rekomendasi Anda untuk para politisi/ aktivis perempuan di luar sana, khususnya dalam hal pemanfaatan internet dan TIK lainnya?	D.3.	Apakah ada saran dan rekomendasi Anda untuk CSO-CSO di luar sana, khususnya dalam hal pemanfaatan internet dan TIK lainnya?
D.4	Apakah Anda merekomendasikan informan lain untuk wawancara selanjutnya?	D.4.	Apakah Anda merekomendasikan informan lain untuk wawancara selanjutnya?	D.4.	Apakah Anda merekomendasikan informan lain untuk wawancara selanjutnya?

DAFTAR PUSTAKA

- "Alliance for Affordable Internet 2020". 2020. Affordability Report. Diakses pada 30 Maret 2021, <https://1e8q3q16vyc81g8l3h3md6q5f5e-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/12/Affordability-Report-2020.pdf>.
- A4AI. 2020. "Meaningful Connectivity: A New Target to Raise the Bar for Internet Access." Alliance for Affordable Internet. Diakses pada 5 Mei 2021, <https://a4ai.org/meaningful-connectivity/#:~:text=Meaningful%20Connectivity%20is%20a%20framework,that%20is%20useful%20and%20empowering>.
- Anon. 2020. "Nancy Chodorow's Psychoanalytic Feminism and the Role of Mothering". Available at: <https://socialsci.libretexts.org/@go/page/12218> [Accessed May 17, 2021].
- Arista Y., Evi Z., & Susilo W. 2020. *Jurnal Perempuan*. "Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi".
- Arivia G. & Gina A. 2017. *Jurnal Perempuan*: "Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung".
- APJII. 2020. Laporan Survei Internet APJII 2019-2021 (Q2).
- Antonio, Amy & Tuffley, David. 2014. "The Gender Digital Divide in Developing Countries". *Future Internet*. 6. 673-687. 10.3390/fi6040673.
- Buhr, Daniel. 2017. "Social Innovation Policy for Industry 4.0". Friedrich Ebert Stiftung, diakses pada 5 Mei 2021, <https://library.fes.de/pdf-files/wiso/11479.pdf>.
- Burhan, FA. 2020. "Google Ungkap Alasan 50% Pengusaha Perempuan Belum Berjualan Online", *katadata.co.id*, <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/5fdc64a2e1186/google-ungkap-alasan-50-pengusaha-perempuan-belum-berjualan-online>, diakses pada 15 Juni 2020.
- BPS. 2019. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2019, 250-251. Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia.
- Boll, Christina, and Andreas Lagemann. 2014. "Gender Pay Gap in EU Countries Based on SES". European Commission-Directorate-General for Justice.
- Crenshaw, Kimberle. 1989. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Policies". *University of Chicago Legal Forum* 1989, No. 1; 139-167.
- Dhewy, Anita. 2017. "HKSR dan Kebijakan Pembangunan". *Jurnal Perempuan* Vol. 22, No. 2, Mei 2017.
- Farida, Syarifah Ida. 2018. "Anggaran Responsif Gender Sebagai Suatu Instrumen Negara untuk Pemenuhan Hak Perempuan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, Vol. 1, No. 2, Halaman: 67-86.
- Friedan, Betty. 1963. *The Feminine Mystique*. New York: Norton.
- Gajjala, R. & Mamidipudi, A. 1999. "Cyberfeminism, Technology, and International 'Development'". *Gender & Development*. 7:2, 8-16, DOI: 10.1080/741923122, Hlm. 8.
- Gigler, Björn-Sören; Bailur, Savita. 2014. "Closing the Feedback Loop: Can Technology

- Bridge the Accountability Gap?" Directions in Development--Public Sector Governance;. Washington, DC: World Bank. ©World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18408> License: CC BY 3.0 IGO.
- Ghobadi, S. 2013. Behaviour and Information Technology: "How Access Gaps Interact and Shape Digital Divide: A Cognitive Investigation", DOI: 10.1080/0144929X.2013.833650.
- GSMA. 2019. "The Mobile Gender Gap Report 2019". GSM Association.
- Gusmansyah, Wery. 2019. "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia". *Jurnal Hawa*: Vol. 1, No. 1.
- Habsari, Sri & Rohmatin, Fatkhu & Istadiyantha, Istadiyantha. 2021. "Digital Ethnography of Social Media: Srikandi Sungai Indonesia Activists in Water and River Conservation". *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*. 34. 37. 10.20473/mkp.V34I12021.37-50.
- Harding, Sandra. 1988. *The Feminist Question of The Science Question in Feminism*. Cornell University Press.
- Hardjono, Agung. 2006. "Membangun Kultur Informasi dan Komunikasi: Studi Kasus Pembangunan Telecenter Di Perdesaan". Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung.
- Hargittai, Eszter. 2002. "First Monday, Peer-Reviewed Journal on the Intern April 2002": Second-Level Digital Divide: Differences in People's Online Skills, <https://doi.org/10.5210/fm.v7i4.942>.
- Istiqomah, Annisa. 2017. "Pembangunan Identitas Nasional dalam Konteks Masyarakat Multikultural melalui Situs Kewarganegaraan Berbasis Agama". Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- ILO. 2018. "Care Work and Care Jobs for The Future of Decent Work". Diakses pada 28 Maret 2021. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm.
- Joshi, A. 2010. "Do They Work? Assessing the Impact of Transparency and Accountability Initiatives in Service Delivery". Development Policy Review, Institute of Development Studies, University of Sussex. http://www.dfid.gov.uk/R4D/PDF/Outputs/Mis_SPC/60827_DPRJoshi_Preprint.pdf.
- Kang, Alice. 2004. "How Civil Society Represents Women: Feminists, Catholics, and Mobilization Strategies in Africa". FacultyPublications: Political Science. 58. Diakses pada 10 Mei 2021, <http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/58>.
- Kapriani, Dea Rizqi & Djuana P. Lubis. 2014. "Efektivitas Media Sosial untuk Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* | Desember 2014, Hlm. 160-170.
- Karolus, M.L. & Afiyani, I. 2016. "Yes, We Can! Perempuan sebagai Pengambil Alih dan Pengguna ICT". *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 4, November 2016 Hlm. 39-58.

- Kemenpppa. 2020. "Profil Perempuan Indonesia".
- Makinen, M. 2006. "Digital Empowerment as a Process for Enhancing Citizens' Participation. *E-learning and Digital Media*, 3(3), 381-395. <https://doi.org/10.2304/2Felea.2006.3.3.381>.
- Maryani, Eni & Janitra, Preciosa & Rahmawan, Detta. 2018. "Aliansi Laki-laki Baru": The Role of Social Media in Promoting Gender Equality in Indonesia. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*. 1. 117-132. 10.36625/sj.v1i2.19.
- MacPherson, S. & Wong H. (eds) 1998. *Social Development and Societies in Transition*. Ashgate: Aldershot.
- Miller, Paul W. 2009. "The Gender Pay Gap in the US: Does Sector Make a Difference?" *Journal Labor Res* (2009) 30:52-74 DOI 10.1007/s12122-008-9050-5.
- Min, Seong-Jae. 2010. *Journal of Information Technology and Politics*. "From the Digital Divide to the Democratic Divide: Internet Skill, Political Interest and The Second Level Digital Divide in Political Internet Use", 7:1, 22-35, DOI: 10.1080/19331680903109402.
- Norris, Pippa. 2001. *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge University Press.
- Parahita, Gilang. 2019. "The Rise of Indonesian Feminist Activism on Social Media". *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. 4. 104-115. 10.25008/jkiski.v4i2.331.
- Pratiwi A. & Gina A. 2017. *Jurnal Perempuan*: "Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias".
- Ratnasari, Eny & Sumartias, Suwandi & Romli, Rosnandar. 2021. "Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence". *Nyimak Journal of Communication*. 5. 97-116. 10.31000/nyimak.v5i1.3218.
- Rauf, DTB. 2020. "Indonesian Scientists Still Struggle to Include Gender and Minority Perspectives in Research". *The Conversation*. <https://theconversation.com/indonesian-scientists-still-struggle-to-include-gender-and-minority-perspectives-in-research-145384>, diakses pada Juni 2021.
- Rogers, E.M. 2001. "The Digital Divide. Convergence". *The International Journal of Research into New Media Technologies*, 7(4). Hlm. 96-111.
- Sanders, C.K. & Scanlon E. 2021. *Journal of Human Rights and Social Work*. "The Digital Divide Is a Human Rights Issue: Advancing Social Inclusion Through Social Work Advocacy" <https://doi.org/10.1007/s41134-020-00147-9>.
- Saptandari, Pinky. "Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan". *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Tahun XII, No. 2, April 1999. Hlm. 33-38.
- Suwana, Fiona & Lily. 2017. "Empowering Indonesian Women Through Building Digital Media Literacy". *Kasetsart Journal of Social Sciences*. 38. 212-217. 10.1016/j.kjss.2016.10.004.
- Sukmi, N.S. 2016. "Transformasi Komunikasi Gerakan Perempuan dalam Media Baru: Upaya Pencarian Keadilan Gender di Surakarta dan Yogyakarta". *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 4, November 2016. Hlm. 95-109.

- Sulistiyowati, Tutik, dkk. 2019. "Pelatihan Literasi Digital pada Perempuan Kelompok Binaan Sekolah Ibu Arjosari Malang". <http://ejurnal.umm.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3133>.
- Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019. PBS 2020. "Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2019".
- Tong, Rosemarie. 2009. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Westview Press.
- UNDP. 1993. *Human Development Report*. Oxford University Press: New York, Chapters 2, 4 and 5.
- Unctad. 2016. [https://unctad.org/system/files/non-official document/cstd2016_p06_DoreenBogdan_ITU_en.pdf](https://unctad.org/system/files/non-official%20document/cstd2016_p06_DoreenBogdan_ITU_en.pdf). Diakses pada 1 Mei 2021.
- UNDP. 1993. *Human Development Report*. Oxford University Press: New York, Chapters 2, 4 and 5.
- Van Dijk, JAGM & Hacker, K. 2003. "The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon". *Inf. Soc.* 19. 315-326. 10.1080/01972240309487.
- Van Dijk, J. A. G.M. 2018. "Afterword: The State of Digital Divide Theory. In M. Ragnedda, & G. Muschert (Eds.), *Theorizing Digital Divides* (Hlm. 199-206). Routledge.
- Van Deursen AJAM and Helsper E.J. 2015. "A Nuanced Understanding of Internet Use and non-use Among the Elderly. *European Journal of Communication* 30(2): 171-187.
- Van Deursen, AJAM & Van Dijk JAGM. *New Media & Society : The First-Level Digital Divide Shifts from Inequalities in Physical Access to Inequalities in Material Access*, sagepub.com/journals-permissions, DOI: 10.1177/1461444818797082, journals.sagepub.com/home/nms.
- World Bank. 2000. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. New York: Oxford University Press.
- Wittemyer R., Bailur S., Anand N., Park K.R., & Gigler B.S. 2014. *Closing the Feedback Loop Can Technology Bridge the Accountability Gap?: "New Routes to Governance: A Review of Cases in Participation, Transparency, and Accountability"*. World Bank. <http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0191-4>.
- World Wide Web Foundation. 2020. "Hak-Hak Daring Perempuan". Diakses pada 30 Maret 2021. <http://webfoundation.org/docs/2020/10/Executive-Summary-Indonesian.pdf>.
- World Wide Web Foundation. 2016. *Women's Right Online Report Card Indonesia*.
- WomEn Right Online. *Report Card Indonesia (Web Foundation 2020)*.
- Yulfianto, Ade & Jumaynah, Fullah. 2016. Melawan Kredo Aborsi: "Gerakan Abortion Is Not A Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 3. 59. 10.22146/jps.v3i2.23536.
- Wajman, Judi. 2004. *Techno Feminism*. Polity Press, Malden: USA.
- Yuval-Davis, Nira. 2016. "Intersectionality and Feminist Politics", *European Journal of Women's Studies*, SAGE Publications (UK and US), 2006, 13 (3), Hlm. 193-209. [ff10.1177/1350506806065752](https://doi.org/10.1177/1350506806065752). [ffhal00571274](https://doi.org/10.1177/1350506806065752)

infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

 **lpdp**
lembaga pengelola dana pendidikan

**#INOVASI
INDONESIA**